



UNIVERSITAS INDONESIA

**ADMINISTRASI KEPOLISIAN
POLRES METRO TANGERANG KOTA**

T E S I S

**TAVIP YULIANTO
0906595491**

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ADMINISTRASI KEPOLISIAN
POLRES METRO TANGERANG KOTA**

T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**TAVIP YULIANTO
0906595491**

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
JUNI 2011**

PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

N a m a : TAVIP YULIANTO

NPM. : 0906595491

Tanda tangan :

Tanggal : 20 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
N a m a : **TAVIP YULIANTO**
N.P.M. : **0906595491**
Program Studi : **KAJIAN ILMU KEPOLISIAN**
Judul Tesis : **ADMINISTRASI KEPOLISIAN POLRES METRO
TANGERANG KOTA**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Awaloedin Djamin M.PA
Penguji : Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi
Penguji : Dr. dr. H. Hadiman, SH.M.Sc
Penguji : Drs. PH. Hutadjulu, SH.MM

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka tesis yang penulis beri judul “**ADMINISTRASI KEPOLISIAN POLRES METRO TANGERANG KOTA**” akhirnya dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Tesis ini merupakan hasil karya maksimal penulis yang dilaksanakan selama penulis melakukan kegiatan penelitian mengenai administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota, dan secara kebetulan penulis sendiri sedang menduduki jabatan di kesatuan tersebut. Tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih, penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, S.Psy, selaku Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia; dan kepada Prof. Awaloedin Djamin M.PA., selaku pembimbing penulis yang telah dengan sabar dan teliti serta tidak bosan-bosannya memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis bahkan secara khusus beliau sempat meninjau langsung kesatuan Polres Metro Tangerang Kota serta memberikan pengarahan umum kepada seluruh anggota Polres Metro Tangerang Kota. Hal ini sangat memotivasi penulis untuk lebih bersemangat dan pada akhirnya kegiatan penelitian dan penulisan tesis dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada seluruh pejabat utama Polres Metro Tangerang Kota dan anggota khususnya staf pribadi Kapolres Metro Tangerang Kota dan Sdr. Dede yang telah membantu penulis terutama menyangkut pengumpulan data dan proses penyusunan tesis ini.

Secara khusus pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dorongan, semangat dan doa yang tiada henti sebagai wujud kasihnya agar anaknya dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Juga ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis tujukan pula kepada istri beserta anak-anak penulis, yang dengan segala kesetiiaannya telah memberikan doa, dorongan dan motivasi kepada penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh Staf Sekretariat Kajian Ilmu Kepolisian atas kerja samanya yang baik selama ini dan telah membantu

menyiapkan segala sesuatu berkenaan dengan perkuliahan, penelitian maupun penulisan tesis ini.

Akhirnya ucapan terima kasih ini penulis tujukan pula kepada para pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu terselesaikannya tesis ini. Hanya kepada Tuhan YME penulis berharap semoga semua amal baik yang telah diberikan oleh mereka yang telah membantu dalam rangka penulisan tesis ini mendapatkan balasan yang setimpal dan berlipat ganda.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan secara khusus berguna bagi lembaga kepolisian dan khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya.

Penulis,

TAVIP YULIANTO

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : TAVIP YULIANTO
N.P.M : 0906595491
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Nonesklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ADMINISTRASI KEPOLISIAN POLRES METRO TANGERANG KOTA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonesklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : J a k a r t a
Pada tanggal : Juli 2011

Yang menyatakan,

(TAVIP YULIANTO)

ABSTRAK

- A. Nama / NIM : Tavip Yulianto / 0906595491
B. Program studi : Kajian Ilmu Kepolisian
C. Judul Tesis : Administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis kondisi administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota sekarang, yang berkaitan dengan manajemen operasional dan manajemen pembinaan dalam mencapai tujuan tugas pokoknya pada kondisi pembangunan kota Tangerang saat ini, sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu kepolisian dan pembenahan kesatuan Polri khususnya Polres sebagai komando operasional dasar (KOD) di waktu yang akan datang.

Perkembangan administrasi kepolisian dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu dalam membahas administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota harus pula diperhatikan pula perkembangan lingkungan yang terjadi di kota Tangerang. Administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota mensyaratkan bahwa pencapaian tujuan tugas kepolisiannya ditentukan oleh manajemen operasional yang menyangkut tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang yang di atur dalam undang-undang, yang dilaksanakan oleh unsur-unsur operasional (Sabhara, Intelkam, Polantas, Reserse, Binmas), dan didukung oleh manajemen pembinaan (sumber daya manusia, material, anggaran dan pengawasan). Paradigma Polri yang berorientasi pada perlindungan dan pelayanan, mengedepankan tugas-tugas pre-emptif dan preventif sesuai dengan tuntutan masyarakat, dijadikan kerangka berfikir di dalam menganalisis fenomena dan praktek tugas kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota.

Penelitian ini dilakukan di Polres Metro Tangerang Kota sebagai unit analisisnya dengan metode kualitatif yang berfokus pada kedalaman mengungkap dan mengeksplorasi berbagai fenomena dan praktek tugas bidang operasional dan pembinaan di Polres Metro Tangerang Kota. Oleh sebab itu teknik pengamatan terlibat (*complete participant observation*) dan wawancara mendalam (*indepth-interview*) kepada informan kunci, dengan mengandalkan peneliti sebagai instrument penelitian diharapkan mampu mengeksplorasi kedalaman data yang lebih komprehensif. Triangulasi dan pemaknaan terhadap temuan penelitian merupakan pendekatan yang dikedepankan di dalam melakukan analisis.

Kata kunci : Administrasi kepolisian, manajemen operasional , manajemen pembinaan.

ABSTRACT

- A. Name / NIM : Tavip Yulianto / 0906595491
B. Study Program : Police Studies
C. Title : Metropolitan Tangerang Police Administration

This study aims to look at and analyze the state metropolitan Tangerang police administration now, relating to the management of operational and management guidance in achieving the main task in the conditions of the current construction of Tangerang city, making it beneficial for the development of police science and the improvement of the unity of the Police, especially police station as basic operational command (cod) in the future.

The development of police administration is influenced by the environment. Therefore, in discussing the metropolitan Tangerang police administration should also be noted also that the environmental developments happening in the city of Tangerang. Metropolitan Tangerang Police Administration requires that the achievement of goals set by management duties policing operations involving the main tasks, duties and powers that be set in legislation, implemented by the operational elements (Sabhara, Intelkam, Traffic Police, Detective, Binmas), and supported by management training (human resources, materials, budget and supervision). Paradigm Police protection and service-oriented, forward tasks and preventive pre-emptif accordance with the demands of society, the framework used in analyzing the phenomenon of thinking and practice of police duties at the police station Metropolitan Tangerang.

The research was conducted at the metropolitan Tangerang police station as the unit of analysis with qualitative methods that focused at a depth of reveal and explore the various phenomena and practices of operational and field coaching duties at the metropolitan Tangerang police station. Therefore, the observation techniques involved complete participant observation and in-depth interviews to key informants, by relying on the researcher as research instrument should be able to explore the depths of the more comprehensive data. Triangulation and interpretation of research findings are put forward approach in conducting the analysis.

Keywords: Police Administration, operations management, management coaching

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL & GAMBAR	xiv
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	xv
DAFTAR FOTO	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Penelitian	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Tata Urut Penulisan..	8
BAB II	
LANDASAN TEORI	10
2.1 Administrasi	10
2.2 Administrasi Kepolisian	11
2.3 Organisasi	15
2.4 Manajemen dan fungsi-fungsi manajerial	18
2.5 Hubungan Tata Cara Kerja dalam organisasi	20
2.6 Polisi, fungsi dan perannya dalam masyarakat	22
2.6.1 Konsep polisi	22
2.6.2 Fungsi dan peran polisi	26
2.7 Polri	32
2.8 Diskresi	33
BAB III	
METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.2.1 Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data.....	39
3.2.2 Instrumen Penelitian	42
3.2.3 Informan Kunci	42
3.2.4 Tehnik dan Analisis Data..	43
3.2.5 Pengujian dan Kredibilitas Data	45

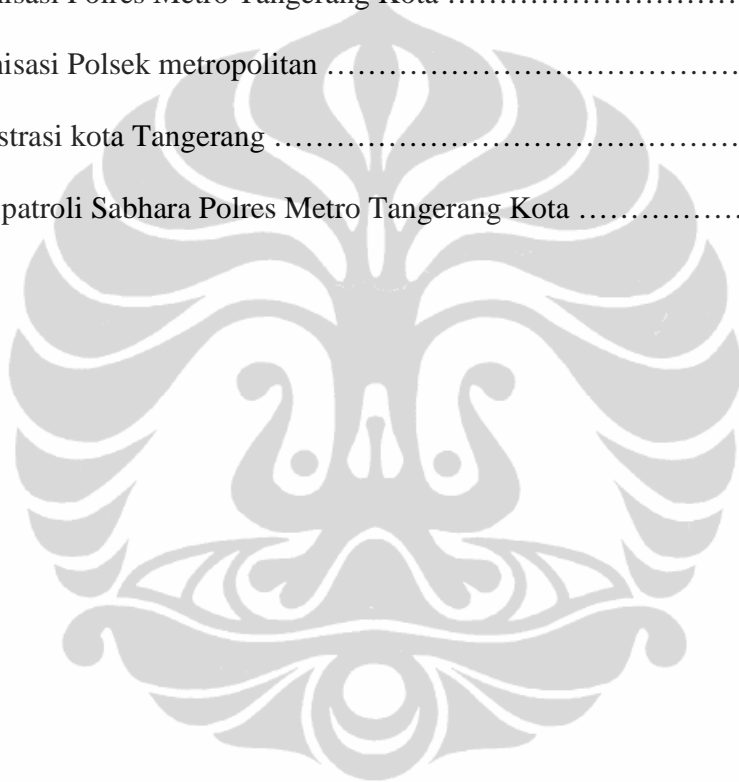
BAB IV	
ANALISIS HASIL TEMUAN PENELITIAN	48
4.1 Gambaran Umum kota Tangerang	48
4.1.1 Sejarah kota Tangerang	48
4.1.2 Letak dan luas wilayah kota Tangerang	52
4.1.3 Visi, misi dan kebijakan pemerintah kota Tangerang	53
4.1.3.1. Visi	53
4.1.3.2. Misi	54
4.1.3.3. Tujuan	55
4.1.4 Aspek Ipoleksosbud dan keamanan kota Tangerang	55
4.1.4.1. Aspek Ideologi dan Politik	55
4.1.4.2. Aspek Ekonomi	56
4.1.4.3. Aspek Sosial Budaya.....	57
4.1.4.4. Aspek Keamanan	59
4.2 Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota	72
4.2.1. Sejarah Polres Metro Tangerang Kota	72
4.2.2. Struktur Organisasi	75
4.2.3. Personil	78
4.2.4. Fungsi-fungsi operasional	82
4.2.4.1. Fungsi Sabhara	82
4.2.4.2. Fungsi Reserse	87
4.2.4.3. Fungsi Intelkam	92
4.2.4.4. Fungsi Lantas	94
4.2.4.5. Tugas dan Wewenang Operasional Polri yang tidak termasuk tugas unsure-unsur operasional	98
4.2.5 Fungsi Pembinaan	109
4.2.5.1. Bidang Sumber Daya Manusia	109
4.2.5.2. Bidang Saran dan Prasarana	114
4.2.5.3. Bidang Anggaran	116
4.2.5.4. Bidang Pengawasan	117
4.3 Tehnologi Kepolisian	119
BAB V	
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	121
5.1 Kesimpulan	121
5.2 Rekomendasi	124
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL, BAGAN & PETA

Tabel 1. Data Jumlah Industri di kota Tangerang	56
Tabel 2. Data Kriminalitas tahun 2008 s/d 2010 di kota Tangerang	60
Tabel 3. Data Kasus Narkoba tahun 2008 s/d 2010 di kota Tangerang	60
Tabel 4. Data Laka Lantas tahun 2006 s/d 2011 di kota Tangerang.....	61
Tabel 5. Data Pelanggaran Lantas tahun 2006 s/d 2011 di kota Tangerang	62
Tabel 6. Data kegiatan unjuk rasa tahun 2008 s/d 2010 di kota Tangerang	63
Tabel 7. Data kejadian tawuran/anarkis massa tahun 2010 s/d sekarang di kota Tangerang	64
Tabel 8. Data kejadian kebakaran tahun 2006 s/d 2010 di kota Tangerang	65
Tabel 9. Data wilayah Polsek di kota Tangerang	74
Tabel 10. Data kuat personil Polres Metro Tangerang Kota tahun 2011	79
Tabel 11. Data fungsi operasional di Polres Metro Tangerang Kota tahun 2011	81
Tabel 12. Data fungsi pembinaan di Polres Metro Tangerang Kota tahun 2011	82
Tabel 13. Data pengawalan Polres Metro Tangerang Kota tahun 2011	83
Tabel 14. Data Patroli Polres Metro Tangerang Kota tahun 2011	84
Tabel 15. Data buku petunjuk Sat Sabhara Polres Metro Tangerang Kota	86
Tabel 16. Data Kualitas Sat Sabhara Polres Metro Tangerang Kota	87
Tabel 17. Data Kualitas Sat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota	88
Tabel 18. Data Penyelesaian perkara pidana tahun 2005 s/d 2010	88
Tabel 19. Data PPNS di kota Tangerang.....	89
Tabel 20. Data kualitas Sat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota	90
Tabel 21. Data Penyelesaian kasus Narkoba Polres Metro Tangerang Kota	91
Tabel 22. Data kualitas Sat Intelkam Polres Metro Tangerang Kota	92

Tabel 23. Data Produk Sat IntelkamPolres Metro Tangerang Kota	93
Tabel 24. Data kualitas Sat Lantas Polres Metro Tangerang Kota	94
Tabel 25. Data Laka Lantas tahun 2009 s/d 2010 Polres Metro Tangerang Kota	95
Tabel 26. Data Satpam di kota Tangerang	99
Tabel 27. Data Status Satpam di kota Tangerang	100
Tabel 28. Data BUJP di kota Tangerang	102
Tabel 29. Data Polsus di instansi pemerintah kota Tangerang	103
Tabel 30. Data Sat Pol PP di kota Tangerang	104
Tabel 31. Data Pokdar Kamtibmas di kota Tangerang	105
Tabel 32. Data FKPM di kota Tangerang	105
Tabel 33. Data Babinkamtibmas di kota Tangerang	106
Tabel 34. Data Pos Kamling di kota Tangerang	107
Tabel 35. Data animo calon Bintara Polri tahun 2009 s/d 2010 di kota Tangerang	109
Tabel 36. Data anggaran rekrutmen calon Bintara Polri	110
Tabel 37. Data sosialisasi penerimaan Akpol dan PPSS Polres Metro Tangerang Kota	110
Tabel 38. Data peserta pelatihan tahun 2009 s/d 2010 Polres Metro Tangerang Kota	111
Tabel 39. Data cuti / Ijin tahun 2009 s/d 2010 Polres Metro Tangerang Kota	112
Tabel 40. Data perawatan kesehatan anggota tahun 2009 s/d 2010.....	112
Tabel 41. Data reward and punishment tahun 2009 s/d 2010	113
Tabel 42. Data pengakhiran tugas tahun 2009 s/d 2010 Polres Metro Tangerang Kota.....	114
Tabel 43. Data pengadaan alat dan alsus tahun 2009 s/d 2010.....	115
Tabel 44. Data anggaran harwat tahun 2010 di Polres Metro Tangerang kota	115
Tabel 45. Data penghapusan barang inventaris di Polres Metro Tangerang kota	116
Tabel 46. Data dukungan anggaran di Polres Metro Tangerang Kota	117

Tabel 47. Data kegiatan pengawasan internal di Polres Metro Tangerang kota	118
Tabel 48. Data kegiatan pengawasan BPK di Polres Metro Tangerang Kota	118
Tabel 49. Data kegiatan pengawasan Kompolnas di Polres Metro Tangerang Kota	119
Bagan 1. Tahap analisis data penelitian	45
Bagan 2. Administrasi Kepolisian	48
Bagan 3. Struktur organisasi Polres Metro Tangerang Kota	75
Bagan 4. Struktur organisasi Polsek metropolitan	77
Peta 1. Wilayah administrasi kota Tangerang	53
Peta 2. Ploting wilayah patroli Sabhara Polres Metro Tangerang Kota	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah.

Keberadaan Polri sekarang ini merupakan perkembangan dari perjalanan panjang sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa lampau yang meliputi masa penjajahan Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, masa revolusi dan masa kemerdekaan yang masing-masing itu membentuk kepolisian di Indonesia dengan segala kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya. Polri akan terus mengalami perkembangan di masa depan sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat yang semakin modern. Oleh karenanya perlu diadakan usaha pengembangan yang sistematis yang dilandasi adanya perencanaan pembangunan dengan memperhitungkan sebanyak mungkin berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan kata lain masyarakat yang modern menghendaki kepolisian yang modern. Perkembangan masyarakat dari segi jumlah penduduk yang saat ini hasil sensus penduduk tahun 2010 sudah mencapai 237.641.326 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2010) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan beragam kebudayaan yang berbeda-beda, disamping pula perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, perkembangan politik, pendidikan dan perkembangan lainnya sedikit banyak mempengaruhi situasi ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri menyelenggarakan bermacam ragam kegiatan dalam usaha untuk menghadapi tantangan perkembangan masyarakat dan pembangunan. Tuntutan masyarakat yang mendambakan terwujudnya keamanan, ketertiban, keadilan dan kepastian hukum dalam tugas – tugas kepolisian di Indonesia menuntut Polri memiliki kemampuan teknis profesional khas kepolisian yang mantap dan sikap mental pengabdian serta rasa tanggung jawab yang besar dari setiap anggota Polri dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi tanpa terkecuali.

Polres Metro Tangerang Kota merupakan bagian dari sistem Kepolisian Nasional Republik Indonesia memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk bisa memberikan pelayanan kepolisian guna menjamin terselenggaranya kehidupan masyarakat kota Tangerang yang aman dan tentram serta terjaminnya kelancaran terselenggaranya program-program pembangunan pemerintah kota Tangerang. Sebuah tugas yang harus dikelola melalui proses manajemen yang baik agar menghasilkan pekerjaan yang baik mengingat untuk mengelola keamanan sebuah kota besar seperti Tangerang yang sarat dengan kompleksitas masalah sosial seperti jumlah penduduk yang terus meningkat, berkurangnya lahan pertanian menjadi pemukiman dan sentra ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan serta masalah kriminalitas tidaklah mudah. Sebagai sebuah kota besar yang penduduknya sudah heterogen dengan jumlah mencapai 1.652.590 jiwa (data Pemkot Tangerang, 2009) memiliki potensi perbedaan-perbedaan kebudayaan tradisional terutama antara penduduk asli Tangerang (pengaruh Betawi) dengan komunitas China Benteng yang apabila tidak terkelola dengan baik akan menjadi sumber konflik baik horizontal maupun vertikal yang dapat merugikan masyarakat.

Perkembangan masyarakat kota Tangerang yang kental dengan budaya religiusnya baik dalam bidang ekonomi, teknologi, politik, pendidikan dan bidang lainnya telah menghasilkan hasil pembangunan yang positif bagi masyarakat, akan tetapi sekaligus akan menimbulkan pula masalah-masalah baru sebagai akibat sampingan dari pembangunan dan perkembangan masyarakat itu sendiri sehingga permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat akan menjadi bertambah kompleks. Hal ini antara lain disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan perkembangan komunikasi yang dimanfaatkan pula oleh para pelaku kejahatan, sehingga bentuk-bentuk kejahatan yang akan dihadapi oleh Polri mempunyai ruang lingkup antar daerah, regional dan bahkan internasional dengan mobilitas yang tinggi dengan tumbuhnya pola, bentuk dan dimensi yang baru seperti kriminalitas yang terorganisir, narkoba, pemalsuan dokumen berharga, terorisme, kriminalitas dengan pola tingkah laku massa dalam melancarkan aksinya di kota besar dan lain sebagainya.

Oleh karena itu dalam menghadapi perkembangan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat ini, perlu diimbangi dengan pengembangan kemampuan Polri yang sepadan baik secara kuantitas maupun kualitas, hal ini penting mengingat yang dihadapi Polri adalah warga negara dan orang lain yang dilindungi oleh hukum dan hak-hak azasi manusia. Dengan keterbatasan yang ada pada Polres Metro Tangerang Kota saat ini, terutama masalah jumlah personil yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk kota Tangerang dengan perbandingan 1 ; 1200 , maka usaha peningkatan mutu dan kemahiran perorangan anggota Polri merupakan hal yang menjadi perhatian utama, disamping perlunya mengikutsertakan masyarakat dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Dengan memperhatikan perkembangan lingkungan serta tantangan-tantangan tersebut terutama menghadapi tahun 2020 sesuai rencana strategis Polri dalam mencapai kesempurnaan dalam tugas pelayanan (*Strive for excellent*) yang akan datang, maka pembangunan Polri hendaknya seirama dengan tuntutan pembangunan di daerah pada umumnya, yang menuntut adanya peningkatan dan pengembangan kemampuan Polri (Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota) baik dalam bidang manajemen operasional maupun bidang pembinaan kepolisian (administrasi kepolisian).

Pengembangan atau pembangunan organisasi Polri akan berpengaruh pula terhadap sistem administrasi, khususnya administrasi kepolisian. Prof Awaloedin (2010) mengatakan bahwa “Administrasi Kepolisian merupakan administrasi negara yang secara khusus mengurus dan mengorganisir permasalahan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Mengurus dan mengorganisir permasalahan yang dihadapi Polri sehubungan dengan perubahan faktor-faktor lingkungan baik statis maupun dinamis seperti kependudukan , politik, ekonomi, dan sosial budaya dalam masyarakat. Dalam negara berkembang seperti Indonesia administrasi harus dapat mempengaruhi perkembangan lingkungan. Administrasi harus dapat merupakan “*change of agent*” atau “*development agent*” dalam negara yang sedang membangun. Administrasi dan lingkungan saling mempengaruhi.

Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian tentang Administrasi Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota, mengingat permasalahan mendasar yang dihadapi Polri saat ini adalah tuntutan untuk selalu memantapkan sistem administrasi kepolisian khususnya sistem administrasi kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota yang dirasakan belum berjalan sebagaimana yang di harapkan, sementara perubahan faktor-faktor lingkungan tersebut sangat cepat terjadi di masyarakat dan perlu di antisipasi oleh jajaran Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota agar situasi kamtibmas tetap terkendali.

1.2. Masalah penelitian

Sejumlah pertanyaan penelitian untuk memahami masalah dan fokus masalah tesis yang telah ditetapkan, termasuk menuntun peneliti untuk menemukan dan memahami sejumlah gejala, fakta dan pemaknaannya, serta prinsip-prinsip mendasar yang berlaku umum dalam proses penyelenggaraan administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota yang meliputi pertanyaan-pertanyaan tentang :

- a. Bagaimana pelaksanaan tugas unsur-unsur operasional (Sabhara, Intel, Reserse, Polantas) di Polres Metro Tangerang Kota dalam kaitannya tugas pelayanan kepada masyarakat ?
- b. Bagaimana peran fungsi pembinaan (sumber daya manusia, material/dukungan teknologi, anggaran dan pengawasan) dalam mendukung fungsi operasional ?
- c. Bagaimana pelaksanaan fungsi pembinaan masyarakat (Binmas) dalam membina kelompok-kelompok pengamanan swakarsa (Pam swakarsa) untuk membantu tugas-tugas Polres Metro Tangerang Kota ?
- d. Bagaimana administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang kedepan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat kota Tangerang ?

Masalah penelitian ini di pilih karena dalam menghadapi perkembangan dan dinamika masyarakat yang berubah dengan cepat menuju masyarakat kota Tangerang yang modern dan demokratis. Mengingat keberadaan polisi dalam masyarakat adalah untuk memnuhi tuntutan kebutuhan dari masyarakat yang

bersangkutan tentang adanya pelayanan polisi, maka di perlukan institusi kepolisian yang memiliki kemampuan untuk menangani dan mengatasi masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masalah keamanan.

Untuk mewujudkan rasa aman itu mustahil dapat dilakukan oleh polisi sendiri, juga mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara pemolisian yang konvensional, dan mustahil terwujud melalui perintah-perintah yang terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat yang berbeda – beda. Untuk mencapai pemolisian yang efektif di kota Tangerang maka di perlukan pengelolaan administrasi kepolisian yang baik dan benar sehingga profesionalisme Polri dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat yang dilayani di kota Tangerang.

Ruang lingkup dalam masalah penelitian ini adalah sistem administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota yang meliputi penyelenggaraan manajemen operasional, dan manajemen pembinaan dalam melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara kamtibmas, penegakan hukum dan pelindung, pengayom, pelayan masyarakat.

Maka fokus penelitian saya adalah: Bagaimana keadaan dan masalah Administrasi Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota dalam menghadapi perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat.

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan administrasi Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota saat ini dan masalahnya, situasi dan kondisi kota Tangerang dengan berbagai permasalahan pembangunan dan kondisi dinamis masyarakatnya, serta administrasi Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota kedepan yang diharapkan agar mampu menghadapi perkembangan yang terjadi di masyarakat menjelang tahun 2020.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini di maksudkan untuk memberikan rekomendasi tindakan yang tepat yang dapat digunakan oleh kesatuan Polri pada tingkat kewilayahan khususnya Polres Metro Tangerang Kota sebagai Komando Operasional Dasar (KOD) yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam

pembinaan kamtibmas. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan khususnya bagi pengembangan ilmu kepolisian serta dapat bermanfaat bagi pembedahan organisasi Polri ke depan.

1.4. Metode penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif (Suparlan, 2000) dengan metode deskripsif, yaitu dengan mengamati gejala – gejala yang terwujud dalam kegiatan pelayanan kepolisian dari obyek penelitian (Polres Metro Tangerang Kota) yang dilaksanakan unsur-unsur operasional kepolisian yang ada serta kegiatan fungsi pembinaan baik bidang sumber daya manusia, material, anggaran dan pengawasan. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap obyek penelitian yang diamati maka peneliti akan mengumpulkan data dengan cara : 1. pengamatan, 2. pengamatan terlibat, 3. wawancara dengan pedoman, 4. kajian dokumen.

Dengan metode pengamatan, peneliti akan mengamati secara umum daerah penelitian, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petugas yang melakukan tugas – tugas operasional maupun pembinaan kepolisian. Dengan menggunakan pengamatan dapat memperoleh gambaran lengkap mengenai gejala – gejala seperti pola pembinaan kamtibmas, sumber ancaman dan kerawanan yang dihadapi polisi saat ini dan yang akan datang di kota Tangerang.

Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan diri dalam manajemen dalam pengambilan keputusan dan pengendalian kegiatan manajemen pembinaan maupun operasional di Polres Metro Tangerang Kota dalam rangka pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wawancara dengan pedoman peneliti lakukan terhadap para Kabag, Kasat, Kapolsek dan para Kanit serta anggota yang terlibat langsung didalam fungsi-fungsi operasional dan pembinaan yang ada di Polres Metro Tangerang Kota dan jajarannya, termasuk wawancara kepada pemerintah daerah kota Tangerang, serta kepada masyarakat. Wawancara ini bertujuan mengumpulkan informasi dari

sumber informasi tersebut mengenai masalah – masalah kepolisian berdasarkan pedoman yang bertujuan untuk memperoleh respon atau pendapat mengenai masalah tersebut.

Kajian dokumen juga peneliti lakukan untuk mengumpulkan data – data tentang keadaan dan masalah Administrasi Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota saat ini dan yang akan datang. Adapun langkah – langkah yang peneliti lakukan sebagai berikut:

Mengingat obyek penelitian adalah kesatuan Polri tingkat Polres Metro, dimana peneliti sendiri terlibat didalamnya sebagai pengambil keputusan, maka peneliti dapat langsung melakukan penelitian tanpa meminta ijin terlebih dahulu. Peneliti menanggalkan atribut kedinasan dan tampil sebagai peneliti yang melakukan penelitian secara obyektif dalam mengumpulkan informasi ataupun data dari obyek penelitian. Menganalisis kelemahan-kelemahan atas pelaksanaan tugas-tugas operasional maupun pembinaan baik yang menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku maupun yang tidak dilaksanakan karena suatu sebab, kemudian menemukan solusi yang lebih baik. Mengumpulkan bahan – bahan keterangan untuk mendukung penulisan penelitian ini antara lain dari :

- Para kepala satuan fungsi kepolisian bidang operasional Polres Metro Tangerang Kota.
- Para Kabag bidang pembinaan Polres Metro Tangerang Kota.
- Para Kapolsek jajaran Polres Metro Tangerang Kota.
- Anggota Polsek, anggota satuan fungsi operasional di Polres Metro Tangerang Kota.
- Pejabat pemerintah kota Tangerang (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sat Pol PP, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Humas Pemerintah Kota.)
- Pejabat Dandim 0506 Tangerang.
- Instansi yang terlibat dalam *Criminal Justice System* (CJS) di Kota Tangerang. (Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, KA Lapas Dewasa dan Pemuda Tangerang.)

- Masyarakat (Mahasiswa, Kelompok Ormas, Swasta, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat.)

Melakukan pengamatan umum terhadap administrasi kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota, antara lain :

- Pelaksanaan tugas unsur-unsur operasional (Sabhara, Intel, Reserse, Polantas).
- Pelaksanaan tugas operasional lainnya dalam pembinaan masyarakat (Satpam, Polsus, Sispamwakarsa lainnya).
- Pelaksanaan fungsi-fungsi pembinaan bidang sumber daya manusia, material, anggaran dan pengawasan.
- Membuat catatan – catatan hasil pengamatan dan pengumpulan data serta informasi lapangan.
- Melakukan wawancara dengan berpedoman terhadap informan kunci.
- Membuat dokumentasi berupa foto atau rekaman video.
- Mengumpulkan buku – buku referensi sebagai pendukung teori ilmiah dalam penulisan hasil penelitian.
- Menyusun laporan hasil penelitian lapangan dan dituangkan dalam penulisan tesis.

1.5. Tata urutan penulisan

Tata urutan penulisan tesis tentang analisis organisasi Polres Metro Tangerang Kota untuk mendukung fungsi pelayanan keamanan dan ketertiban di Tangerang (Administrasi Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota) di susun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama, memberikan gambaran latar belakang, masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta tata urutan penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua, memberikan landasan teori dan prosedur penelitian sebagai pertanggung jawaban dari proses penelitian yang dilakukan dengan metode ilmiah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang peneliti gunakan terhadap sasaran penelitian yang meliputi gambaran umum wilayah kota Tangerang, sistem administrasi kepolisian meliputi manajemen operasional dan manajemen pembinaan di Polres Metro Tangerang Kota berikut permasalahan-permasalahannya.

BAB IV : ANALISIS HASIL TEMUAN PENELITIAN

Bab empat berisi analisis terhadap temuan temuan penelitian baik tentang perkembangan kota Tangerang dan masalahnya, serta kegiatan administrasi kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota yang meliputi manajemen operasional dan manajemen pembinaan saat ini maupun rencana pembenahannya yang akan datang.

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab lima berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari fakta-fakta (data) yang telah dianalisis berdasarkan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian, serta rekomendasi yang peneliti berikan sebagai masukan untuk pembenahan organisasi Polri ke depan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini peneliti membahas teori - teori tentang administrasi yang mendasari teori administrasi kepolisian sehubungan dengan judul tesis ini.

2.1. Administrasi

Konsep administrasi menurut Siagian (1989) adalah : proses penyelenggaraan serangkaian kegiatan oleh sekelompok manusia yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu. Dari konsep tersebut terlihat bahwa administrasi memiliki lima unsur yaitu, adanya suatu proses, adanya serangkaian kegiatan, adanya sekelompok manusia, adanya sarana dan prasarana serta adanya tujuan. Unsur proses, menunjukkan bahwa adanya suatu keberlangsungan dan kesinambungan sesuatu sejak dimulai hingga akhir. Keberlangsungan dan kesinambungan sesuatu berkaitan dengan erat dengan keterbatasan kemampuan manusia yang tidak memungkinkan mencapai kesempurnaan yang mutlak dari hasil karyanya dengan sertamerta. Oleh karena itu proses biasanya dilakukan melalui tahap-tahap tertentu, berdasarkan atas kurun waktu, sasaran, ketersediaan dana, atau kriteria lainnya. Setiap tahap diusahakan dan diharapkan menentukan dalam pencapaian tujuan, maka hubungan atau interaksi antar manusia yang ada didalamnya perlu diarahkan dan diatur oleh seperangkat aturan yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Menurut Weber (dalam Albrow, 1989) memandang kenyataan bahwa tingkah laku manusia biasanya diorientasikan pada seperangkat aturan (*ordnung*) yang berdasarkan analisis sosiologis, adanya seperangkat peraturan yang berbeda yang mengarahkan tingkah laku adalah merupakan konsep yang hakiki (*intrinsik*) bagi konsep organisasi. Namun Djamin (1995) juga melihat bahwa unsur lingkungan sangat penting pengaruhnya terhadap administrasi. Oleh karena itu dalam mengadakan perbandingan administrasi harus pula diperhatikan perbedaan lingkungan dari administrasi tersebut. Lingkungan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya harus selalu diperhitungkan dalam mempelajari administrasi.

Djamin (1995) menegaskan bahwa administrasi negara meliputi produk barang-barang dan jasa yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan warga negara yang menjadi konsumennya yang memiliki ciri-ciri, antara lain (1) tidak berpihak dan adil, (2) orientasi pada pelayanan kepada masyarakat, (3) keuangan dari anggaran pendapatan negara, (4) bersifat terbuka terhadap masyarakat, kecuali dalam hal-hal yang bersifat rahasia, (5) pegawai dipilih secara selektif, dan (6) mempunyai heirarki. Sedangkan administrasi pada sektor privat (*private administration*) mempunyai ciri-ciri: (1) dimiliki oleh swasta, (2) keuangan diatur oleh harga pasar, (3) keuntungan sebagai insentif utama, (4) bersaing dengan perusahaan lain, dan (5) bebas menerima dan memberhentikan pegawai, dalam batas peraturan perundangan.

Karena kepolisian merupakan bagian dari aparatur pemerintahan negara, maka administrasi kepolisian merupakan bagian dari administrasi negara, yang dibedakan dengan beberapa organisasi dalam administasi negara seperti *Military Administration*, *Police Administration*, *University Administration*, *Hospital Administration*, dan lain sebagainya.

2.2. Administrasi kepolisian.

Administrasi kepolisian dalam arti yang luas adalah : seluruh aktivitas - aktivitas dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan fungsi kepolisian. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus segera dibentuk yang terutama adalah organisasi, personil, praktek-praktek, dan prosedur-prosedur yang esensinya untuk efektifias kinerja dan penegakkan hukum dan fungsi-fungsi tradisional kepolisian lainnya, dan sebagai pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan (Kenney, 1975). Administrasi kepolisian merupakan administrasi negara yang secara khusus mengurus dan mengorganisir permasalahan Kepolisian Republik Indonesia (Djamin, 1995). Bailey (1995:10) menjelaskan bahwa administrasi polisi adalah segmen dari jaringan aparatur pemerintah yang menangani pelaksanaan tugas eksekutif didalam departemen kepolisian dan pelaksanaan kebijakan tertentu pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut berkaitan dengan tindak kriminal dan mencakup hukum tentang pelarangan atas berbagai tindakan, prosedur yang berkaitan dengan pelanggaran hukum,

pendekatan umum terhadap masalah kriminal (pencegahan, ketidakmampuan, rehabilitasi) dan ekspresi sentimen publik terhadap berbagai tipe kejahatan yang berbeda.

Leonhard Fuld (1909) dalam More (1979: 13) yang membahas berbagai permasalahan dengan "*Police administration*" menekankan tentang prinsip-prinsip dari "*Police administration*", yaitu:

"(1) the elimination of politics from police administration, (2) specialization of studies, (3) duties clearly defines, (4) constant supervision by supervisor, (5) strong chief executive leadership, (6) constant audit by inspectors, (7) maintenance of discipline, (8) comprehensive training of patrolmen, (9) selection personnel, and (10) elimination of non-police duties".

Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Fuld difokuskan pada kontrol pada proses manajemen, dan dititik beratkan bahwa manusia hanya dapat bekerja secara efektif apabila dilakukan pengawasan yang terus menerus dan ketat. Oleh karena itu, berbagai permasalahan dalam administrasi kepolisian dapat diatasi melalui kepemimpinan yang kuat dan mekanisme kontrol yang ketat.

Prinsip sejalan dengan bentuk kepolisian yang berorientasi pada masyarakat tampaknya akan menggantikan atau paling tidak mengubah model profesional administrasi kepolisian di masa depan. Model orientasi pada masyarakat menekankan kebutuhan bagi polisi untuk bersikap responsif terhadap kepentingan masyarakat dan kenyataannya untuk melibatkan masyarakat dalam mengendalikan kejahatan dan ketertiban. Kebijakan yang berorientasi pada masyarakat lebih menekankan efektifitas jangka panjang dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam masyarakat, alih-alih efisiensi jangka pendek seperti patroli bermotor dan respons seketika atas suatu panggilan. Administrasi kepolisian profesional bila diubah dengan prinsip yang berorientasi pada masyarakat akan membawa kebijakan kepolisian Amerika Serikat menjadi lebih dekat dengan prinsip yang dirumuskan Sir Robert Peel (Djamin, 2010). Selanjutnya Prof. Awaloedin Djamin, menjelaskan berdasarkan pendapat Hoover, 1992 tentang ruang lingkup tugas dan bidang administrasi kepolisian,

bahwa petugas polisi harus memperhatikan berbagai faktor yang mencakup tujuan, tugas, sumber daya, struktur, budaya, manajemen, dan lingkungan yang dijelaskan di bawah ini sebagai berikut :

- Tujuan (Objektif)

Tujuan utama departemen kepolisian adalah melindungi jiwa, properti, dan menjaga ketertiban umum. salah satu tugas dasar administrator polisi adalah menjamin bahwa berbagai aktivitas diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Prinsip itu harus ditanamkan dalam organisasi semangat tujuan yang dirasakan oleh semua anggota kepolisian.

- Tugas (Tasks)

Administrator harus merancang tugas khusus untuk mencapai tujuan tersebut. secara tradisional, 3 (tiga) kategori tugas polisi adalah: operasi, administrasi, dan pelayanan. Tugas operasi seperti patroli, investigasi kriminal, dan urusan lalu lintas, ditujukan secara langsung sistem administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada publik. Tugas administrasi yang mencakup pelatihan, personalia, dan anggaran, dilakukan setiap hari di dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Tugas pelayanan, seperti penangkapan, komunikasi, dan test alkohol juga dilakukan di dalam organisasi, tetapi lebih berkelanjutan dibandingkan tugas administrasi. Tugas administrasi dan pelayanan mendukung tugas operasi.

- Sumber daya (Resources)

Administrator polisi harus mampu sekaligus menggunakan secara bijaksana berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas demi pencapaian tujuan. Hal itu mengharuskan administrator polisi untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan anggaran pemerintah yang menentukan besarnya anggaran tahunan departemen kepolisian, kemudian menggunakannya secara terampil. Sebagian besar anggaran departemen kepolisian dihabiskan untuk gaji dan kesejahteraan, dan kebanyakan

sumber dayanya adalah manusia. Dengan demikian salah satu tugas utama administrator adalah memperoleh dan menggunakan sumber daya manusia.

- Struktur (Structure)

Dengan adanya kerawan yang ditempatkan dalam tugas akan memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi kepolisian sehingga dibutuhkan struktur untuk memandu pelaksanaan tugas itu. Struktur mencakup hierarki, distribusi kewenangan, deskripsi tugas, kebijakan, prosedur, aturan, dan peraturan. Administrator polisi harus menciptakan suatu kerangka kerja yang mengarahkan struktur dan organisasi ke berbagai tugas yang harus dilakukan dan bagi para petugas polisi yang bekerja baik dalam bidang pembinaan maupun operasional.

- Budaya (Culture)

Tiap organisasi mengembangkan budaya berdasarkan norma dan nilai-nilai yang memandu karyawan dalam berpikir dan bertindak. Administrator polisi harus membentuk budaya organisasinya untuk menumbuhkan perilaku yang patut dan menghilangkan perilaku yang tidak patut. Norma dan nilai-nilai yang konsisten dengan tujuan organisasi dan prinsip demokratis harus didukung dengan segala cara yang memungkinkan.

Sistem administrasi kepolisian yang berlaku saat ini melingkupi kegiatan yang dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

- Manajemen (Management)

Administrator polisi juga harus menyediakan suatu bentuk manajemen dalam kepolisian. Tidak peduli seberapa terperinci strukturnya, seberapa mendukung budayanya, dan seberapa jelas tujuan, masalah pertanyaan akan selalu muncul dalam pelaksanaan tugas polisi, berbeda dalam hal bakat dan komitmen. Manajemen dibutuhkan untuk

menjawab pertanyaan, mengawasi karyawan, dan secara umum untuk menjaga organisasi pada garis haluannya.

- Lingkungan (Environment)

Organisasi kepolisian tidak berfungsi dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh berbagai kekuatan dan perkembangan yang berasal dari luar organisasi. Tujuan organisasi kepolisian sebagian ditentukan oleh komunitas dan proses politis, anggaran bagi organisasi ditentukan oleh proses politis, karyawan, direktur dari dan di luar organisasi, pelaksanaan tugas dilakukan dalam masyarakat, sejumlah prosedur dan peraturan dibebankan oleh pengadilan dan biro administrasi lain dan seterusnya. Konsekuensinya, salah satu tugas penting administrator polisi adalah mengatur interaksi organisasi kepolisian dengan lingkungan sekitarnya. Upayanya dapat berupa mewakili organisasi berjuang demi sumber daya, menolak ancaman, dan mendidik komunitas mengenai tugas polisi dan kejahatan. Aspek orientasi luar dari administrasi polisi ini sangat krusial, namun sering diabaikan.

2.3. Organisasi.

Administrasi diperlukan untuk menata serangkaian kegiatan agar tercipta mekanisme kerja yang sistematis, adanya keteraturan dan kepastian. Dalam proses penataan tersebut diperlukan suatu cara dan wadah untuk melakukan berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi dalam mencapai tujuan. Wadah dan proses untuk melakukan berbagai kegiatan disebut dengan organisasi dan cara yang diperlukan untuk menata serangkaian kegiatan yang disebut dengan manajemen.

Sehingga menurut Woodrow Wilson (1887), organisasi dapat diibaratkan sebagai anatomi administrasi dan manajemen adalah fisiologinya (Djamin, 1995 dan lihat juga 2007). Siagian (1987) dan Bayley (1995) menyebutnya dengan tiga pilar komponen utama yang saling berhubungan dan mendukung satu dengan lainnya yang membangun administrasi yaitu manajemen, organisasi dan kegiatan-kegiatan operasional.

Organisasi sebagai anatomi administrasi diperlukan sebagai wadah dari proses interaksi manusia-manusia yang terdapat didalamnya, dimana aktivitas-aktivitas dari manusia-manusia tersebut secara nyata dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan operasional. Sebuah organisasi merupakan satu kesatuan sosial dari sekelompok manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu (pola kerjasama) sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai satu kesatuan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya (Lubis, 1987; Robbins 1990; Wexley dan YukI 1984 dalam Kasim 1993). Webber (dalam Albrow, 1996) bahwa konsep hakiki dari sebuah organisasi adalah adanya seperangkat aturan-aturan yang mengarahkan tingkah laku dari orang-orang agar berorientasi kepada tujuan yang disebut dengan tatanan administrasi, sehingga setiap anggota organisasi berada pada posisi menerima atau memberi tatanan organisasi, ada yang memerintah dan ada yang diperintah, karena aturan diciptakan untuk menjamin adanya keteraturan dan kepastian dalam mencapai tujuan. Dengan demikian sebuah organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama dan terikat secara formal dalam hubungan atasan dan bawahan, ada memerintah dan ada yang diperintah dalam mencapai tujuan bersama pula.

Hakekat organisasi sebagai salah satu komponen utama administrasi adalah sebagai wadah yaitu tempat dimana berbagai kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, serta sebagai proses interaksi dari berbagai kegiatan sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dan bawahan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama pula. Sebagai wadah, maka organisasi bersifat relatif statis karena sebagai wadah, organisasi harus memiliki pola dan struktur yang relatif permanen untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan tugas, meskipun dalam perkembangannya seperti semakin kompleksnya tugas-tugas, berubahnya pimpinan, beralihnya kegiatan, tumbuh dan berkembangnya organisasi, perubahan pola dan struktur dapat saja terjadi oleh karena itu sebagai wadah, organisasi dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: (1) organisasi sebagai struktur, (2) tipe atau bentuk dari struktur organisasi, dan (3) prinsip-prinsip organisasi (Siagian, 2001, 2004).

Analisis permasalahan organisasi dapat dilihat dengan memperhatikan karakteristik organisasi melalui dimensi-dimensi organisasi. Dimensi organisasi terdiri dari dimensi struktural (*internal*) organisasi dan dimensi kontekstual (*eksternal*) organisasi. Pada dimensi struktural, menggambarkan karakteristik internal organisasi yang menunjukkan (1) formalisasi, yaitu tingkat penggunaan dokumen tertulis yang menggambarkan perilaku dan kegiatan organisasi, (2) spesialisasi, yaitu menunjukkan derajat pembagian kerja, (3) standarisasi, yaitu menggambarkan derajat kesamaan pelaksanaan kerja, (4) sentralisasi, yaitu menunjukkan pembagian kekuasaan menurut tingkatan, (5) heirarki (otoritas), yaitu menggambarkan pola pembagian kekuasaan serta rentang kendali, (6) kompleksitas, yaitu menunjukkan banyaknya kegiatan, yang terdiri kompleksitas vertikal yang menunjukkan jumlah tingkatan dan kompleksitas horisontal yang menunjukkan banyaknya pembagian tugas, (7) profesionalisme, yaitu menunjukkan tingkat pendidikan, dan (8) konfigurasi, yaitu menunjukkan kompleksitas vertikal dan horisontal.

Pada dimensi kontekstual, menggambarkan karakteristik lingkungan organisasi, yang terdiri: (1) ukuran organisasi, yaitu menunjukkan jumlah anggota organisasi, (2) teknologi organisasi, yaitu menunjukkan jenis dan tingkat penggunaan teknologi, dan (3) lingkungan, yaitu menggambarkan semua elemen lingkungan yang mempengaruhi organisasi. *Organization as on interplay of technology, social structure, culture, and physical structure embedded in and contributing to an environment* (Hatch, 1997).

Hal ini tercermin dalam hubungan antara masyarakat dengan polisi adalah saling mempengaruhi, atau lebih tepatnya keberadaan polisi dalam masyarakat adalah fungsional dalam struktur kehidupan. Perubahan fungsi-fungsi atau tugas-tugas polisi terus berlangsung, karena keberadaan polisi adalah hasil tanggapan dari masyarakat yang bersangkutan dan untuk kepentingan masyarakat tersebut. Pada masyarakat pedesaan corak administrasi dan birokrasi polisi akan lebih santai terutama dalam hubungan dengan kegiatan-kegiatan sesama polisi dan masyarakatnya (Suparlan, 1997:67). Administrasi dan lingkungan saling mempengaruhi, keadaan lingkungan mempengaruhi administrasi (Djamin, 1995).

2.4. Manajemen dan fungsi-fungsi manajerial.

“Management, then involves planning, organizing, leading, and controlling the people working in an organization and the ongoing set of tasks and activities they perform (Hellriegel, 1996:5). Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the effort of organization members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals (Stoner,1982:7).”

Manajemen sebagai fisiologi dan salah satu komponen utama dari administrasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh hasil melalui kegiatan-kegiatan orang lain untuk mencapai tujuan, yang menunjukkan dalam manajemen terdapat kelompok orang yang menduduki berbagai tingkat jabatan untuk menggerakkan orang lain agar melakukan aktivitas-aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen juga dapat dilihat sebagai proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, dengan demikian dalam manajemen terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan melalui fungsi-fungsi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Siagian, 1989, 2007; Kartono, 2003; Terry, 2006; Stoner, 1996; Robbin, 1992; Purwanto, 2007). Kelompok orang menduduki berbagai tingkat jabatan dalam manajemen disebut dengan manajer, dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan merupakan fungsi-fungsi manajerial (Siagian, 1989, 2007; Kartono,2003; Terry, 2006).

Konsep fungsi selalu dikaitkan dengan konsep sistem, yaitu dalam kaitannya dengan unsur-unsur dalam sebuah sistem yang berada dalam hubungan fungsional, saling mendukung dan menghidupi, yang secara bersama-sama memproses masukan untuk menjadi keluaran (Suparlan, 2000). Fungsi-fungsi manajerial dapat digolongkan kepada dua jenis utama, yaitu fungsi organik dan fungsi penunjang (Siagian, 1989,2007). Fungsi organik adalah keseluruhan fungsi utama yang merupakan penjabaran kebijakan dasar atau strategi organisasi yang telah ditetapkan dan mutlak digunakan sebagai cara bertindak untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan fungsi penunjang merupakan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh orang-orang atau satuan-

satuan kerja dalam organisasi dan dimaksudkan untuk mendukung semua fungsi organik para manajer.

Terdapat berbagai pendapat mengenai fungsi-fungsi organik dari manajerial, tergantung dari sudut pandang ilmuwan yang menjelaskannya, sebagai berikut dibawah ini.

Siagian (1996) memberikan definisi manajemen adalah seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Definisi ini memberikan empat sudut pandang, masing-masing (1) betapapun berhasilnya para ilmuwan mengembangkan teori tentang manajemen, yang antara lain berakibat pada pengakuan bahwa manajemen merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial, namun penerapan berbagai teori manajemen itu tetap berdasarkan pendekatan situasional, artinya penerapan berbagai teori tersebut masih harus dibarengi oleh seni menggerakkan orang lain agar mau dan mampu berkarya demi kepentingan organisasi. (2) manajemen selalu berkaitan dengan kehidupan organisasional dimana terdapat sekelompok orang yang menduduki berbagai jenjang tingkat kepemimpinan dan sekelompok orang lain yang tanggung jawab utamanya adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan operasional. Pandangan ini sangat mendasar karena keberhasilan seseorang yang menduduki jabatan manajerial tidak lagi diukur dari keterampilannya menyelenggarakan kegiatan operasional, melainkan dari kemahiran dan kemampuannya menggerakkan orang lain. (3) keberhasilan organisasi sesungguhnya merupakan gabungan antara kemahiran manajerial dan keterampilan teknis para pelaksana kegiatan operasional. (4) kelompok manajerial dan kelompok pelaksana, mempunyai bidang tanggung jawab masing-masing yang secara konseptual dan teoritikal dapat dipisahkan, akan tetapi secara operasional menyatu dalam berbagai tindakan nyata dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya menurut Siagian (1996) faktor kemampuan dari kelompok manajerial merupakan faktor yang paling dominan dalam menggerakkan kehidupan organisasi, hal ini disebabkan karena (1) betapapun tingginya keterampilan yang dimiliki oleh pelaksana kegiatan operasional, mereka masih

tetap memerlukan pengarahan, bimbingan, dan pengembangan, (2) kemampuan manajerial untuk memperoleh sejumlah dana sesuai kebutuhan organisasi dan mengatur penggunaannya, (3) kemampuan manajerial diperlukan untuk pengelolaan sarana dan prasarana dihadapkan dengan berbagai keterbatasan dana agar tidak terjadi pemborosan yang dimulai dari pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan dan pemeliharaan, penyusutan dan penghapusannya, (4) kemampuan manajerial diperlukan dalam menyusun “aturan permainan” yang harus ditaati oleh anggota organisasi, (5) menciptakan iklim organisasi, dan (6) beradaptasi dengan lingkungannya.

2.5. Hubungan Tata Cara Kerja dalam organisasi.

Hubungan tatacara kerja formal dalam organisasi berkaitan dengan struktur organisasi atau *organigramme* atau *organization chart*. Struktur organisasi digambarkan pada peta atau skema organisasi yang memberikan gambaran mengenai keseluruhan kegiatan serta proses yang terjadi pada suatu organisasi. Terdapat empat komponen dasar yang merupakan kerangka dalam memberikan definisi dari struktur organisasi, yaitu (1) struktur organisasi memberikan gambaran mengenai pembagian tugas-tugas, serta tanggung jawab individu maupun bagian-bagian pada suatu organisasi, (2) memberikan gambaran hubungan pelaporan yang resmi dalam organisasi, (3) menetapkan pengelompokkan individu menjadi bagian dari organisasi dan pengelompokkan bagian-bagian itu menjadi bagian suatu organisasi yang utuh, dan (4) menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan pengintegrasian segenap kegiatan organisasi, baik kearah vertikal maupun horizontal. Tiga komponen pertama merupakan elemen-elemen yang bersifat statis yang tampak pada struktur, dan komponen yang ke empat bersifat dinamis (Lubis, 1987).

Struktur organisasi dapat diumpamakan dengan anatomi dan bersifat statis, sedangkan personil sesuai dengan jabatannya harus berhubungan kerja secara vertikal, horizontal, diagonal baik dengan internal Polri maupun dengan pihak luar (eksternal). Pejabat dalam hubungan kerja membuat organisasi menjadi dinamis atau diibaratkan dengan fisiologi. Hubungan tatacara kerja juga dikenal dengan

istilah *methods and procedures* atau *communication in management*. Karena yang berhubungan adalah manusia dalam jabatannya, maka pejabat pimpinan Polri, baik di pusat ataupun di daerah seharusnya memiliki pengetahuan dasar dalam *human behaviour* dan *human relations*. Di Indonesia yang multi etnis dan multi kultural, pengetahuan dasar tersebut benar-benar diperlukan. Dalam organisasi Polri dengan tugas-tugas dan wewenangnya yang luas, maka hubungan-hubungan tersebut harus ditata sebaik mungkin demi efisiensi dan efektifitas dan sedapat mungkin dibuatkan pedoman secara tertulis (Djamin, 2007). Hubungan yang terjadi didalam organisasi merupakan kewajiban dari pimpinan untuk menciptakan dan membina, hubungan internal disebut dengan *human relation* dan hubungan dengan eksternal disebut dengan *public relation*. Hubungan yang terjadi dapat dibedakan atas hubungan yang formal dan informal. (Siagian, 2004).

Hubungan tata cara kerja organisasi dapat dibedakan atas hubungan internal secara vertikal, horizontal, dan diagonal, serta hubungan eksternal secara lintas fungsional dan sektoral. Hubungan vertikal diperlukan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan dari berbagai tingkatan heirarki dalam suatu organisasi. Hubungan horizontal diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan individu ataupun bagian organisasi yang berada pada tingkatan heirarki yang sama. Disamping itu hubungan didalam organisasi juga dapat terjadi dan berlangsung secara diagonal dan lintas sektoral atau secara eksternal. Hubungan tata cara kerja secara diagonal merupakan hubungan antar bagian atau fungsi-fungsi yang berbeda tingkatannya dan berbeda unsurnya dalam organisasi. Hubungan tata cara kerja secara diagonal diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan anggota maupun bagian dari tingkatan heirarki yang berbeda. Hubungan eksternal merupakan hubungan formal antara bagian atau fungsi-fungsi didalam struktur organisasi dengan instansi lain diluar struktur organisasi.

2.6. Polisi, fungsi dan perannya dalam masyarakat.

2.6.1. Konsep polisi.

Dalam sejarah, istilah polisi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pada abad sebelum masehi negara Yunani kuno dan Romawi masih merupakan kota-kota yang setiap kotanya dinamakan “*Polis*”. Setiap polis memiliki Politeia tersendiri yang demikian luas pengertiannya meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, karena saat itu rasa kesatuan dalam masyarakat masih sangat kuat sehingga urusan agama termasuk dalam tanggung jawab pengaturannya oleh pemerintahan. Namun setelah agama Nasrani masuk, maka urusan keagamaan dipisahkan dari tanggung jawab pemerintahan, sehingga arti dari Politeia atau Polisi hanya urusan pemerintahan negara kota dikurangi urusan agama (Kelana, 1994; Muhammad; Utomo, 2005). Namun dalam perkembangannya, tugas-tugas pemerintahan semakin kompleks terutama setelah semakin berkembangnya hubungan dengan luar negeri, sehingga diperlukan diferensiasi tugas-tugas pemerintahan yang semakin tidak dapat dihindarkan. Pada abad ke-16 di Eropa, khususnya di Perancis, berkembang suatu pemikiran untuk melakukan pembagian kekuasaan pemerintahan dalam lima bagian, yaitu bidang defensi yang mengatur masalah pertahanan negara, bidang diplomasi yang mengatur masalah hubungan luar negeri, bidang finansial yang mengatur masalah keuangan negara, bidang justisi yang mengatur masalah peradilan, dan bidang polisi yang mengatur masalah kesejahteraan, keamanan dan kegiatan penolakan bahaya bagi rakyat. Polisi sebagai salah satu bidang pemerintahan, saat itu masih memiliki pengertian yang luas, yaitu bukan bagian dari keempat bidang pemerintahan lainnya, akan tetapi mengatur seluruh urusan yang tidak termasuk dalam keempat bidang lainnya, seperti urusan kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan (Kelana, 1994; Brotodiredjo, 1997 ; Utomo, 2005).

Pada perkembangan selanjutnya penggunaan istilah dan arti polisi semakin bervariasi sesuai dengan kebutuhan, penggunaan bahasa dan kebudayaan dari masing-masing negara. Di Inggris selain dikenal dengan sebutan “*police*” juga biasa dikenal dengan istilah “*constable*” yang mengandung dua pengertian tertentu bagi polisi, pertama sebagai sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*). Ada juga yang menyebut dengan panggilan “*bobby*” untuk petugas polisi di Metro London. Di Amerika Serikat selain digunakan istilah *police* juga dikenal dengan sebutan “*sheriff*” dan “*cop*”, di Jerman saat ini dikenal dengan sebutan “*polizei*”, yang sebelumnya menggunakan sebutan “*schutzstaffel*” sebagai polisi khusus pengawal pribadi Adolf Hitler pada tahun 1925, di Perancis disebut dengan “*gendarmerie*”, di Arab Saudi disebut dengan “*mutawa'een*”, di Belanda disebut dengan “*politie*” yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia baku dengan sebutan polisi.

Istilah atau kata polisi dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap manusia yang melanggar undang-undang dan sebagainya), dan sebagai badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan). Pengertian dari istilah atau terminologi polisi dapat dipandang sebagai kata benda, yaitu baik sebagai organ maupun para petugas/pejabat, dan sebagai kata kerja atau fungsi. Sebagai organ, maka polisi merupakan pranata dalam sistem pemerintahan yang melaksanakan fungsi kepolisian, sedangkan sebagai pejabat atau para petugas, maka istilah polisi melekat pada individu-individu yang diberikan otoritas secara legal untuk melaksanakan fungsi kepolisian dalam organ kepolisian, dan sebagai fungsi, maka polisi melaksanakan pekerjaan dalam rangka memberikan perlindungan (*to protect*) dan pelayanan kepada masyarakat (*to serve*) disamping juga sebagai penegak hukum (*law enforcement*).

Definisi yang diberikan oleh Klockars (1985) tentang polisi adalah sebagai institusi dan individu yang diberikan otoritas atau kewenangan yang

umum oleh negara untuk menggunakan paksaan atau kekerasan dalam lingkup permasalahan dalam negeri suatu negara. Definisi Klockars tersebut secara umum dapat digunakan untuk menjelaskan pengertian polisi saat ini, sebagai suatu lembaga dan individu yang diberikan kewenangan secara sah oleh negara untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemeliharaan keteraturan sosial dalam suatu negara (masalah-masalah domestik). Untuk melaksanakan tugas tersebut maka polisi secara sah dapat menggunakan kewenangannya untuk memaksa seseorang (dengan atau tanpa kekerasan) agar mentaati perintahnya, dan dapat pula melakukan aktivitas-aktivitas lainnya dalam lingkup tugasnya untuk bersama masyarakat melakukan tugas pemeliharaan keteraturan sosial. Kewenangan sah polisi diperoleh secara legal atau berdasarkan hukum dari negara sehingga setiap tindakan polisi selalu harus berdasarkan hukum.

Oleh karena itu hukum yang mengatur tentang hal ihwal mengenai polisi yang meliputi tugas-tugas, organ dan mengatur tentang bagaimana organ polisi melaksanakan tugasnya disebut dengan “Hukum Kepolisian” (Kelana, 1994; Brotodiredjo, 1997; Utomo, 2005). Tugas-tugas polisi dalam hukum kepolisian mengatur tentang batas-batas pekerjaan-pekerjaan polisi, pekerjaan polisi dalam arti luas melakukan pengaturan untuk menjamin tata tertib dan keamanan, secara khusus polisi juga melakukan tugas preventif atau melakukan pencegahan dan tugas represif atau menegakkan hukum. Hukum Kepolisian juga mengatur tentang organ melaksanakan kewenangan polisi baik secara umum yang disebut dengan polisi umum, maupun wewenang khusus yang disebut dengan polisi khusus. Hukum kepolisian mengatur organ polisi sebagai sebuah organisasi kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dengan titik berat pada manusia atau para pejabat polisi yang melaksanakan tugas-tugas polisi didalam organ polisi.

Sifat dari hukum kepolisian tidak berbeda dengan sifat hukum pada umumnya yaitu bersifat memaksa (*dwingen recht*) dan mengatur (*regelend recht*) (Utomo, 2005:58). Bersifat memaksa artinya petugas polisi dalam melakukan tindakannya harus selalu berdasarkan hukum, peraturan hukum

tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan apapun juga, peraturan hukum memberikan paksaan mutlak, dan bersifat mengatur memberikan aturan hukum sebagai pedoman tentang bagaimana tindakan yang harus diambil oleh petugas polisi sebaiknya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Sehingga yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang petugas polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, sekaligus menegakkan hukum, didalam hukum kepolisian dikenal azas-azas yang mendasari pelaksanaan wewenang kepolisian, yaitu (1) azas *legalitas* yaitu setiap tindakan kepolisian harus didasarkan pada undang-undang yang tertulis, dan jika tidak didasarkan kepada peraturan yang tertulis, maka tindakan kepolisian dianggap tidak sah atau melawan hukum, (2) azas *opportunitas* merupakan kebalikan dari azas legalitas, disamping polisi harus melaksanakan namun polisi juga harus tidak melaksanakan hukum, (3) azas *plichtmatigheid* yaitu tindakan polisi sah apabila didasarkan pada kekuasaan dan kewenangan umum, polisi diberikan kekuasaan inisiatif untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan dengan batasan-batasan sebagai berikut (a) azas keperluan (*noodzakelijk*) secara objektif menurut pendapat umum perlu dilakukan tindakan, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, misalnya dalam pemasangan papan reklame, polisi dapat memberikan tindakan agar tidak mengganggu rambu-rambu lalu-lintas, (b) azas masalah sebagai patokan (*zakelijk*) tindakan yang diambil benar-benar untuk menyelesaikan masalah, bukan berdasarkan pribadi dan tidak terikat kepentingan perorangan, (c) azas tujuan sebagai ukuran (*doelmatig*) yaitu tindakan yang paling tepat untuk mengelakkan gangguan, paling tepat menghindarkan kerugian yang lebih besar atau mengambil tindakan demi kepentingan umum, (d) azas keseimbangan (*evenreding*) tindakan yang diambil polisi harus sesuai dengan berat ringannya kesalahan, tidak menghambur-hamburkan atau tidak berlebihan tenaga, kekuatan atau peralatan, misalnya pengendara sepeda motor yang salah jalan tidak perlu dilakukan penahanan kendaraan dan penindakan yang berlebihan, cukup diberikan petunjuk dan peringatan.

2.6.2. Fungsi dan peran Polisi.

Konsep fungsi selalu digunakan dalam kaitannya dengan konsep sistem, yaitu dalam kaitannya dengan unsur-unsur dalam sebuah sistem yang berada dalam hubungan fungsional atau saling mendukung dan menghidupkan yang secara bersama-sama memproses masukan untuk menjadi keluaran. Sedangkan konsep peranan selalu dilihat dalam kaitannya dengan posisi-posisi yang dipunyai individu-individu dalam sebuah struktur yang satu dengan lainnya berada dalam satu ikatan hubungan peranan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam struktur tersebut. Sebuah struktur yang merupakan sebuah satuan yang terdiri atas peranan-peranan sebenarnya adalah sebuah sistem pada waktu peranan-peranan tersebut dilihat sebagai unsur-unsur yang masing-masing berada dalam hubungan fungsional untuk memproses masukan menjadi keluaran (Suparlan, 2000). Peranan juga dinyatakan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status atau posisi. Sementara status adalah suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya (Horton dan Hunt, 1991).

Dengan demikian untuk melihat efektifitas dari pelaksanaan fungsi dan peranan polisi, haruslah melihat penjelasan mengenai konsep fungsi dan peranan sebagai suatu sistem yang saling menghidupi. Polisi harus dilihat fungsi dan peranannya didalam masyarakat dan untuk masyarakat dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Polisi harus dilihat sebagai pranata atau institusi yang ada dalam masyarakat suatu negara dan peranan haruslah dilihat sebagai peranan dari petugas petugas polisi dalam masyarakat negara tersebut. Sehingga sebenarnya efektifitas dari pelaksanaan fungsi kepolisian tergantung dari kemampuan para individu-individu pelaksana tugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. semakin efektif para petugas kepolisian melaksanakan tugasnya masing-masing, maka akan semakin efektif pula fungsi kepolisian tersebut.

Fungsi polisi adalah fungsional dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara (Suparlan, 1999). Fungsi polisi harus dilihat

dalam perspektif bahwa individu, masyarakat dan negara masing-masing merupakan sebuah sistem yang secara keseluruhan memproses masukan-masukan program pembangunan untuk menghasilkan keluaran berupa kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan. Dalam proses demikian maka fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keluaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara merupakan unsur-unsur utama dan sakral dalam proses-proses tersebut tidak terganggu atau dirugikan. Sebab setiap gangguan hanya akan mengakibatkan tidak dapat dicapainya hasil keluaran yang diharapkan.

Sebagai perwujudan otoritas negara dalam melaksanakan pemolisian secara sah, maka fungsi kepolisian dilaksanakan oleh petugas-petugas kepolisian didasari dengan undang-undang dalam pelaksanaannya. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang merumuskan fungsi kepolisian RI dalam pasal 2 menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Sedangkan peran Polri, dirumuskan dalam pasal 5 yang berbunyi : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Fungsi kepolisian sebagaimana rumusan pasal 2 kemudian menjadi tugas pokok Polri, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 13 kemudian dirinci dalam beberapa tugas sebagaimana dirumuskan dalam pasal 14 yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan; Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- f. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- g. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- h. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau para pihak yang berwenang;
- i. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Selanjutnya untuk mengoperasionalkan tugas-tugas tersebut, maka Polri diberi kewenangan yaitu kewenangan umum kepolisian, kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan dan kewenangan dalam proses pidana. Kewenangan yang dimiliki ini merupakan landasan bagi peran para petugas-petugas polisi untuk bekerjanya fungsi kepolisian. Kewenangan umum kepolisian ini diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002, yaitu:

- a. Menerima laporan dan pengaduan warga masyarakat;

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup administrasi kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lainnya serta kegiatan masyarakat.

Pada pasal 15 ayat (2) Undang-undang nomor 2 tahun 2002, Polri sesuai dengan perundang-undangan lainnya berwenang untuk:

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap manusia asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Kewenangan lain yang diberikan kepada Polri adalah berkaitan dengan kewenangan dalam perkara pidana yang dirumuskan dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002, yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap manusia meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan manusia kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti manusia yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil manusia untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan manusia ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap manusia yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Dengan demikian Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 memberi amanat kepada Polri sebanyak 15 tugas-tugas (pasal 13 dan 14) dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya diberi 37 kewenangan (pasal 15 dan 16) untuk menjalankan fungsi kepolisian diseluruh wilayah Republik Indonesia (pasal 17), serta dapat melakukan tindakan diskresi menurut penilaiannya sendiri (pasal 18), dan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya harus senantiasa berdasar kepada norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengutamakan tindakan pencegahan (pasal 19).

Berdasarkan tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang yang dijelaskan diatas, maka ruang lingkup fungsi, tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang Polri pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi-fungsi utama kepolisian yaitu fungsi pre-emptif (pembinaan masyarakat), preventif dan represif. Fungsi utama kepolisian tersebut bersifat universal dan menjadi ciri khas kepolisian, dimana dalam pelaksanaannya Polri lebih mengutamakan preventif daripada represif, sejalan dengan falsafah yang dianut dalam dunia kedokteran yang menegaskan bahwa *prevention is better than cure* (Djamin, 1980).

Fungsi pre-emptif atau pembinaan masyarakat merupakan segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini hanya 20%, sedangkan 80% menjadi tugas instansi lain, organisasi kemasyarakatan, para tokoh agama dan sebagainya. Dalam rangka inilah Polri mengutamakan *community policing*.

Fungsi preventif merupakan segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. pelaksanaan fungsi preventif dilakukan dengan teknik pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Tugas Polri pada bidang ini adalah lebih kurang 50% dan 50% lagi adalah instansi lain, seperti Siskamling, Satpam, Polisi Pamong Praja dan Tramtib, dalam keadaan tertentu, Polri dibantu oleh TNI, dan fungsi represif merupakan fungsi penindakan hukum yang terbagi atas represif non justisil dan justisil. *Represif non justisil* dilaksanakan berdasarkan azas *plighmatigheid* yaitu merupakan wewenang diskresi yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 dan pasal 7 KUHAP. Represif justisiil dilaksanakan berdasarkan azas legalitas bersama unsur criminal justice system lainnya (Djamin, 1980, 2007). Dengan demikian dalam melaksanakan fungsi utama kepolisian, tidak berarti Polri melaksanakan sendiri seluruh fungsi kepolisian dan bertanggung jawab atas seluruh fungsi pre-emptif, preventif dan represif, namun dalam mengemban fungsi kepolisian selain dibantu oleh masyarakat, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 3, Polri juga dibantu secara fungsional oleh Kepolisian Khusus (Polsus), PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Oleh karena itu Polri wajib memberikan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan terhadap instansi atau badan pemerintah yang membantu Polri dalam mengemban fungsi kepolisian.

2.7. Polri.

Polri merupakan akronim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu pranata dari sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang mengemban fungsi kepolisian. Sebagai sebuah pranata, maka Polri harus merupakan sistem antar hubungan dan peranan-peranan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melaksanakan fungsi kepolisian. Fungsi, peran dan tugas Polri diatur dalam Undang undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berturut turut, fungsi kepolisian diatur dalam pasal 2 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 4 dijelaskan bahwa Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Peran Polri selanjutnya dijelaskan dalam pasal 5 yaitu alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selanjutnya tugas pokok Polri dijelaskan pada pasal 13 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri merupakan kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan perannya selaku alat negara diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, sehingga setiap pejabat Polri dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, terutama diwilayah dimana dia ditugaskan. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan peran dan fungsinya tersebut, satuan kepolisian dibagi dalam daerah kepolisian yang diusahakan serasi dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, oleh karena kedudukan Polri dalam sistem pemerintahan berada dibawah Presiden, maka Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden.

2.8. Diskresi.

Diskresi merupakan kewenangan polisi dalam melaksanakan pemolisian. Diskresi merupakan tindakan yang diambil untuk tidak melakukan tindakan hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum, kemanusiaan, memberikan

pencerahan atau pendidikan kepada masyarakat. Tindakan diskresi bisa dilakukan oleh setiap anggota kepolisian yang bertugas atau menangani suatu kasus atau permasalahan dalam lingkup tugas dan kewenangannya. Menurut Davis (dalam Bailey (ed), 1995) *police dicretion maybe defined as the capacity of police fficers to select from among a number of legal and ilegal courses of action or inaction while performing their duties.*

Tindakan diskresi juga harus didasari dengan hati nurani, etika dan moral untuk kepentingan umum, bersifat mendesak dan tidak untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok atau organisasi. Prof. Satjipto Rahardjo (2000) mengatakan : "... dalam melaksanakan tugasnya polisi hendaknya menggunakan O2H yaitu otot, otak dan hati nurani". Menurut Sitompul (2000) dan Utomo (2005) untuk melaksanakan tindakan diskresi berpatokan terhadap empat azas yaitu :

- a. Asas keperluan, adalah yang memberi pedoman bahwa tindakan polisi hanya dapat dilakukan apabila tindakan itu betul - betul untuk meniadakan atau mencegah suatu gangguan
- b. Asas masalah, merupakan patokan memberi pedoman bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang polisi harus dikaitkan dengan permasalahannya dan tindakan polisi tidak boleh mempunyai motif pribadi
- c. Asas tujuan, menghendaki agar tindakan polisi betul-betul tepat mencapai sasarannya, guna menghilangkan atau mencegah suatu gangguan yang merugikan.
- d. Asas keseimbangan, memberikan pedoman kepada petugas polisi agar tindakan yang diambil, seimbang dengan alat yang digunakan dengan ancaman yang dihadapi.

Sejumlah manfaat diskresi yang berguna dalam penanganan permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai salah satu cara pembangunan moral petugas kepolisian dan meningkatkan cakrawala intelektual petugas dalam serta menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukannya dengan kesewenang-wenangan ataupun semangat yang berlebihan.

Tindakan diskresi harus dipagari dengan norma-norma, profesional, norma-norma dalam masyarakat, norma hukum dan moral. Diskresi bukan hanya perlu tetapi juga penting untuk dilakukan oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya. Karena polisi bekerja dalam penegakan hukum langsung berhadapan dengan masyarakat dan dalam mengambil kebijaksanaan dilapangan juga di pengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adalah faktor lingkungan. Selain pantas untuk dilakukan diskresi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan tugas polisi karena: (1) undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas dilapangan, (2) hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut, dan (3) pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas kepolisian.

Kewenangan melakukan diskresi secara implisit diatur dalam beberapa pasal di Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, arrrtara lain terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ayat (1) yang menjelaskan untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, dan selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 18 dalam undang-undang ini memberikan kewenangan diskresi kepada pejabat Polri untuk melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri yang didasarkan kepada: (1) untuk kepentingan umum, (2) memperhatikan peraturan perundangan serta kode etik profesi, (3) dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu, dan (4) mempertimbangkan manfaat dan resiko yang akan terjadi. Serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan (pasal 18 ayat 1 dan 2). Selanjutnya dalam menyelenggarakan tugas pokok Polri dibidang proses pidana, penyidik juga diberi

kewenangan diskresi berupa tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab seperti dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pasal 16 ayat t huruf 1. Kewenangan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab adalah merupakan tindakan dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 dan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan pasal 7 ayat (1) huruf j dalam penjelasannya, yaitu (1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, (2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, (3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, (4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan (5) menghormati hak asasi manusia.

Azas *plichmatigheid* dalam hukum kepolisian juga sangat dekat kaitannya dengan pembatasan kewenangan polisi dalam konsep diskresi yaitu membatasi kewenangan polisi dalam melaksanakan kekuasaan umum untuk melakukan tindakan yang diserahkan kepada inisiatif petugas polisi itu sendiri. Batas-batas kewajiban dan sekaligus membatasi kewenangan dalam azas *plichmatigheid* adalah: (1) azas keperluan (*noodzakelijk*) yaitu secara obyektif menurut pendapat umum tindakan polisi harus dilakukan, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, misalnya memerintahkan pemindahan pemasangan papan reklame yang menutupi rambu lalu lintas, meskipun pemasangan tersebut telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang, (2) azas masalah sebagai patokan (*zakelijk*) yaitu tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi anggota polisi, (3) azas tujuan (*doelmatig*) yaitu tindakan yang diambil benar-benar untuk mengelakkan gangguan dan memperkecil kerugian serta korban, dan (4) azas keseimbangan (*evenreding*) yaitu tindakan yang diambil polisi harus sesuai antara tindakan dengan berat ringannya masalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini adalah suatu analisis untuk memahami fenomena kegiatan pelayanan unsur-unsur operasional dan pembinaan kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota dalam dengan pendekatan kualitatif. Dengan perkataan lain, penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan fenomena nyata dan alamiah dari implementasi administrasi kepolisian di tingkat Polres. Studi kualitatif ini berkaitan erat dengan penyelidikan alamiah sebagai salah satu tradisi yang berlaku dalam ilmu pengetahuan sosial. Suatu penyelidikan yang secara mendasar menggantungkan pengamatannya pada manusia, baik dalam aspek wawasan maupun peristilahan (Miller and Kirk, 1986).

Ada beberapa prinsip dasar penelitian kualitatif yang dipegang dalam rangkaian upaya memahami pokok permasalahan yang diteliti. Pertama, mengkonstruksikan realitas makna sosial dan budaya. Kedua, memusatkan fokus pada interaksi peristiwa dan proses. Ketiga, suatu variable dipahami secara kompleks karena saling terkait dan sulit untuk diukur. Keempat, otentitas atau originalitas sebagai nilai kunci yang harus ada dan bersifat eksplisit. Kelima, studi ini bersifat kontekstual. Keenam, studi mengangkat pada beberapa kasus atau subjek. Ketujuh, mengutamakan perspektif *emic*. Kedelapan, analisisnya bersifat tematis. Kesembilan, pengumpulan data memerlukan partisipasi atau keterlibatan peneliti (Bogdan, 1982; Creswell, 1994; Denzin and Lincoln, 1994; Suparlan, 1994; Spradley, 1997; Moleong, 1999; Sugiyono, 2007).

Penelitian kualitatif antara lain mempunyai karakteristik sebagai berikut : (1) data diambil dari setting ilmiah, (2) peneliti adalah instrument pokok penelitian, (3) penentuan sampel dilakukan secara *purposive*, (4) analisis data untuk jenis penelitian ini dilakukan lebih sebagai pedoman secara induktif, dan (5) hasil penelitian ini lebih mengutamakan makna (*meaning*) dibalik data dan informasi yang diperoleh (Bogdan, 1982; Sugiyono, 2007).

Tesis ini bermaksud mengungkap fenomena dibalik sistem administrasi di tingkat Polres dengan menyelidiki kegiatan pelayanan kepolisian yang dilaksanakan oleh unsur-unsur operasional kepolisian (Sabahara, Reserse, Intel, Lalu lintas, fungsi pembinaan masyarakat) dan fungsi pembinaan yang ada di Polres Metro Tangerang Kota.

Penekanan pada aspek organisasi dan individu (sumber daya manusia) yang didasarkan pada premis bahwa pencapaian tujuan kepolisian sangat ditentukan oleh manajemen operasional yang didukung manajemen pembinaan serta teknologi kepolisian. Oleh karena itu secara khusus untuk memahami masalah penelitian ini, saya akan melihat Polres Metro Tangerang Kota sebagai KOD yang merupakan satuan administrasi kepolisian di tingkat kotamadya dalam melaksanakan pelayanan masyarakat melalui berbagai aktifitas yang mencakup kegiatan manajemen operasional yang meliputi penyelenggaraan fungsi-fungsi pre-emptif, preventif dan represif.

Pada fungsi-fungsi kepolisian itu yang akan dipahami implementasi dan interpretasi proses penyelenggaraan perencanaan, pengorganisasian, pelaksana, pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan maupun operasional. Perencanaan-perencanaan manajerial yang meliputi perencanaan bidang operasional dan pembinaan.

Fungsi pre-emptif dan preventif yang di laksanakan melalui kegiatan patroli Sabhara, yang dapat menyentuh semua warga dan di berbagai lokasi yang dianggap rawan memberikan dampak untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan sehingga tidak terjadi kejahatan. Demikian halnya pemberdayaan kekuatan pengamanan swakarsa sebagai kekuatan yang dapat membantu tugas Polri baik untuk pengamanan di lingkungan pemukiman warga, industri maupun instansi/perkantoran pemerintah dan swasta mengakomodir peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban. Fungsi represif dalam penegakkan hukum yang cukup luas kerjasama dengan instansi yang terlibat dalam *criminal justice sistem* dan pembinaan dan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil meningkatkan proses penyelesaian perkara pidana yang terjadi.

Sebagai satuan administrasi yang dipengaruhi oleh lingkungannya, maka secara khusus juga akan dipahami penyelenggaraan kegiatan administrasi kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota yang dipengaruhi oleh corak masyarakat dan kebudayaannya, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melalui interaksi, menghadapi masalah-masalah sosial dan upaya-upaya penyelesaiannya agar terpeliharanya keteraturan sosial dalam masyarakat.

3.2. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi unit analisis penelitian ini adalah Polres Metro Tangerang Kota yang terdiri dari Markas Polres, Markas Polsek dan gambaran wilayah serta corak masyarakat dan kebudayaan masyarakat di wilayah Polres Metro Tangerang Kota.

Pengamatan dan analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, melakukan pengamatan dan analisis terhadap gambaran umum wilayah Polres Metro Tangerang Kota, corak masyarakat dan kebudayaannya sebagai faktor lingkungan yang memiliki hubungan fungsional dengan corak pemolisian dan kegiatan kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota. Kedua, melakukan pengamatan dan analisis terhadap deskripsi Polres Metro Tangerang kota sebagai satuan kepolisian dibawah Polda Metro Jaya yang melaksanakan fungsi kepolisian ditingkat kotamadya yang mengacu pada peraturan perundangan, kebijakan-kebijakan dan berbagai aturan tertulis dari satuan atas. Ketiga, melakukan pengamatan dan analisis terhadap potret kegiatan administrasi kepolisian melalui proses penyelenggaraan manajemen operasional yang meliputi penyelenggaraan pelayanan unsur-unsur operasional Polri dan penyelenggaraan manajemen pembinaan.

3.2.1. Sumber data dan tehnik pengumpulan data.

Sumber dan tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Melalui penelitian kualitatif, maka sumber data dipilih secara “*purposive dab snowball*” berdasarkan pendekatan *emic* yaitu memperoleh data bukan “sebagaimana mestinya”, bukan berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliti, tetapi harus

sebagaimana adanya yang terjadi, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh sumber data (Sugiyono, 2007)

Melalui sumber data purposive, pengambilan sumber data dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data merupakan mereka yang menguasai, memahami, dan terlibat langsung sebagai pelaksana atas sasaran kajian yang sedang diteliti, seperti para pimpinan dan petugas pelaksana di Polres Metro Tangerang Kota, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya. Penggalan sumber data juga dapat diteruskan melalui teknik snowball untuk mendapatkan data yang lebih mendalam lagi dari orang-orang yang dapat memberikan penjelasan atas fenomena yang terjadi.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara, kajian dokumen dan triangulasi atau gabungan. Melalui metode pengamatan, peneliti mengamati *key informan* dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya, aktifitas-aktifitas dan hubungan-hubungan yang terjadi antara atasan yang memberikan perintah kepada bawahannya, antara para pejabat yang setingkat dalam melakukan koordinasi, antara sesama bawahan dalam melakukan interaksi sosial, antara petugas polisi dengan aparat pemerintahan daerah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepolisian. Termasuk melakukan pengamatan terhadap gejala dan fakta yang berlangsung dilingkungan masyarakat berupa tingkah laku, kegiatan, peristiwa dan benda-benda yang diproduksi oleh masyarakat yang menunjukkan kekhususan dari corak masyarakat dan kebudayaan di Tangerang. Teknik wawancara dimanfaatkan ketika bertemu dengan para pejabat Polres, petugas polisi dibidang administrasi dan petugas pelaksana operasional lapangan dalam kesempatan-kesempatan formal dan informal, serta terhadap warga masyarakat di dalam kota maupun di pinggiran kota sebagai para pelaku kebudayaan masyarakat Tangerang.

Wawancara dengan pedoman atau petunjuk umum dilakukan dengan unsur pimpinan Polres, perwira staff, dan sejumlah petugas kepolisian, juga dengan pejabat pemerintahan daerah setempat, warga dan tokoh masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi kepolisian. Wawancara dengan pedoman ini digunakan untuk memperoleh informasi

mengenai kedekatan hubungan polisi dengan masyarakat yang dilayani dan sikap masyarakat terhadap tugas-tugas Polri yang telah dilaksanakan sehari-hari yang dapat dirasakan oleh warga dan dampaknya terhadap rasa aman masyarakat, tentunya dalam kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan kepolisian.

Kajian dokumen dilakukan untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan berbagai peraturan dan kebijakan pimpinan kepolisian dari tingkat pusat sampai tingkat Polres, arahan-arahan, instruksi-instruksi, dan prosedur-prosedur tertulis dari pejabat di Polres dan satuan kepolisian di atasnya (Polda). Termasuk kajian dokumen pemerintah yang menunjukkan kekhususan dari corak masyarakat dan kebudayaan di Tangerang.

Triangulasi atau penggabungan teknik pengumpulan data dan sumber data digunakan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap temuan hasil penelitian. Melalui triangulasi teknik digunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dan melalui triangulasi sumber, peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama.

Sesuai dengan focus penelitian, maka yang dijadikan sumber dan tehnik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan data dan memahami tentang administrasi kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota dan implementasinya sumber data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepolisian seperti Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 dan produk perundang-undangan lainnya yang menjadi landasan tugas Polri serta menjadi lingkup kewenangan Polri bertugas. Termasuk produk-produk Keputusan Presiden yang mengatur tentang organisasi Polri serta Keputusan Kapolri , Keputusan Kapolda yang mengatur tentang pelaksanaan tugas-tugas operasional dan pembinaan Polri. Sumber data juga diperoleh melalui pengamatan terlibat penuh dan wawancara kepada informan yang dipilih secara purposive dan snowball kepada para pejabat manajerial dalam proses manajerial yaitu

meliputi bidang operasional dan pembinaan yang menjadi tanggung jawabnya.

- b. Untuk mendapatkan data dan memahami corak masyarakat dan kebudayaannya, sumber data diperoleh melalui pengkajian dokumen primer dan sekunder tentang intelijen dasar Polres Metro Tangerang Kota, data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari pemerintah kota Tangerang. Sumber data juga diperoleh dari hasil pengamatan terhadap kehidupan, cara berfikir, peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan masyarakat, dan benda-benda yang digunakan untuk menghadapi dan memanfaatkan lingkungan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Wawancara dengan masyarakat sebagai pelaku yang dipilih secara purposive dari masyarakat di kota, termasuk wawancara dengan pejabat Muspida kota Tangerang.
- c. Untuk memahami data tentang strategi yang sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaan melalui pengkajian berbagai teori dan konsep strategi pemolisian serta corak masyarakat dan kebudayaannya yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara terhadap kehidupan, kegiatan, kenyataan-kenyataan serta nilai-nilai yang digunakan dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang mengacu kepada kebudayaan masyarakat kota Tangerang.

3.2.2. Instrumen penelitian.

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri, namun untuk mempertajam hasil penelitian dikembangkan dengan menggunakan *key informan* untuk menggali data wawancara yang lebih mendalam dan objektif, terutama dalam menggali data tentang kepemimpinan, pengambilan keputusan dan hubungan tata cara kerja.

3.2.3. Informan kunci.

Penentuan informan kunci (*Key informan*) dilakukan secara *snowball* untuk mengejar kedalaman data, tetapi langkah awal beberapa informan kunci telah ditentukan terlebih dahulu. Sejumlah informan yang telah dipilih untuk menjadi narasumber dalam penelitian adalah (1) pejabat Polres Metro Tangerang Kota, yang terdiri dari Wakapolres, para Kabag, Kasat fungsi dan

Kapolsek (2) para anggota pelaksana yang dipilih secara *purposive* meliputi Kasubbag Minpers, Kasubbag Sarpras dan kaurbinops satuan fungsi Intelkam, Reskrim, Kanit Patroli Sabhara, dan para anggota dari masing-masing satuan fungsi dan Polsek, (3) Pejabat Muspida yang terdiri dari Walikota, Sekretaris Daerah, Kabag Aset, dan Kajari Kota Tangerang, (4) Tokoh agama dan warga masyarakat kota Tangerang.

Wawancara dan pengamatan dilakukan ditempat informan bekerja, melakukan aktifitas sehari-hari dan diluar tempat informan bekerja seperti dirumah. Wawancara secara sendiri-sendiri dan juga secara bersamaan, melakukan diskusi yang dilakukan berkali-kali sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu dari para informan.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara atau melakukan diskusi dengan topik yang bebas yang dipilih oleh para informan. Kegiatan wawancara ini dicatat oleh peneliti dan dibantu oleh seorang asisten termasuk direkam dengan menggunakan *digital voice recorder* yang telah disiapkan peneliti sejak awal dan hal itu diberitahukan kepada informan. Sebelum direkam proses wawancara terlebih dahulu ditanyakan atau diminta kepada informan kesediaannya untuk direkam pembicaraannya dan dituliskan apa yang dibicarakannya selama wawancara untuk kepentingan ilmiah.

Selain itu untuk memastikan bahwa data dan informasi yang diperoleh akurat dilakukan triangulasi. Triangulasi dilakukan terhadap sumber data untuk memperkaya kedalaman data dan menguji kredibilitas data yang diperoleh dari informan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, misalnya data tentang kepemimpinan diperoleh dari perilaku informan sebagai atasan, maka dilakukan pengkayaan data yang diperoleh dari sumber informan sesama pejabat dan anggota. Triangulasi teknik pengumpulan data juga dilakukan kepada sumber data yang sama, namun menggunakan dua teknik, misalnya untuk mendapatkan data hubungan atasan dan bawahan menggunakan teknik wawancara dan pengamatan.

3.2.4. Teknik dan analisis data

Untuk menggali makna corak birokrasi kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota dilakukan dengan asumsi kenyataan empirik (birokrasi

kepolisian) merupakan sesuatu yang didasarkan atas motivasi individu dan tindakannya yang penuh dengan makna. Dalam konteks birokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang menunjuk kepada sejumlah pejabat sebagai individu. Jadi individu dengan berbagai tindakan-tindakannya merupakan sebuah kenyataan yang harus diberikan makna (*meaning*). Sejumlah pejabat yang melakukan tindakan dalam sebuah model birokrasi dalam membangun dan mengoperasionalkan hubungan, mengambil keputusan dan perintah-perintah sebagai pejabat manajerial di tingkat Polres. Peneliti, sebagaimana halnya individu, tidak akan puas dengan penjelasan yang berkenaan dengan sebutan kolektif, karena kolektifitas hanyalah model abstrak yang didesain untuk menafsirkan fakta-fakta mengenai pengalaman individual. Dengan demikian, studi empirik yang dilakukan berupaya untuk memahami motivasi individual yang menentukan tindakannya dalam corak birokrasi kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota.

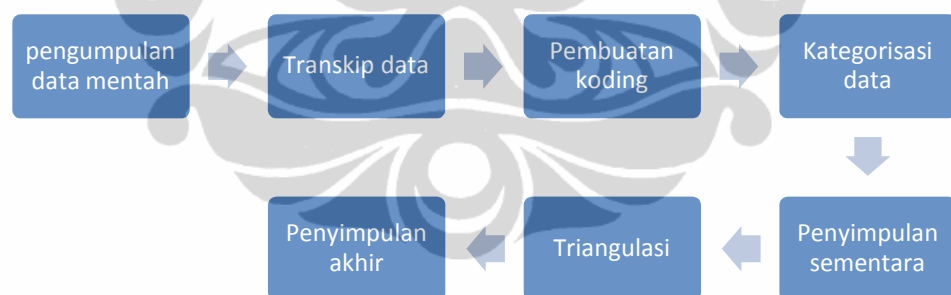
Hasil wawancara mendalam dan observasi di uraikan dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu bagian deskriptif dan bagian reflektif. Bagian deskriptif merupakan catatan lengkap dan obyektif dari semua peristiwa yang dilihat, didengar dan diamati sedangkan bagian reflektif merupakan catatan yang berisi renungan refleksif atas peristiwa dan pengalaman di lapangan dan dikaitkan dengan sikap objektif peneliti atas ide, penjelasan, prasangka, dan sebagainya.

Untuk memotret realitas corak birokrasi kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota melalui proses penyelenggaraan manajerial yang meliputi penyelenggaraan fungsi-fungsi organik manajemen, kepemimpinan dan pengambilan keputusan dan hubungan tata cara kerja, serta pengaruh dari corak masyarakat dan kebudayaannya, maka analisis data dilakukan dengan tahapan :

- a. Pengumpulan data mentah melalui wawancara, pengamatan dan kajian terhadap dokumen.
- b. Transkrip data yaitu proses mendeskripsikan data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan.

- c. Pembuatan koding adalah proses membaca ulang seluruh data dan memilah hal-hal penting dan relevan untuk diberi tanda (koding)
- d. Kategorisasi data, yaitu proses penyederhanaan data dengan mengikat konsep-konsep kunci dalam kategori.
- e. Penyimpulan sementara adalah proses pengambilan kesimpulan secara sementara.
- f. Triangulasi adalah proses *check and recheck* melalui triangulasi teknik dan sumber data. Triangulasi teknik dilakukan dengan menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dari wawancara, obsevasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda, dalam hal ini sumber adalah pimpinan atau pejabat manajerial seperti Wakapolres, Kabag, Kasat fungsi dan Kapolsek yang kemudian dilakukan penggalian data yang sama kepada sumber dari rekan sejawat dan anggota bawahannya.
- g. Penyimpulan akhir adalah proses pengambilan kesimpulan akhir penelitian. (Irawan, 2006).

Bagan 1 : Tahap analisis data penelitian



3.2.5. Pengujian dan kredibilitas data.

Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara pengulangan pengamatan dan wawancara, meningkatkan kecermatan, triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat dan *member check* (Sugiyono, 2007):

- a. Pengulangan pengamatan dan wawancara

Pengulangan pengamatan dalam waktu yang tidak periodik diharapkan mendapatkan data kredibel, terutama setelah peneliti tidak

menjadi Kapolres, pengamatan menjadi lebih bebas. Pengulangan pengamatan untuk meyakinkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara menjadi lebih meyakinkan. Misalnya melakukan pengulangan pengamatan dalam kegiatan masyarakat pedesaan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan menggunakan kebudayaan seperti pengaturan sengketa pembagian air, perkelahan, dan pencurian kedalam pondok pesantren, kegiatan pengamanan konser musik dan lain sebagainya.

b. Meningkatkan kecermatan.

Pengujian kredibilitas dengan meningkatkan kecermatan dilakukan dengan cara peneliti membaca kembali seluruh data dan catatan hasil penelitian secara cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Demikian juga dengan meningkatkan kecermatan, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Meningkatkan kecermatan juga harus didukung dengan memperkaya pengetahuan atas konsep-konsep dan teori serta hasil penelitian yang telah ada sebelumnya.

c. Triangulasi.

Proses triangulasi selain digunakan dalam teknik dan analisis data, juga berlaku dan digunakan peneliti untuk melakukan pengujian kredibilitas data yang diperoleh. Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti meliputi triangulasi teknik dan triangulasi sumber pengumpulan data.

d. Diskusikan dengan teman sejawat.

Diskusi dengan teman sejawat juga dilakukan sebagai salah satu cara menguji keakuratan data melalui diskusi dengan mahasiswa dan alumni. Melalui diskusi ini banyak pertanyaan dan saran.

e. *Member check*.

Pengujian dengan kredibilitas data juga dilakukan dengan member check, yaitu dengan cara mendiskusikan hasil penelitian kepada sumber-sumber data yang telah memberikan data, misalnya melakukan diskusi satu masalah dengan para Wakapolres, Kapolsek atau anggota pelaksana.

BAB IV

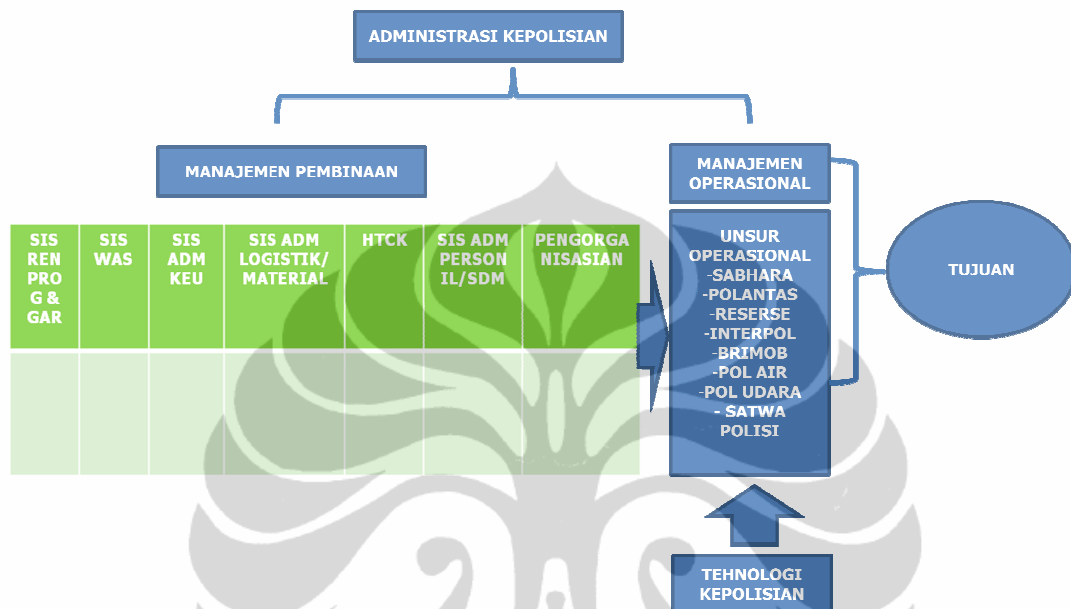
ANALISIS HASIL PENELITIAN

Analisis terhadap administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota saat ini diharapkan dapat memberikan perubahan-perubahan terhadap administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota pada waktu yang akan datang, yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut mengacu pada pendapat Ennis (1974) dan Richardson (1970) yang mengatakan bahwa corak dari fungsi-fungsi polisi bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya tergantung kepada corak masyarakat dan corak kerawanan yang menjadi ciri-ciri masing-masing. Dengan demikian administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota tentu akan berbeda dengan administrasi kepolisian di Polres lain. Menurut Prof. Parsudi Suparlan "perbedaan corak dari fungsi-fungsi polisi juga di pengaruhi pada perubahan berbagai bentuk perubahan sosial dan budaya yang di alami masyarakat Indonesia pada umumnya (kota Tangerang khususnya) sebagai dampak dari program-program pembangunan, proses-proses reformasi, globalisasi dan informasi terbuka, saya melihat bahwa keberadaan dan fungsi polisi adalah hasil tanggapan dari masyarakat yang bersangkutan dan untuk kepentingan tersebut" (Suparlan, 1997).

Prof. Awaloedin Djamin dalam bukunya "Sistem Administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia" menggunakan istilah administrasi kepolisian di artikan lebih luas dan mencakup manajemen operasional dan manajemen pembinaan. Lebih lanjut Prof. Awaloedin Djamin menjelaskan bahwa mempelajari sistem administrasi kepolisian suatu negara secara lengkap harus dipelajari sejarah negara tersebut, sistem ketatanegaraan dan tata pemerintahan (apakah Oriter atau Demokrasi), sejarah kepolisiannya, undang-undang yang melandasainya, juga mengenai geografi, demografi, keadaan sosial ekonomi dan sebagainya. Dengan demikian untuk mempelajari administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota maka penulis menganalisis berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan apa yang ada di kota Tangerang. Namun secara ringkas penulis

akan membahas sistem administrasi kepolisian mulai dari sejarah keberadaan kepolisian Polres Metro Tangerang Kota, manajemen operasional, manajemen pembinaan dan manajemen dukungan teknologi kepolisian.

Bagan 2: Administrasi Kepolisian



4.1. Gambaran umum kota Tangerang

4.1.1. Sejarah kota Tangerang

Nama Tangerang menurut sumber berita tidak tertulis berasal dari kata "Tangeran", kata "Tangeran" dalam bahasa Sunda memiliki arti "tanda". Tangerang di sini berupa tugu yang didirikan sebagai tanda batas wilayah kekuasaan Banten dan VOC, pada waktu itu. Tangerang tersebut berlokasi dibagian barat Sungai Cisadane (Kampung Grendeng atau tepatnya di ujung jalan Otto Iskandar Dinata sekarang). Tugu tersebut dibangun oleh Pangeran Soegiri, salah satu putra Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tugu tersebut tertulis prasasti dalam huruf Arab gundul dengan dialek Banten, yang isinya sebagai berikut :

*Bismillah peget Ingkang Gusti
Diningsun juput parenah kala Sabtu
Ping Gasal Sapar Tahun Wau*

*Rengsena Perang nelel Nangeran
Bungas wetan Cipamugas kilen Cidurian
Sakebeh Angraksa Sitingsung Parahyang-Titi*

Artinya terjemahan dalam bahasa Indonesia :

*Dengan nama Allah tetap Maha Kuasa
Dari kami mengambil kesempatan pada hari Sabtu
Tanggal 5 Sapar Tahun Wau
Sesudah perang kita memancangkan Tugu
Untuk mempertahankan batas Timur Cipamugas
(Cisadane) dan Barat yaitu Cidurian
Semua menjaga tanah kaum Parahyang*

Kemudian kata "Tangeran" berubah menjadi "Tangerang" disebabkan pengaruh ucapan dan dialek dari tentara kompeni yang berasal dari Makasar. Orang-orang Makasar tidak mengenal huruf mati, akhirnya kata "Tangeran" berubah menjadi "Tangerang". Menurut kajian buku "Sejarah Kabupaten Tangerang" yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang bekerjasama dengan LPPM UNIS Tangerang, daerah Tangerang sejak dulu telah mengenal pemerintahan. Cerita pemerintahan ini telah berkembang di masyarakat. Cerita itu berawal dari tiga maulana yang diangkat oleh penguasa Banten pada waktu itu. Tiga Maulana kemudian mendirikan kota Tangerang itu adalah Yudhanegara, Wangsakara dan Santika. Pangkat ketiga Maulana tersebut adalah Aria. Pemerintahan kemaulanaan yang menjadi pusat perlawanan terhadap penjajah di Tigaraksa (artinya pemimpin), mendirikan benteng disepanjang tepi Sungai Cisadane. Kata "Benteng" ini kemudian menjadi sebutan kota Tangerang. Dalam pertempuran melawan VOC, maulana ini berturut-turut gugur satu persatu. Dengan gugurnya para maulana, maka berakhirlah pemerintahan kemaulanaan di Tangerang. Masyarakat menganggap pemerintahan kemaulanaan ini sebagai cikal bakal pemerintahan di Tangerang.

Berdasarkan perkembangannya Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang berbatasan dengan DKI Jakarta mempunyai beban cukup berat, karena sebagian penyangga Ibukota menjadikan beberapa kecamatan yang berbatasan langsung menjadi pusat segala kegiatan baik pemerintahan, ekonomi/perdagangan, politik, sosial budaya, demikian juga kecamatan lainnya yang mulai padat dengan berbagai jenis industri dan permukiman penduduk.

Dengan sangat pesatnya perkembangan diwilayah tertentu maka pemerintah memandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan secara khusus, maka pada tanggal 28 Februari 1981 keluar Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang, dengan demikian Kecamatan Tangerang, Kecamatan Batuceper, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Neglasari, Kecamatan Benda, Kecamatan Karawaci, dan Kecamatan Jatiuwung masuk kedalam wilayah Kota Administratif Tangerang.

Dalam perjalanan kurang waktu 12 tahun Kota Administratif Tangerang menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan cukup besar segala bidang, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan maupun tugas pembantuan. Perkembangan ini di tandai dengan berkembangnya antara lain unit-unit usaha dan perdagangan termasuk pertumbuhan jumlah penduduk yang mencapai 1.700.334 Jiwa, dengan laju pertumbuhan mencapai 1,17% atau mengalami kenaikan 19.703 jiwa dari tahun sebelumnya (data Pemkot Tangerang, 2011) yang diakibatkan derasnya arus migrasi serta berpengaruh bagi kehidupan politik, budaya, dan perekonomian masyarakat.

Perkembangan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 4 Tahun 1985 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota yang peruntukannya sebagai daerah

industri, perumahan, perdagangan, dan jasa dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional.

Melihat situasi dan kondisi maupun potensi yang terus berkembang dengan berpedoman Kepala Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor : 31 Tahun 1990 tentang Pola Induk Pengembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam jangka panjang (25-30 tahun) maka setelah ditindak lanjuti dengan surat usulan maupun surat keputusan lainnya maka program kerja Walikota Administratif Drs. H Djakaria Macmud dibantu oleh tim perumus terdiri Drs. H. ES. Eddy Noor, Drs. H. A. Rachmat Hadi, Sdr. Drs. H. Harry Mulya Zein dan Sdr. Drs. Soewadjono, BE menuntaskan rencana pembentukan Kotamadya.

Dengan tekad dan semangat yang kuat serta dukungan aspirasi masyarakat maupun pejabat yang diiringi dengan ridha dan rahmat Allah SWT dan melalui proses perjalanan yang cukup panjang pada akhirnya Kota Administratif terwujud menjadi daerah otonom dan mengatur rumah tangganya sendiri, dituntaskan dalam kurun waktu 2 tahun 11 bulan 22 hari sedangkan proses pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang secara keseluruhan berlangsung selama 5 tahun 8 bulan 27 hari, yaitu sejak tanggal 1 Juni 1987 sampai 28 Februari 1993.

Sejak periode tahun 2003-sekarang H. Wahidin Halim telah menjadi Walikota Tangerang selama 2 periode. Pada masa ini kota Tangerang mengalami berbagai perkembangan dan pembangunan yang sangat pesat diantaranya pembangunan bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang infrastruktur. Sehingga tidak mengherankan jika pemerintah pusat menganugerahkan prestasi sebagai daerah berprestasi tingkat nasional berdasarkan kinerja keuangan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Jadi sebagai sebuah kota yang otonom mengatur dirinya sendiri usia kotamadya Tangerang relatif masih baru 8 tahun namun

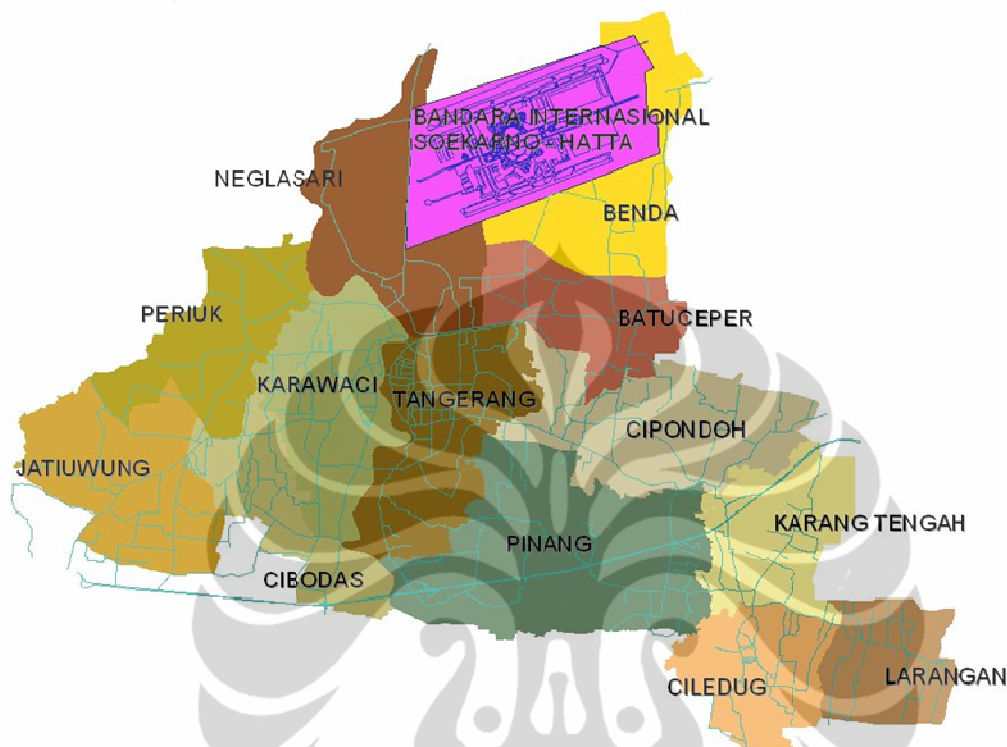
perkembangan pembangunannya sangat pesat diberbagai sektor kehidupan masyarakat, sebagai ciri kota yang sedang menuju sebagai kota besar (metropolitan) selalu ditandai dengan makin meningkatnya masalah sosial, dan jika diabaikan akan muncul banyak ruang-ruang negative dalam kota (*urban black spot*) yang akhirnya memicu terjadinya kegiatan illegal dan meningkatkan angka kriminalitas. Ujung-ujungnya berakibat seluruh warga kota yang terbebani dan kota tidak produktif lagi (Herlambang,2006).

4.1.2. Letak dan luas wilayah kota Tangerang

Letak Kota Tangerang secara geografis terletak pada posisi $106^{\circ} 42'$ Bujur Timur (BT) dan $6^{\circ} 6' - 6^{\circ}$ Lintang Selatan (LS), letak tersebut sangat strategis karena berada di antara Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang, sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang pengembangan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga ibukota negara. Secara administratif, luas kota Tangerang sekitar 18.378 Ha (termasuk Kawasan Bandara International Soekarno Hatta 1.969 Ha), merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 30 m dpl. Kota Tangerang memiliki aksesibilitas dan konektifitas secara nasional dan internasional yang baik. Kota Tangerang memiliki akses yang sangat bagus ke Bandara International Soekarno Hatta and Pelabuhan International Tanjung Priok.

Peta 1. PETA WILAYAH ADMINISTRASI KOTA TANGERANG

13 (tiga belas) Kecamatan, 104 (seratus empat) Kelurahan



(Sumber : www.tangerangkota.go.id)

Dengan posisi yang strategis sebagai pintu gerbang Indonesia dan sebagai daerah penyangga ibu kota, maka kota Tangerang akan menjadi lokasi strategis bagi persembunyian atau daerah persiapan bagi para pelaku kejahatan yang akan mengganggu situasi keamanan di Jakarta dan sekitarnya.

4.1.3. Visi, misi dan kebijakan Pemerintah kota Tangerang

4.1.3.1. Visi

Visi dari suatu daerah selalu mengalami proses yang panjang dan telaahan yang mendalam dari berbagai pihak terkait (*stakeholders*). Sedangkan visi itu sendiri merupakan suatu cara pandang ke masa depan yang mengilhami setiap tindakan secara emosional dan memotivasi secara positif untuk mencapai kondisi

yang diinginkan di masa mendatang. Pengembangan Kota Tangerang dengan melihat kondisi dan potensi-potensi yang ada maka diformulasikan visi Kota Tangerang periode 2009 – 2013 adalah :

“MEMBANGUN PERADABAN BARU DITENGAH KOTA INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN JASA, PEMUKIMAN DAN PENDIDIKAN YANG AHKLAKUL KHARIMAH”

Berdasarkan visi pembangunan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang pada 5 Tahun kedepan bercita-cita mewujudkan masyarakat yang maju, berbudaya, bermoral, dan beradab (masyarakat madaniyyah), dengan prioritas pembangunan pada industri, perdagangan dan jasa, pemukiman serta pendidikan.

4.1.3.2. Misi

Secara umum, misi kota Tangerang dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang harus dilaksanakan agar visi kota Tangerang dapat direalisasikan dengan baik. Bertolak dari rumusan visi kota Tangerang tahun 2009-2013 tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi kota Tangerang adalah :

- Mewujudkan dan menguatkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- Mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan publik.
- Mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

4.1.3.3. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah tahun 2009 – 2013, maka telah dirumuskan 6 (enam) tujuan pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut, yaitu :

- Menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
- Menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien
- Mendorong pertumbuhan sektor unggulan yang berbasis sumberdaya lokal
- Pengembangan pertanian sebagai sektor penyeimbang dalam perekonomian
- Perkembangan sektor perdagangan dan pariwisata

4.1.4 Aspek Ipoleksosbud dan Keamanan Kota Tangerang

4.1.4.1. Aspek ideologi dan politik

Masih adanya upaya – upaya yang mendeskreditkan pemerintah / pejabat terutama dari kelompok ekstrim kanan dan ekstrim kiri serta yang golongan tidak puas atau golongan frustrasi lainnya. Belum tertangani secara tuntas oleh pemerintah dalam menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa, menimbulkan hambatan dalam program pembangunan. Masih adanya perbedaan taraf hidup yang tajam dikalangan masyarakat merupakan potensi tumbuhnya rasa antipati terhadap pemerintah yang pada akhirnya dapat mengarah pada rentannya rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian pula belum konsistennya dan belum adanya kebijakan pemerintah yang masih dirasa belum berpihak pada kepentingan karyawan/buruh cenderung menimbulkan protes atas pemberlakuan Undang – Undang Ketenagakerjaan dalam berbagai bentuk unjuk rasa oleh para karyawan/buruh.

4.1.4.2. Aspek ekonomi

Industri merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian kota Tangerang. Namun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangannya semakin menurun sebagaimana tercermin dari menurunnya kontribusi industri dalam PDRB, yaitu tahun 2000 sebesar 54,28% menurun menjadi 51,18% pada tahun 2004, dan semakin menurun hingga menjadi 50% pada 2006-2007. Penurunan kontribusi tersebut berbading terbalik dengan peningkatan jumlah industri selama 5 tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2008 jumlah industri di kota Tangerang sebesar 1.619 unit, sedangkan pada tahun 2004 adalah 489 unit dengan laju pertumbuhan rata-ratanya sebesar 10% per tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa produktifitas industri di kota Tangerang semakin menurun meskipun jumlah industrinya meningkat.

Data jumlah industri di kota Tangerang 2006-2010

Jenis Industri	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
Skala Kecil	1.156	1.215	1.251	1.298	1.312
Skala Menengah	141	166	195	242	358
Skala Besar	166	219	275	338	386

Tabel. 1 Sumber : Perda Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2010

Akibat menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian di kota Tangerang adalah terjadinya transformasi struktural, dimana perekonomian kota mulai bergeser pada sektor sekunder-tersier. Hal ini tercermin dari terjadinya penurunan jumlah lahan pertanian di kota Tangerang sebesar \pm 500 Ha sejak tahun 2004 hingga 2008 , yakni dari sebesar 1.627 Ha pada tahun 2004 menjadi 1.101 Ha pada tahun 2008. Penurunan jumlah lahan

pertanian tersebut adalah sebagai akibat dari alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan industri serta sarana perdagangan.

Terkait dengan masalah ekonomi, jumlah pengangguran terbuka di kota Tangerang cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,2% per tahun, tahun 2007 , jumlah pengangguran terbuka sebesar 125.531 Jiwa, dengan jumlah pencari kerja sebesar 29.024 Jiwa. Jumlah pencari kerja ini cenderung stagnan dari tahun ke tahun, dengan rata – rata jumlah pencari kerja sebanyak 28.000 per tahun. Apabila dibandingkan antara jumlah kesempatan kerja dengan rata – rata kesempatan kerja yang ditawarkan per tahun sekitar 9.000 lowongan, maka terlihat ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia di kota Tangerang. Hal ini cukup mengindikasikan betapa sulitnya mencari pekerjaan di kota Tangerang, sebagaimana perbandingan berdasarkan mata pencaharian di bawah ini :

Pegawai negeri	:	6.166 (0,4%)
Swasta / karyawan	:	59.738 (4%)
Petani	:	10.247 (0,7%)
Industri	:	124.037 (8,5%)
TNI / Polri	:	2.465 (0,17%)
Pengangguran	:	1.269.924 (86,23%)

4.1.4.3. Aspek sosial budaya

Penduduk kota Tangerang pada tahun 2011 berjumlah 1.700.334 jiwa, dari jumlah tersebut perbandingan jumlah penduduk berdasarkan agama dan keyakinannya sebagai berikut :

Islam	: 1.078.101 Jiwa (85,1%)
Kristen	: 136.821 Jiwa (10,8%)
Budha	: 40.539 Jiwa (3,2%)
Hindu	: 10.134 Jiwa (0,8%)
Kepercayaan	: 1.267 Jiwa (0,2%)

Bagi pemeluk agama Islam di Tangerang ada kelompok Islam Ahmadiyah yang berjumlah sekitar 3.000 kepala keluarga tersebar pada 8 masjid di Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Cipondoh, mereka menjalankan ajaran Islam namun tidak sesuai dengan kaidah – kaidah agama Islam yang di anut oleh sebagian besar umat Islam pada umumnya. Keberadaan penganut Islam Ahmadiyah ini, merupakan penduduk asli di dua kecamatan tersebut, mereka sudah turun – temurun bertempat tinggal dan menjalankan keyakinannya secara damai.

Tangerang juga memiliki jumlah komunitas Tionghoa yang cukup signifikan, komunitas mereka biasa di sebut “**Cina Benteng**”. Mereka didatangkan sebagai buruh oleh kolonial Belanda pada abad ke 18 dan 19, dan kebanyakan dari mereka tetap berprofesi sebagai buruh dan petani. Budaya mereka berbeda dengan komunitas Tionghoa lainnya di Tangerang ketika hampir tidak satupun dari mereka yang berbicara dengan aksen Mandarin, mereka adalah pemeluk Taoisme yang kuat dan tetap menjaga tempat-tempat ibadah dan pusat-pusat komunitas mereka. Secara etnis, mereka tercampur dengan penduduk asli Tangerang, namun menyebut dirinya sebagai Tionghoa (Cina Benteng). Banyak makam Tionghoa yang berlokasi di Tangerang (tanah gocap, tanah cepe, dan rawa kucing), kawasan pecinan Tangerang berlokasi di Pasar Lama, Benteng Makassar, Kapling, Karawaci (bukan Lippo Village), dan sepanjang bantaran sungai Cisadane di

kampung Sewan, di tempat ini orang-orang dapat menemukan makanan dan barang-barang berciri khas China Benteng. Pada waktu – waktu tertentu atau hari besar keagamaan Tionghoa, masyarakat dapat menyaksikan atraksi budaya China seperti Barong Sai, Kirab Joly dan lomba perahu naga (*pekcun*) di sungai Cisadane.

4.1.4.4. Aspek kemanan

Dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sudah di uraikan di atas sangat terkait dengan situasi keamanan di kota Tangerang. Gambaran situasi keamanan kota Tangerang 3 tahun terakhir sebagai berikut :

Data kejadian kriminalitas di kota Tangerang

NO	JENIS PERISTIWA	TAHUN 2008		TAHUN 2009		TAHUN 2010	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	PEMBUNUHAN	5	3	5	3	2	3
2	ANIRAT	152	129	140	114	104	63
3	CURAT	389	213	391	217	239	110
4	CURAS	40	22	39	22	46	13
5	CURANMOR	470	121	467	121	319	22
6	CURI BIASA	110	60	29	29	13	12
7	PERJUDIAN	52	65	46	61	33	29
8	PEMERASAN	28	19	27	18	22	3
9	PERKOSAAN	19	8	16	10	2	4
10	PEMALSUAN	21	12	20	13	20	13
11	PENCULIKAN	2	1	2	1	2	0
12	ANIAYA RINGAN	50	36	47	35	20	17
13	CURI BIASA	110	60	114	59	58	34
14	PENGGELAPAN	160	74	172	96	155	69
15	PENIPUAN	247	85	305	112	244	71
16	PENGRUSAKAN	27	14	27	14	23	13

17	PENGGELAPAN JABATAN	23	23	25	26	43	23
18	PEMALSUAN SURAT	9	7	9	7	9	6
19	LINGKUNGAN HIDUP	4	0	3	0	0	0
20	SUMPAH & KET PALSU	5	2	5	2	4	2
	JUMLAH			1160	595	1358	269

Tabel. 2 Sumber : Bag Ops Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Dapat dilihat dari angka-angka data diatas maka karena angka pengangguran di kota Tangerang cukup tinggi , maka bentuk kejahatan yang berkaitan dengan mengambil hak milik orang lain secara melawan hukum (pencurian, penggelapan, penipuan) mempunyai prosentase tertinggi dari jumlah total bentuk kejahatan lainnya yakni 63% (untuk crime total tahun 2010).

Dengan posisi sebagai kota yang sangat strategis tersebut diatas, maka kejahatan dibidang narkotika dan obat-obat berbahaya juga marak terjadi. Hal ini bisa dilihat dari data kasus-kasus Narkoba di kota Tangerang tiga tahun terakhir sebagai

No	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah tersangka	Jumlah Barang bukti
1	2008	337 kasus	389 tersangka	67883.15 gram daun ganja + 4 pohon 12.3 gram heroin 18.84 gram sabu 987 butir pil lexotan 29 butir pil ectasy 1 tabung urine
2	2009	238 kasus	325 tersangka	49763.68 gram ganja 136.5 gram heroin 19.33 gram sabu 63 butir pil lexotan 1098 butir ectasy
3	2010	188 kasus	231 tersangka	76209 gram ganja 121.1 gram sabu 5.9 gram heroin

Tabel. 3 Sumber : Sat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Maraknya kasus narkoba selain didukung dengan kondisi wilayah yang sebagian besar terdapat industri, pergudangan dan pabrik dan lapangan pekerjaan yang sulit, maka mencari penghasilan dengan memproduksi atau menjual narkoba akan banyak diminati

masyarakat karena sangat menjanjikan selain bahan baku mudah didapatkan didalam negeri, proses produksinya tidak sulit, dan harga pemasarannya cukup tinggi. Oleh karena itu pemberantasan terhadap kejahatan narkoba cukup berat, tidak bisa oleh Polri sendiri tetapi perlu keterlibatan Pemda (BNK) dan seluruh elemen masyarakat.

Dengan makin bertambahnya jumlah penduduk di kota Tangerang baik karena faktor kelahiran maupun akibat urbanisasi, maka berdampak pada makin padatnya arus lalu lintas di jalan raya. Karena volume kendaraan tidak sesuai lagi dengan kondisi panjang jalan yang lambat pembangunannya maka kasus-kasus kecelakaan lalu lintas juga semakin meningkat dari tahun ketahun. Meskipun Polri telah berupaya mencegah terjadinya kecelakaan hal itu tidak dapat menghilangkan sama sekali terjadinya kecelakaan lalu lintas. Data kejadian kecelakaan lalu lintas di kota Tangerang selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Data kejadian kecelakaan lalu lintas di kota Tangerang

No	Tahun	Jml laka	Korban			Kerugian	
			MD	LB	LR	Benda	Materi / Rp
1	2006	348	66	267	276	575	916.650.000
2	2007	351	69	171	335	561	770.775.000
3	2008	411	52	113	500	704	1.078.940.000
4	2009	470	35	189	507	749	624.400.000
5	2010	524	61	231	518	853	899.823.000
6	2011 Jan s/d Mei	162	5	36	186	251	220.450.000

Tabel. 4 Sumber : Sat Lantas Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Dari data diatas dapat di analisis bahwa selama ini tugas-tugas polisi lalu lintas lebih memfokuskan pada tugas keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamtibcar lantas), akibatnya angka kematian manusia pengguna jalan raya cukup tinggi. Namun setelah Direktorat Lalu lintas mencangkan pentingnya program keselamatan “traffic safety” pada tahun 2006 angka kematian akibat

kecelakaan berangsur-angsur menurun. Diseluruh dunia memang mengakui bahwa traffic safety merupakan tugas yang penting bagi polisi lalu lintas, untuk itu Polri sekarang mempunyai semboyan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar lantas).

Salah satu penyebab timbulnya kecelakaan lalu lintas adalah faktor kesadaran hukum para pengemudi kendaraan yang masih mempunyai mental menerabas, dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada. Pelanggaran terhadap tata tertib berlalu lintas ini tetap tinggi meskipun Polri telah melakukan kegiatan rutin maupun operasi kepolisian “Patuh Jaya” atau “operasi Zebra” dan bahkan melakukan operasi “Simpatik”, namun hak itu belum mampu menurunkan jumlah angka pelanggaran, tanpa didukung dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Data jumlah pelanggaran lalu lintas di kota Tangerang 5 (lima) terakhir sebagai berikut:

Data pelanggaran lalu lintas di kota Tangerang

No	Tahun	Jumlah pelanggar lalu lintas	Keterangan
1	2006	63.079	Di tilang
2	2007	59.871	Di tilang
3	2008	63.244	Di tilang
4	2009	80.182	Di tilang
5	2010	72.175	Di tilang
6	2011	38.077	Jan s/d Mei

Tabel. 5 Sumber : Sat Lantas Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Sebagai kota industri maka kota Tangerang tidak terlepas dari persoalan unjuk rasa buruh yang secara rutin dilaksanakan tanggal 1 Mei (Mayday) yang dilaksanakan secara bersama-sama gabungan dari beberapa kelompok organisasi buruh yang ada, namun pada hari-hari biasa unjuk rasa buruh lebih sering terjadi dibandingkan dengan unjuk rasa lainnya biasanya menyangkut tuntutan normative kaum buruh . Umumnya aksi-aksi unjuk rasa di

kota Tangerang di picu dengan adanya kebijakan dari pemerintah atau pihak perusahaan yang kurang mengakomodir aspirasi masyarakat. Data kejadian unjuk rasa di kota Tangerang dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :

Data kasus unjuk rasa di kota Tangerang

Kelompok unras	2008	2009	2010	Isu
Karyawan perusahaan	109 kali	62 kali	105 kali	Hak buruh
Warga	16 kali	12 kali	17 kali	Hak hidup
Sopir angkot	6 kali	4 kali	8 kali	Trayek
LSM	16 kali	8 kali	14 kali	Kebijakan Pemkot
Pelajar / Mahasiswa	2 kali	11 kali	7 kali	Politik
Parpol	-	3 kali	1 kali	Politik
Wartawan	-	2 kali	1 kali	Hak pers
Jumlah	149 kali	102 kali	153 kali	

Tabel. 6 Sumber : Sat Intelkam Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Sebagai kota besar yang heterogen maka benturan-benturan budaya dan kepentingan antar suku bangsa atau komuniti sering terjadi, hal itu terjadi karena di dalam komuniti ada sejumlah tokoh yang saling bersaing dan berada dalam keadaan konflik untuk akumulasi kepemilikan sumber daya alam dan untuk posisi-posisi sosial kunci yang terbatas di dalam komunitas yang bersangkutan. (Suparlan,1998). Oleh karena itu kasus tawuran antar kelompok, maupun aksi kekerasan massa juga berpotensi terjadi di kota Tangerang. Sebagai contoh kasus-kasus konflik antar kelompok yang terjadi di Tangerang sebagai berikut :

Data kejadian tawuran / anarkis massa tahun 2010 s/d sekarang

No	Kasus	Keterangan
1	Tawuran supporter Persita/Persikota dengan warga di dalam kota Tangerang	Faktor Fanatisme , setiap jadwal pertandingan
2	Penggusuran pemukiman Cina Benteng di kampung Sewan bantaran sungai Cisadane	Penyerangan terhadap Sat Pol PP

Tabel. 7 Sumber : Sat Intelkam Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Sejalan dengan semakin menyempitnya lahan-lahan pertanian atau lahan terbuka sebagai resapan air di kota Tangerang yang banyak beralih fungsi menjadi pemukiman dan pertokoan dan mall, mengakibatkan bencana banjir semakin meningkat, hal ini terlihat dengan semakin luasnya lokasi, ketinggian air, dan lamanya genangan air. Pada tahun 2008 terdapat 62 lokasi banjir yang tersebar di 13 Kecamatan, bencana banjir tersebut di akibatkan makin berkurangnya daerah resapan air karena sudah menjadi pemukiman penduduk, hal itu di perburuk lagi dengan kondisi saluran drainase di kota Tangerang yang saat ini 52% saluran drainase sekunder dalam kondisi tidak layak atau buruk.

Permasalahan lain yang juga semakin meningkat kejadiannya adalah masalah kebakaran, data menunjukan tahun 2008 terjadi 163 kali kebakaran atau sekitar 14 kali kejadian setiap bulan dengan kerugian mencapai 38 milyar. Kebakaran banyak disebabkan karena faktor kelalaian warga untuk mengamankan sumber api atau listrik yang sering menjadi pemicu terjadinya kebakaran.

Data kebakaran di kota Tangerang tahun 2006-2010

No	Jenis Data	2006	2007	2008	2009	2010
1	Frekuensi kebakaran	136	116	206	128	163
2	Jumlah kerugian					
	Harta (dalam Jutaan)	11.564	11.264	11.600,3	33.057	38.522
	Orang (luka-luka)	-	2	2	-	-
	Orang (Meninggal)	-	4	4	2	-

Tabel. 8 Sumber : Dinas Kebakaran kota Tangerang, 2010

Untuk menjaga agar situasi kota Tangerang tetap dalam kondisi yang kondusif, maka keberadaan markas-markas kesatuan TNI dan Polri yang ada di wilayah kota Tangerang sangat penting. Berbagai gangguan keamanan yang muncul ditangani secara bersama-sama namun bila berkaitan dengan masalah hukum dan kriminalitas maka Polri di kedepankan, namun terhadap permasalahan sosial lainnya yang dapat mengganggu keamanan Polri selalu berkoordinasi dengan aparat teritorial / TNI AD yang ada, kesatuan-kesatuan yang berkontribusi mengamankan kota Tangerang antara lain :

- Polres Metro Tangerang Kota dan 8 Polsek jajarannya
- Batalyon 203 Arya Kemuning Jatake
- Kodim 0506 Tangerang
- Sub Detasemen Polisi Militer/ TNI Jatake

Bila ditinjau lagi awal sejarah terbentuknya kota Tangerang yang mula-mula dirintis atau dibangun oleh 3 (tiga) orang Maulana dari Banten , maka budaya Banten sangat besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat di kota Tangerang. Budaya masyarakat yang bernuansa religius (islam) tubuh dan berkembang

pada semua sisi kehidupan masyarakat Tangerang. Kondisi kehidupan itu semakin menguat dengan dibuatnya motto kota Tangerang " Kota yang berahlakul kharimah" yang mengandung maksud dan tujuan agar kehidupan masyarakat senantiasa mencerminkan ahlak yang baik atau berahlak mulia dalam kehidupan keseharian masyarakat. Bahkan untuk mencegah masuk dan berkembangnya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam seperti perbuatan minum-minuman keras dan pelacuran pemerintah kota Tangerang telah membuat Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2005 tentang larangan menjual minuman keras dan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2005 tentang larangan praktek pelacuran. Kedua peraturan daerah itu sangat mendapat dukungan masyarakat sehingga sangat efektif dalam memberantas penyakit masyarakat.

Bagi tugas-tugas kepolisian keberadaan kedua Perda tersebut dan ditunjang oleh kondisi masyarakat yang religius, sangat mendukung tugas-tugas kepolisian dalam pembinaan kamtibmas. Kondisi demikian harus di imbangi dengan perilaku anggota Polri yang tidak bertentangan dengan budaya setempat. Menurut Prof.Satjipto Rahardjo "sosok polisi yang ideal adalah polisi yang cocok dengan masyarakat"(Rahardjo, Diskusi panel Lembaga Penelitian dan Pengkajian penegakan hukum Indonesia,Semarang,2000). Maka petugas Polri yang bekerja di kota Tangerang seharusnya mereka yang berahlak baik, taat beribadah dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat kota Tangerang.

Perkembangan yang pesat di kota Tangerang menuju kota modern bila dilihat dari sisi keamanan mengandung potensi kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di masyarakat, dan sudah barang tentu akan menjadi tantangan tugas bagi Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Menurut Prof.Parsudi Suparlan bahwa " dalam masyarakat modern tugas

polisi adalah menjaga jangan sampai jalannya produksi yang mensejahterakan masyarakat tersebut terganggu atau terhenti karena adanya tindakan kejahatan atau kerusuhan sosial”.(Suparlan, 1999).

Sumber-sumber masalah sosial di kota Tangerang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain :

a. Masalah kependudukan, dengan semakin terbukanya akses jalan keluar masuk kota Tangerang dan meningkatnya kegiatan pembangunan mengundang semakin banyak terjadinya urbanisasi ke kota Tangerang. Jumlah penduduk kota Tangerang semakin meningkat baik karena faktor kelahiran maupun semakin bertambahnya kaum pendatang yang mencari pekerjaan di kota Tangerang. Kondisi demikian menimbulkan persoalan bagi pemerintah kota terutama masalah pemukiman, konflik sengketa lahan meningkat, maupun persoalan pengelolaan tata kota yang sering terhambat oleh kepentingan warga.

Tujuan kaum pendatang di kota Tangerang sebagian besar adalah mencari sumber kehidupan atau mencari lapangan pekerjaan, sedangkan data menunjukkan meskipun jumlah industri/perusahaan di kota Tangerang dari tahun 2006 – 2010 mengalami peningkatan , namun yang terjadi justru produktifitas mengalami penurunan akibat krisis ekonomi global maupun krisis ekonomi di dalam negeri. Kondisi ini menyebabkan penyerapan tenaga kerja menjadi kecil sehingga jumlah pengangguran di kota Tangerang semakin besar (86,23%) dengan pertumbuhan 1,2% pertahun. Saat ini jumlah pengangguran yang ada sebanyak 1.269.924 jiwa dari jumlah penduduk kota Tangerang 1.700.334 jiwa. Jika jumlah masyarakat yang menganggur dan tidak memiliki sumber penghasilan lebih besar dari yang bekerja, sedangkan kebutuhannya harus dipenuhi hal ini akan memicu seseorang untuk berbuat apa saja termasuk

melanggar hukum asalkan kebutuhannya terpenuhi terutama kebutuhan dasarnya.

Menurut teori Maslow bahwa "motivasi manusia sangat dipengaruhi oleh kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi." Selanjutnya menurut Maslow bahwa kebutuhan yang harus di penuhi mulai dari kebutuhan yang paling penting dahulu kemudian meningkat ke yang tidak terlalu penting. Ada 5 (lima) kebutuhan dasar menurut Maslow, disusun berdasarkan kebutuhan yang paling penting hingga yang tidak terlalu krusial sebagai berikut :

1. Kebutuhan fisiologis, contohnya adalah : sandang / pakaian, pangan / makanan, papan / rumah, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya.
2. Kebutuhan keamanan dan keselamatan, contoh seperti : bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan lain sebagainya.
3. Kebutuhan sosial, misalnya adalah : memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain.
4. Kebutuhan penghargaan, contoh : pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, dan banyak lagi lainnya.
5. Kebutuhan aktualisasi diri, adalah kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuai hati sesuai dengan bakat dan minatnya.

Jika kebutuhan dasar dari masyarakat kota Tangerang yang menjadi pengangguran itu tidak dapat dipenuhi maka dapat menjadi sumber gangguan kamtibmas antara lain : kriminalitas dengan kekerasan akan naik, konflik antar komunitas warga untuk mempertahankan kepentingannya akan sering terjadi, bahkan bisa menimbulkan kerusuhan massal jika orang-orang tersebut di provokasi atau dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan imbalan untuk melakukan kerusuhan.

b. Masalah sosial budaya, masyarakat kota Tangerang sangat heterogen berbagai suku bangsa dan budayanya ada di masyarakat

kota Tangerang. Keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada sangat berpotensi timbulnya benturan-benturan akibat kepentingan dari masing-masing kelompok. Masyarakat kota Tangerang sebagian besar 85,1% menganut agama Islam dan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kota Tangerang sesuai ajaran agama Islam. Oleh karena itu isue agama paling mudah dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memprofokasi massa melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas. Sejalan dengan era demokrasi kebebasan menyampaikan pendapat yang sedang melanda kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, tidak jarang kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh kelompok ormas tertentu melakukan aksi intimidasi dan kekerasan terhadap pihak lain dengan mengatas namakan agama.

Keberadaan komunitas "Cina Benteng" yang sebagian besar menguasai pusat-pusat perdagangan / ekonomi di kota Tangerang disamping ikut mendorong laju perputaran ekonomi kota, juga mengundang kerawanan sosial terutama konflik SARA. Hal ini bisa dimungkinkan terjadi akibat kecemburuan tingkat kesejahteraan penduduk asli yang rendah dengan kaum Cina Benteng di kota yang kaya. Potensi konflik ini dapat saja dipicu dengan memanfaatkan isue pengusuran pemukiman Cina Benteng di bantaran sungai Cisadane di kampung Sewan Neglasari. Pemukiman Cina Benteng di kampung Sewan dihuni oleh komunitas Cina Benteng kurang lebih sebanyak 2.500 kepala keluarga, yang rata-rata rendah taraf kehidupannya ekonominya (buruh/tani) dan sebagian besar penganut agama Taoisme atau Budha. Dalam beberapa kali upaya pemerintah kota melakukan pengusuran pemukiman itu mendapat perlawanan dari warga sehingga sampai saat ini belum dapat dilaksanakan seluruhnya. Dengan adanya isue-isue yang dihembuskan oleh oknum tertentu bahwa pengusuran itu ditujukan untuk menertibkan kandang-

kandang peternakan babi yang ada disepanjang tepi sungai Cisadane milik warga Cina Benteng yang mencemari sumber air minum warga kota Tangerang yang sebagian besar beragama muslim. Hal ini sangat sensitif menimbulkan konflik massa yang mengarah pada SARA.

Permasalahan sosial lainnya yang menonjol di kota Tangerang adalah keberadaan aliran Ahmaddiyah yang jumlahnya cukup banyak kurang lebih 3000 orang. Komunitas Ahmaddiyah ini merupakan komunitas penduduk asli khususnya yang bermukim di kecamatan Cileduk dan di Cipondoh Tangerang. Mereka memiliki 8 Masjid tempat mereka menjalankan ibadahnya sehari-hari, salah satu diantara masjid itu berada di dalam kota. Sebagaimana diketahui bahwa aliran Ahmaddiyah ini menimbulkan polemik di masyarakat luas yang menolak dan menuntut supaya aliran Ahmaddiyah ini di bubarkan dan dilarang kegiatannya di seluruh Indonesia karena dianggap kegiatannya menyimpang dari aqidah Islam yang di anut oleh sebagian besar umat muslim di Indonesia. Bahkan puncak dari tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk membubarkan aliran Ahmaddiyah dengan terjadinya peristiwa Cikuesik Banten pada tanggal 6 Februari 2011 yang lalu dan menimbulkan korban jiwa 3 orang dan harta benda, salah satu dari korban tersebut di makamkan di wilayah Cipondoh kota Tangerang.

Meskipun secara umum aksi-aksi penentangan aliran Ahmaddiyah yang terjadi di kota Tangerang relatif tidak ada, namun ancaman penentangan dari kelompok Islam lainnya justru datang dari luar kota Tangerang khususnya datang dari wilayah Jakarta mengingat wilayah kecamatan Ciledug dan Cipondoh berbatasan langsung dengan Jakarta. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi petugas kepolisian dan pemerintah kota Tangerang untuk terus memantau perkembangan yang terjadi di masyarakat

khususnya kegiatan dari komunitas Ahmaddiyah itu sendiri maupun upaya pencegahan dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap komunitas Ahmaddiyah yang ada di kota Tangerang.

c. Masalah keamanan, Berbagai kasus kejahatan yang terjadi lebih disebabkan karena banyaknya angka pengangguran dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan di kota Tangerang. Kasus-kasus pencurian pada dasarnya terjadi karena ada niat dan kesempatan, oleh karena itu peran masyarakat dan polisi untuk menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan sangat diperlukan.

Masih lemahnya peran pengamanan swakarsa untuk mengamankan diri dan lingkungannya, serta masih kurangnya pelaksanaan tugas polisi dalam bentuk patroli dan pembinaan terhadap masyarakat menyebabkan sistem keamanan lingkungan di masyarakat menjadi kendor. Menurut Prof.Parsudi Suparlan bahwa :”Fungsi utama dari polisi adalah mencegah terjadinya kejahatan, yaitu memelihara keteraturan dan ketertiban sosial agar kehidupan masyarakat ini beradaptasi”.(Suparlan,2003), oleh karena itu Kepolisian Metro Tangerang Kota dituntut untuk menjalankan fungsinya di masyarakat dengan mengajak dan melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam mencegah terjadinya kejahatan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesatnya juga telah merubah gaya hidup masyarakat kota Tangerang, gaya hidup masyarakat modern terlihat dengan makin meluasnya penggunaan sarana komunikasi telpon seluler dari anak-anak sampai orang tua. Akibat semakin mudahnya mengakses informasi melalui internet dari telpon seluler (handphone) masyarakat semakin mudah mendapatkan terpengaruh oleh informasi-informasi yang tidak sesuai dengan

norma dan budaya Tangerang, dampaknya kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan narkoba meluas di masyarakat, disamping kejahatan-kejahatan kekerasan lainnya yang pengungkapannya membutuhkan dukungan teknologi yang canggih. Persoalannya Polri khususnya di tingkat Polres belum memiliki perangkat teknologi yang dapat membantu mengungkap kasus-kasus yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.

4.2. Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota.

4.2.1 Sejarah Polres Metro Tangerang Kota

Sejarah Kepolisian di Tangerang tidak terlepas dari sejarah panjang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini dikarenakan bentuk Kepolisian di Indonesia berupa polisi nasional (*national police*). Didalam sebuah kelompok masyarakat senantiasa diperlukan fungsi kepolisian yang mempunyai tugas untuk menjaga keteraturan dan ketertiban dalam tata kehidupan warganya. Sebagaimana keberadaan Polres Metro Tangerang Kota di Kotamadya Tangerang yang masuk dalam administrasi pemerintahan propinsi Banten berfungsi menjaga keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di kota Tangerang.

Awalnya Polres Tangerang adalah sebuah kesatuan Polri yang memiliki 23 wilayah Polsek di Tangerang dengan Kapolres pertama Letkol Pol Drs. Moch Sapuan. Namun setelah terjadi pemekaran wilayah antara kabupaten dan kotamadya, maka Polres Tangerang dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah yakni Polres Metro Tangerang (kota) dan Polres Tangerang Kabupaten berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol: Kep/30/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 dengan Kapolres Metro Tangerang Kota yang pertama Kombes Pol Drs. Ketut Untung Yoga, SH, M.Hum. Sebanyak 17 Polsek masuk menjadi wilayah hukum Polres Kabupaten, yakni Polsek Balaraja, Mauk, Serpong, Curug, Teluk Naga, Tigaraksa, Kresek, Kronjo, Rajeg, Sepatan, Pasar Kemis, Cikupa, Legok, Cisoka, Pondok Aren, dan Paku Haji. Sedangkan 8 Polsek lainnya masuk wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota yakni; Polsek Tangerang kota (Benteng), Batu

ceper, Benda, Neglasari, Cipondoh, Ciledug, Jatiuwung dan Karawaci, dan satu Polsek lagi yaitu Polsek Bandara Soekarno – Hatta di tingkatkan statusnya menjadi Polres Bandara Soekarno – Hatta.

Selanjutnya dengan Keputusan Kapolri No.Pol: Kep/29/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008, status Polres Metro Tangerang di tingkatkan dari Polres tipe A2 menjadi Polres tipe A1K. Peningkatan status tersebut dengan pertimbangan untuk peningkatan organisasi satuan kewilayah Polri guna mempersiapkan kekuatan dan kemampuan internal kesatuan guna menghadapi hakekat ancaman dan perkembangan lingkungan strategis, dan guna optimalisasi hasil pelaksanaan tugas pokok Polri sesuai tuntutan dan harapan masyarakat.

Organisasi Polres Metro Tangerang kembali mengalami perubahan tipe berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/395/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dari tipe lama A1K menjadi tipe “Metropolitan”, dan nomenklatur penyebutannya pun diganti berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/397/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, dari Polres Metro Tangerang menjadi “Polres Metro Tangerang Kota”. Ini adalah landasan hukum yang paling terbaru sehubungan dengan perubahan-perubahan organisasi Polres yang ada di Tangerang kota. Dengan bentuk organisasi Polres yang baru ini diharapkan pelayanan kepolisian di Tangerang kota dapat menjawab harapan masyarakat sesuai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota berada di Kotamadya Tangerang yang masuk wilayah Propinsi Banten. Batas wilayahnya di utara dengan Kabupaten Tangerang, di timur dengan DKI Jakarta, di selatan dengan Kota Tangerang selatan, dan di barat dengan Kabupaten Tangerang. Terdapat 13 kecamatan, 102 kelurahan, 659 RW, dan 3.250 RT. Meskipun ada 13 kecamatan tetapi jumlah Polseknya hanya ada 8, artinya ada beberapa Polsek yang wilayahnya membawahi lebih dari satu Kecamatan yakni :

No	Polsek	Jumlah Kecamatan	Keterangan
----	--------	------------------	------------

1	Polsek Karawaci	2	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Karawaci • Kecamatan Priuk
2	Polsek Cipondoh	2	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Cipondoh • Kecamatan Pinang
3	Polsek Ciledug	3	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Ciledug • Kecamatan Karang Tengah • Kecamatan Larangan
4	Polsek Jatiuwung	2	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Jatiuwung • Kecamatan Cibodas
5	Polsek Tangerang/Benteng	1	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tangerang
6	Polsek Neglasari	1	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Neglasari
7	Polsek Batucapeper	1	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Batucapeper
8	Polsek Benda	1	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Benda

Tabel. 9 Sumber : Bag Ops Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Menurut lokasi keberadaan Polres Metro Tangerang Kota secara administrasi pemerintahan masuk pada Provinsi Banten namun secara organisasi kepolisian keberadaan Polres Metro Tangerang Kota bukan dibawah kendali Polda Banten melainkan dibawah kendali langsung Polda Metro Jaya. Pembagian wilayah kepolisian menurut Prof. Awaloedin Djamin berpendapat bahwa : "pembagian wilayah bagi Polda, Polres dan Polsek bila keadaan personil, dana dan pelengkapan telah memadai perlu di arahkan pada pembagian wilayah administrasi pemerintah di daerah, mengingat Polri harus bekerja sama yang erat di daerah dan aparat penegak hukum lainnya yang pada pokoknya mengikuti pembagian wilayah administratif pemerintah daerah." (Djamin, 1995)

Sejauh ini hubungan Polres Metro Tangerang Kota dengan pemerintah daerah baik Provinsi Banten maupun Walikota Tangerang serta dengan aparat penegak hukum lainnya telah berjalan dengan baik dan tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, justru yang terjadi dari sisi keamanan keberadaan Polres Metro Tangerang Kota secara langsung dapat menguntungkan 2 kedua wilayah baik jakarta maupun Banten/Tangerang yakni : ikut membantu mengamankan ibukota

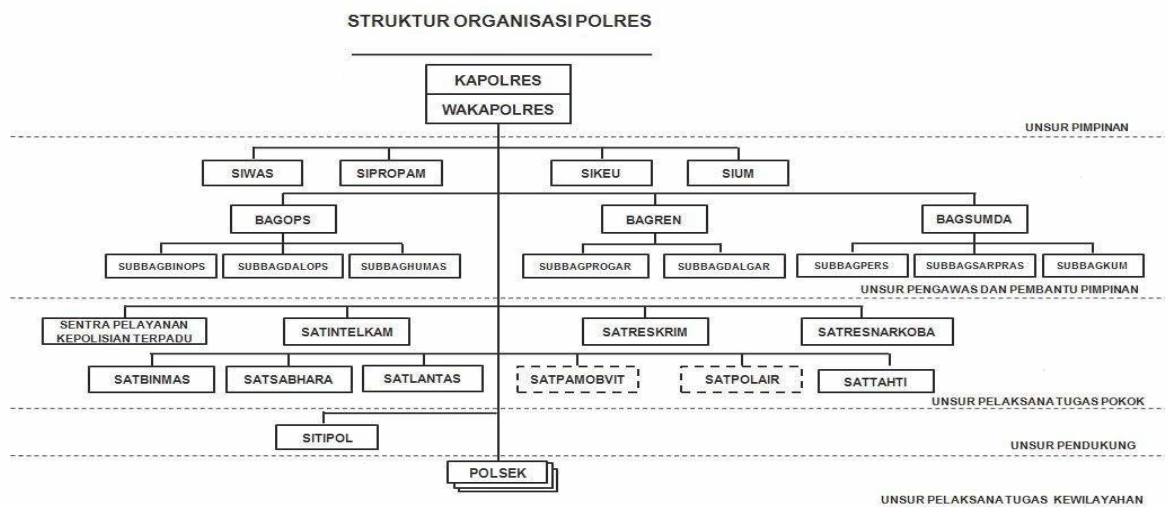
negara (Jakarta) dan sekaligus mengamankan wilayah kota Tangerang yang merupakan bagian dari Provinsi Banten.

Polsek-Polsek adalah sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas Polri di kewilayahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mengingat kerawanan dan luasnya wilayah di kota Tangerang maka terhadap Polsek-Polsek yang masih membawahi 2 wilayah kecamatan perlu secara bertahap segera dibentuk untuk mencakup semua kecamatan yang ada dengan perbandingan 1 Polsek membawahi 1 wilayah kecamatan. Polsek-Polsek yang perlu segera dibangun antara lain: Polsek untuk kecamatan Priuk (saat ini masuk Polsek Karawaci), Polsek untuk kecamatan Pinang (saat ini masuk Polsek Cipondoh), Polsek untuk kecamatan Karang Tengah dan kecamatan Larangan (saat ini masuk Polsek Ciledug), Polsek untuk kecamatan Cibodas (saat ini masuk Polsek Jatiuwung).

4.2.2. Struktur organisasi.

Kesatuan Polres Metro Tangerang Kota berada di bawah kendali Polda Metro Jaya berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Kep/23/IX/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Polri pada Tingkat kewilayahan, pada Lampiran "C" Polres struktur organisasi Polres Metro Tangerang Kota sebagai berikut :

Bagan 3. Struktur organisasi Polres Metro Tangerang Kota.



Struktur organisasi Polres disusun berdasarkan penjabaran tugas Polres kedalam fungsi-fungsi, yang disusun dalam bagian-bagian sebagai berikut.

a. Unsur pimpinan (*strategic apex*)

Unsur pimpinan terdiri dari seorang Kapolres yang berpangkat Komisararis Besar Polisi (KOMBES) dan seorang Wakapolres yang berpangkat Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP). Untuk Polres Metro jabatan Wakapolres diisi oleh pangkat Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP) yang sudah pernah menjabat sebagai Kapolres tipe B dan sudah mengikuti Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (SESPIM POL)

b. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf (*technostructure*).

Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf terdiri dari tiga jabatan Kepala Bagian (Kabag) yang diisi dengan seorang Perwira berpangkat Ajun Komisararis Besar Polisi yaitu Kabag Operasi (Kabag Ops), Kabag Perencanaan dan Anggaran (Kabag Ren) dan Kabag Sumber Daya (Kabag Sumda).

c. Unsur pelaksana utama (*operating core*)

Unsur pelaksana utama terdiri dari Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam), Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim), Kepala Satuan Narkoba (Kasat Narkoba), Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat (Kasat Binmas), Kepala Satuan Sabhara (Kasat Sabhara), dan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) yang diisi oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP).

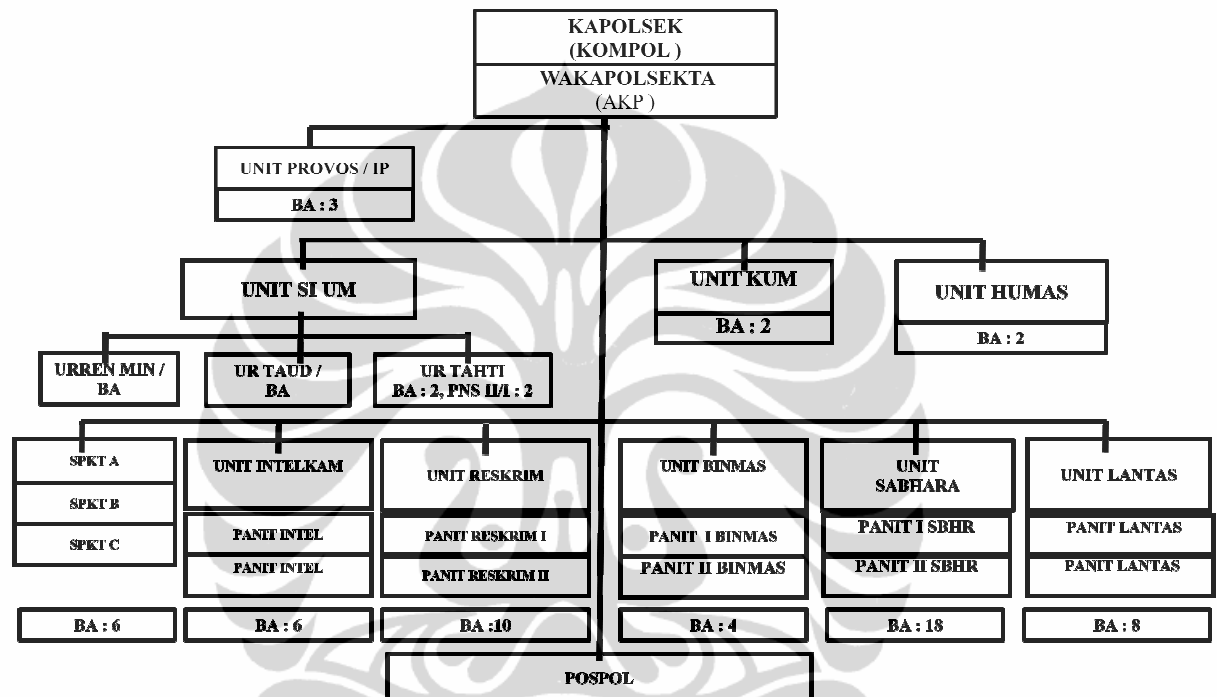
d. Unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Unsur pelaksana tugas kewilayahan di Polres Metro Tangerang Kota terdiri dari 8 Polsek dengan tipe *Urban* yang dipimpin oleh Kapolsek

dengan pangkat Komisaris Polisi (KOMPOL). Struktur organisasi Polsek Metro dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan. 4 Struktur organisasi Polsek Metropolitan

BERDASARKAN KEP. KAPOLRI NOMOR : KEP/366/VI/2010 TGL : 16 JUNI 2010



Dengan struktur organisasi yang baru ini organisasi Polres Metro Tangerang akan lebih meningkat lagi baik kuantitas maupun kualitas. Dari sisi kekuatan jumlah personil akan bertambah dan dari kualitas kemampuan para manajernya akan meningkat sejalan dengan job kepankangan baru bagi kabag dan Kasat berpangkat AKBP, sedangkan untuk para Kapolsek dijabat oleh personil yang berpangkat KOMPOL. Disamping itu organisasi yang baru telah menghidupkan kembali unit pembinaan masyarakat (Binmas) yang selama ini hilang diganti dengan sebutan Binamitra, dan bahkan di tingkat Polsek dihapuskan. Oleh karena itu struktur organisasi yang baru ini perlu di ikuti dengan penjabaran akan tugas dan kewenangan masing-masing fungsi, sehingga mudah dilaksanakan oleh unsur pelaksana di kewilayahan.

4.2.3. Personil

Dengan struktur organisasi sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Kep/23/IX/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Polri pada Tingkat kewilayahan, pada Lampiran "C", maka daftar susunan personil yang seharusnya mengawaki sebanyak 1620 personil (untuk Polres 900 personil dan Polsek 90 per Polsek). Kondisi riil jumlah personil Polres Metro Tangerang Kota saat ini sebanyak 1455 personil atau dengan kata lain masih kekurangan 165 personil untuk bisa memenuhi jumlah sesuai dengan DSP sebagaimana dimaksud dalam keputusan Kapolri tersebut diatas. Komposisi penempatan personil sesuai dengan kondisi riil saat ini sebagai berikut:

Data penempatan personil Polres Metro Tangerang Kota tahun 2011

No	Sat fung / Polsek	Pamen	Pama	Ba	Ta	Jml Polri	PNS	Jml Polri / PNS	Ket
1	KA / WAPOLRES	2	-	-	-	2	-	2	
2	BAG OPS	4	3	7	-	14	1	15	
3	BAG REN	3	1	2	-	6	1	7	
4	BAG SUMDA	4	7	20	-	31	13	44	
5	SI WAS	1	2	2	-	5	1	6	
6	SI PROPAM	1	2	24	-	27	-	27	
7	SI KEU	-	1	3	-	4	4	8	
8	SI UM	1	2	3	-	6	8	14	
9	SPKT	1	4	15	-	20	-	20	
10	SAT INTELKAM	1	7	49	-	57	1	58	
11	SAT RESKRIM	2	15	88	-	105	1	106	
12	SAT RES NARKOBA	2	4	24	-	30	1	31	
13	SAT BINMAS	5	4	10	-	19	1	20	
14	SAT SABHARA	2	5	192	-	199	3	202	
15	SAT LANTAS	-	6	164	-	170	9	179	
16	SAT TAHTI	1	1	3	-	5	1	6	
17	SI TIPOL	1	-	6	-	7	-	7	
18	PA / BAGUGAS	1	2	3	-	6	-	6	
	JUMLAH	32	66	615	0	713	45	758	

1	SEK TNG	1	4	71	-	76	2	78	
2	SEK BT.CEPPER	-	5	66	-	71	2	73	
3	SEK CILEDUG	1	5	108	-	114	4	118	
4	SEK JT UWUNG	1	6	98	-	105	5	110	
5	SEK CIPONDOH	1	3	100	-	104	3	107	
6	SEK BENDA	1	3	63	-	67	-	67	
7	SEK NEGLASARI	-	4	58	-	62	1	63	
8	SEK KARAWACI	1	3	74	-	78	3	81	
	JML POLSEK	8	33	638	0	677	20	697	
	JML POLRES	32	66	615	0	713	45	758	
	JML RES+SEK	40	99	1253	0	1390	65	1455	

Tabel. 10 Sumber : Bag Sunda Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Karena Polri bertanggung jawab untuk melindungi jiwa, harta benda dan hak-hak dari seluruh penduduk maka rasio jumlah anggota Polri dan jumlah penduduk harus dijadikan pedoman, untuk standar PBB rasio ideal perbandingan polisi dengan masyarakat adalah 1:400, sedangkan untuk kota Tangerang rasio perbandingan jumlah Polri dengan masyarakat saat ini 1:1200 jumlah itu masih jauh dari standar PBB. Tapi di Indonesia menganut sistem keamanan swakarsa dimana masyarakat ikut berpartisipasi mengamankan lingkungannya sendiri yaitu dengan mengadakan Satuan Pengamanan (Satpam) di lingkungan usaha atau industri dan pelaksanaan "Siskamling" bagi lingkungan pemukiman warga. Dengan berkembangnya sistem pengamanan swakarsa sebenarnya tidak perlu perbandingan Polri dan masyarakat seperti yang distandarkan oleh PBB atau yang sudah berkembang seperti di negara maju dengan perbandingan 1:400 meskipun demikian diharapkan secara bertahap dapat ditingkatkan karena di beberapa negara ada yang 1:250.

Sebagian besar anggota kepolisian bertugas sebagai polisi tugas umum (*general police duty*) yang di Polri dikenal sebagai Sabhara. Pada umumnya anggota polisi dididik sebagai polisi tugas umum dalam pendidikan pembentukan, dan setelah itu ditambah dengan kemampuan kejuruan seperti Polantas, Reserse, Intel dan lain-lain di pusat-pusat

pendidikan. Untuk anggota Polres Metro Tangerang setiap tahun secara bertahap mengikut sertakan personilnya mengikuti pendidikan kejuruan di pusat-pusat pendidikan Polri. Data personil berdasarkan kualitas kejuruannya akan di bahas pada uraian fungsi-fungsi operasional Polri.

Pada organisasi Polres Metro Tangerang komposisi kepangkatan personil lebih banyak pada kepangkatan Bintara, sehingga bentuk struktur kepangkatan menjadi menggelembung dibawah tidak proporsional. Prof. Awaloedin Djamin mengatakan bahwa : sebagai organisasi quasi militer, kepolisian dari dulu terdiri atas Tamtama, Bintara dan Perwira (zaman hindia Belanda Agent, Hoofdagent, Inspectur de Commissaris van Politie). Walaupun Undang-undang nomor 2 tahun 2002 menyatakan anggota Polri berpendidikan paling rendah SMA, tidak berarti pangkat Tamtama di hapus. (Djamin, 2010). Selanjutnya menurut Djamin, yang perlu diatur adalah pendidikannya misalkan untuk tingkat Tamtama persyaratannya tidak terlalu berat dan lama pendidikan enam bulan, untuk tingkat Bintara syarat lebih berat lama pendidikan satu tahun, sedangkan untuk perwira (Akpol) syarat lebih berat lagi dengan lama pendidikan tiga tahun.

Yang perlu disesuaikan setelah Polri pisah dengan TNI adalah jumlah pangkat Tamtama dan Bintara pada TNI. Peneliti sepakat dengan apa yang disarankan oleh Prof.Awaloedin Djamin agar jumlah pangkat Tamtama cukup dua dan pangkat Bintara cukup tiga. Pangkat perwira untuk Pama, Pamen dan Pati Polri tidak perlu diubah. Dengan demikian tujuh pangkat dapat dihilangkan tanpa mengurangi dan bahkan meningkatkan mutu anggota Polri dari Tamtama sampai dengan Perwira.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan organisasi Polres Metro Tangerang membagi personel Polres Metro Tangerang Kota dalam penugasan – penugasan sesuai fungsinya sebagai berikut:

a. Fungsi operasional

No	Fungsi operasional	Jumlah Polri	Jumlah PNS	Keterangan
1	Sat Intelkam	57	1	
2	Sat Reskrim	105	1	
3	SatNarkoba	30	1	
4	Sat Sabhara	199	3	
5	Sat Lantas	170	9	
6	Sat Binmas	19	1	
7	Jajaran Polsek	677	20	
	Jumlah	1257	36	88,8 %

Tabel. 11 Sumber : Bag Ops Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Karena keberhasilan Polri umumnya diukur dari keberhasilan pelaksanaan tugas pokok seperti diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan tujuan Polri, sehingga fungsi utama kepolisian adalah bersifat operasional. Oleh karena itu kekuatan personal sebagian besar (88,8%) ditempatkan pada bidang operasional.

Namun tidak ada manajemen operasional yang berhasil tanpa di dukung oleh manajemen pembinaan yang tepat dan sesuai, oleh karena itu sebagian kekuatan personal digunakan untuk mengisi struktur organisasi bidang pembinaan sebagai berikut :

Data personal yang bertugas pada fungsi pembinaan

No	Fungsi pembinaan	Jumlah Polri	Jumlah PNS	Keterangan
1	Kapolres/Wakapolres	2	-	
2	Bag Ops	34	1	
3	Bag Sumda	31	13	
4	Bag Ren	6	1	
5	Si Um	6	8	
6	Si Propam	27	-	
7	Si Was	5	1	
8	Si Keu	4	4	
9	Si Tipol	7	-	
10	Dokkes	1	1	
	Jumlah	121	29	11,2 %

Tabel. 12 Sumber : Bag Ops Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Susunan organisasi yang sudah tepat harus diisi oleh tenaga-tenaga yang tepat pula, baik jumlah, kualitas, tempat dan waktunya. Hal ini yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia yang mencakup nilai, sikap dan perilaku manusia. Struktur organisasi Polres Metro Tangerang Kota berdasarkan keputusan Kapolri Nomor Polisi : KEP/23/IX/2010 tanggal 30 September 2010 merupakan struktur organisasi yang dianggap tepat sesuai dengan tantangan yang dihadapi Polri saat ini sebagai Polres tipe Metropolitan (A1K). Struktur organisasi tersebut saat ini di Polres Metro Tangerang Kota secara bertahap telah diisi sesuai dengan personil-personil yang secara kualitas baik kemampuan maupun ketrampilan sudah dianggap layak oleh dewan kebijakan karier (Wanjak), meskipun jumlah personil masih kurang 162 personil dari daftar susunan personil (DSP) namun pelaksanaan tugas tetap dapat berjalan baik meskipun diharapkan secara bertahap kekurangan personil tersebut dapat di penuhi.

4.2.4. Fungsi – fungsi operasional.

4.2.4.1. Fungsi Sabhara

Tugas pokok Sabhara (*general duty police*) adalah pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli, atau dapat dikatakan pelaksanaan tugas polisi umum. Sebagai anggota Polri yang memiliki kemampuan mengetahui secara terbatas tugas-tugas polisi lalu lintas dan Reserse maka jika terjadi kemacetan lalu lintas maka anggota Sabhara dapat mengaturnya, demikian halnya bila terjadi TKP maka anggota Sabhara dapat mengamankannya sambil menunggu kedatangan anggota Reserse.

Tugas-tugas penjagaan anggota Sabhara di Mako Polres Metro Tangerang Kota dilaksanakan oleh 42 personel yang penugasannya dibagi menjadi 3 (tiga) regu dengan kekuatan 14 orang/regu. Tugas penjagaan ini dilaksanakan dengan pola setiap regu bertugas selama 12 jam sehari atau dengan kata lain tugas penjagaan dilaksanakan dengan sistem 2 shift

sehari. Jumlah anggota sudah cukup, hal ini tentu kurang tepat karena untuk produktifitas kerja adalah 8 jam sehari.

Mereka seharusnya bertugas 24 jam sehari, 7 hari seminggu dengan pembagian tugas terdiri dari 3 shift (*ploeg*), atau 3 x 8 jam sehari. Dengan kata lain mulai bertugas dari pukul 06.00 pagi sampai pukul 14.00, pukul 14.00 sampai pukul 22.00, dan dari pukul 22.00 sampai dengan pukul 06 pagi. Pembagian waktu ini sudah berlaku sejak zaman Hindia Belanda.

Tugas-tugas Sabhara (turjawali) dikenal sebagai *police patrol*, termasuk mengamankan TKP, pelayanan dan membantu masyarakat atau secara umum tugasnya adalah “*to protect and to serve*”. Dalam perkembangannya tugas Sabhara juga menyelesaikan pertikaian warga, membantu masyarakat yang meminta bantuan pengawalan dan sebagainya yang kemudian berkembang menjadi *community policing*.

Data pengawalan Polres Metro Tangerang Kota tahun 2010

No	Pemohon pengawalan	Barang yang dikawal	Ket
1	Bank	Uang	1883 kali
2	Lembaga Pemasyarakatan (LP)	Narapidana	6 kali
3	Kejaksaan	Terdakwa	240 kali
4	Dinas P & K	Soal – soal ujian nasional	1 kali
5	KPU kota Tangerang	Surat suara dan kotak suara	Pilkada Walikota tahun 2008

Tabel. 13 Sumber : Sat Sabhara Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Patroli dilaksanakan untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan agar tidak terjadi kejahatan. Kegiatan patroli Sabhara Polres Metro Tangerang Kota dilaksanakan oleh 54 personel yang terbagai menjadi 3 (tiga) regu patroli dengan menggunakan kendaraan roda 4 (mobil) dengan penugasan 12 jam/hari dalam setiap mobil ada 2 petugas sabhara (*two man patrol*). Patroli juga dilaksanakan dengan kendaraan roda 2 (dua)/ sepeda motor oleh unit “**Tangkal**” yang berjumlah 20 orang

dengan pola setiap sepeda motor dikendarai 2 orang (*two man patrol*). Pola patroli Sabhara yang dilaksanakan sebagai berikut :

No	Jenis patroli	Jumlah		Waktu kerja	Keterangan
		Personel	Tiap regu		
1	Patroli mobil	54	14 pers/regu	12 jam/hari	Two man patrol
2	Patroli spd motor	18	6 pers/regu	12 jam/hari	Two man patrol
3	Patroli bersepeda	-	-	-	Tidak dilaksanakan
4	Patroli jalan kaki	-	-	-	Tidak dilaksanakan

Tabel. 14 Sumber : Sat Sabhara Polres Metro Tangerang Kota, 2011

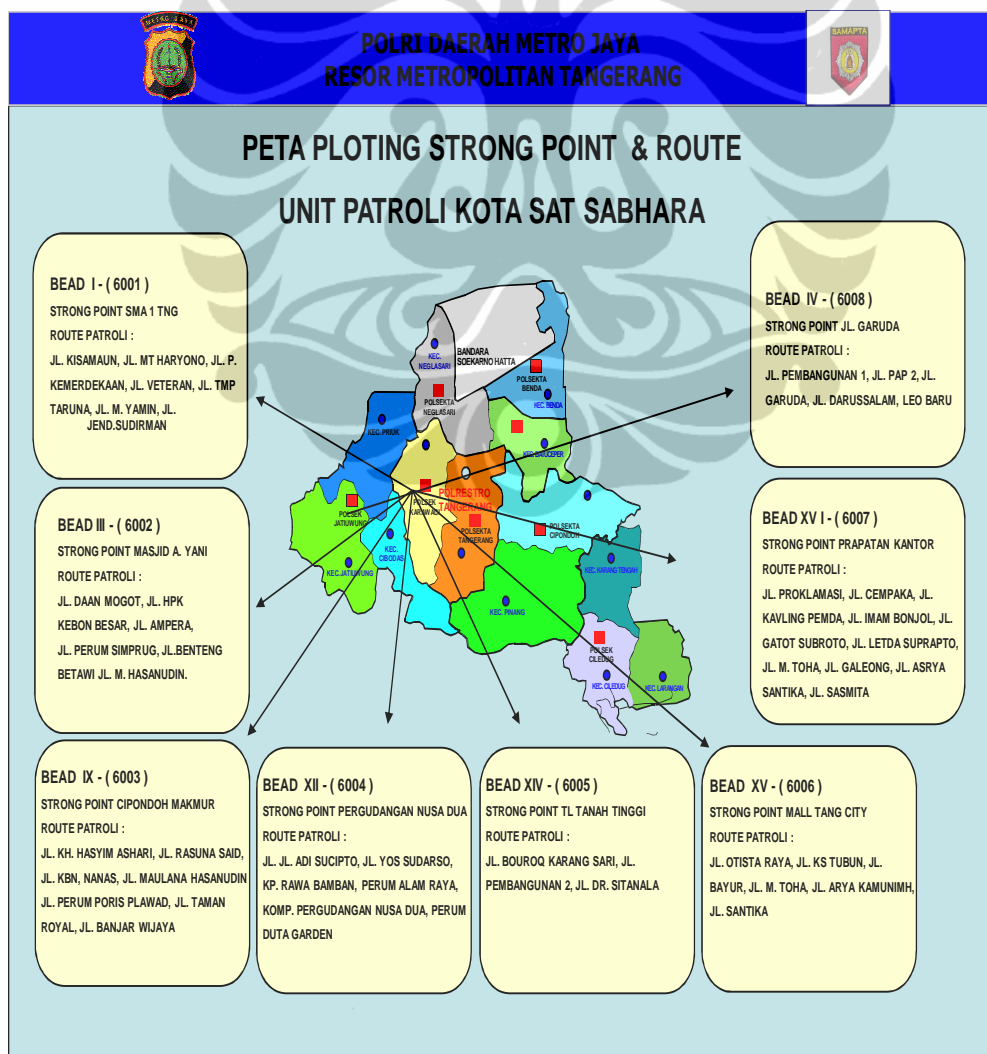
Bila dihadapkan dengan kondisi nyata di masyarakat seharusnya pelaksanaan patroli Sabhara lebih ditingkatkan, hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan kedekatan antara Polri dengan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan, untuk mencegah terjadinya kejahatan. Patroli Sabhara seharusnya bisa menyentuh tempat-tempat pemukiman warga, pusat-pusat pertokoan/mall termasuk di pasar-pasar tradisional dimana masyarakat banyak berkumpul dan melaksanakan aktifitas. Dengan kehadiran polisi ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman. Untuk itu pelaksanaan patroli dengan jalan kaki (*footpatrol*), patroli dengan bersepeda (*bicycle patrol*) harus tetap dilaksanakan disamping kegiatan patroli dengan bersepeda motor, atau dengan kendaraan roda empat. Karena tidak mungkin polisi akan berpatroli di pasar-pasar tradisional dengan cara bersepeda motor atau mobil. Di kota-kota besar dunia seperti New York kegiatan patroli polisi dengan berjalan kaki dan bersepeda mereka masih dilakukan, karena mereka menyadari bahwa kegiatan patroli tidak ada hubungannya dengan kemajuan jaman, tetapi lebih ditekankan bagaimana kehadiran dan kedekatan polisi di tengah masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan patroli Sabhara di Polres Metro Tangerang Kota hendaknya kembali mengaktifkan kegiatan patroli jalan kaki dan atau patroli bersepeda

khususnya untuk tempat-tempat yang padat dan hanya bisa dilalui dengan cara berjalan kaki atau bisa dilalui dengan bersepeda.

Pelaksanaan patroli dengan cara *one man patrol*, *two man patrol* atau lebih dalam kendaraan roda empat juga perlu di laksanakan kembali, mengingat saat ini sudah jarang patroli dilaksanakan patroli *one man patrol*. Babinkamtibmas yang ada di tiap-tiap kelurahan sebaiknya dijadikan Sabhara yang bertugas patroli sekaligus dalam rangka tugas *community policing*.

Pembagian wilayah patroli sesuai dengan beatnya masing – masing sebagaimana tergambar dibawah ini :

Peta. 2 Ploting wilayah patroli Sabhara Polres Metro Tangerang Kota



Terkait tugas tugas Sabhara maka harus ada buku-buku pedoman / petunjuk yang dapat dijadikan pedoman bagi anggota dilapangan. Buku-buku petunjuk fungsi teknis yang dimiliki satuan Sabhara Polres Metro Tangerang Kota selama 5 tahun terakhir sebanyak 14 buah dengan perincian sebagai berikut :

No	No. Juklak/Juknis	Tgl	Tentang	Ket
1	Skep Kapolri No.Pol : Skep/738/X/2005	13-10-2005	Pedoman sistem pengamanan obyek vital nasional	
2	Skep Kapolri No.Pol : Skep/582/IX/2006 Skep Kapolri No.Pol : Skep/584/IX/2006	28-09-2006	Sebutan, penggunaan baret sebagai tutup kepala pada pakaian dinas Samapta Polri Sebutan, penggunaan pakaian dinas seragam Samapta Polri yang bersifat khusus	Satu buku
3	Perkap No.Pol : 16 / 2006	5-12-2006	Pedoman pengendalian massa	
4	-	2007	Buku panduan Dalmas	Dari Dir Samapta PMJ
5	Perkap No: 9 / 2008	-	Tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum	
6	Pedoman pelaksanaan No.Pol : Domlak/03/I/2009	21-01-2009	<i>Police quick respon</i> PMJ	
7	Peraturan Kababinkam Polri No: 08 / 2009	31-12-2009	Pengaturan kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah	
8	Peraturan Kababinkam Polri No: 09 / 2009	31-12-2009	Penjagaan	
9	Peraturan Kababinkam Polri No: 10 / 2009	31-12-2009	Pengawalan	
10	Peraturan Kababinkam Polri No: 11 / 2009	31-12-2009	Patroli	
11	Peraturan Kababinkam Polri No: 12 / 2009	31-12-2009	Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP)	
12	Peraturan Kababinkam Polri No: 13 /2009	31-12-2009	Penanganan Tipiring	
13	-	2010	Himpunan peraturan Kapolri bidang operasional tahun 2008-2010	
14	Protap Kapolri No: Protap/I/X/2010	08-10-2010	Penanggulangan anarki	

Tabel. 15 Sumber : Sat Sabhara Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Dari data tersebut belum ada buku petunjuk yang mengatur tentang pembagian shift (*ploeg*) dalam tugas pejagaan, sehingga hampir seluruh kesatuan kewilayahan baik Polres maupun Polsek di Polres Metro Tangerang masih melaksanakan penjagaan dengan system 2 shift sehari atau 2x12 jam.

Kemampuan teknis fungsi Sabhara yang dimiliki anggota Sabhara di Polres Metro Tangerang Kota pada umumnya masih rendah, hal ini dapat dilihat dari data jumlah anggota yang pernah mengikuti pendidikan kejuruan (Dikjur) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Dikjur		
			Belum	Sudah	
1	Anggota Sabhara	199 personil	177 Personil	Serse	9
				Lantas	5
				Sabhara/perintis	3
				Sandi	1
				Tipiring	2
				Binmas	1
				Brimob	2
				Polmas	1
				Laka lantas	1
				TPTKP	1
				AWC	1

Tabel. 16 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Dengan kondisi masih banyaknya anggota Sabhara yang belum mengikuti pendidikan kejuruan, maka fungsi pembinaan perlu segera merencanakan untuk mempersiapkan anggota tersebut untuk ditingkatkan kemampuannya agar dipersiapkan mengisi unsur-unsur operasional lainnya seperti Reserse, Intel, dan Lalu lintas.

4.2.4.2. Fungsi Reserse

Tingkat kemampuan anggota Reserse Polres Metro Tangerang Kota dalam rangka tugas penyelidikan dan penyidikan dapat di lihat dari kualitas pendidikan yang pernah di ikuti.

Jumlah anggota	Dikjur		Keterangan
	Sudah	Belum	
105	54 Pers	51 Pers	51,4 % yang sudah mengikuti Dikjur

Tabel. 17 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Dengan gambaran tingkat kemampuan/kualitas anggota Reserse tersebut di atas maka produktifitas dalam penyelesaian perkara dalam kurun 5 tahun terakhir bisa di gambarkan sebagai berikut :

No	Tahun	CT	CC					Tunggakan	%
			Jml	SP-3	P.21	Limpah	Cabut		
1	2005	1966	779	22	757	0	0	1187	40%
2	2006	2118	808	0	808	0	0	1310	38%
3	2007	2509	967	5	962	0	0	1542	39%
4	2008	2835	1130	109	988	19	0	1705	40%
5	2009	2502	1350	22	514	55	759	1152	54%
6	2010	2307	1014	4	466	12	513	1293	44%
	JML	14237	6048	162	4495	86	1272	8189	42%

Tabel. 18 Sumber : Sat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Buku pedoman yang dimiliki oleh Sat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota hanya ada 2 (dua) buku yaitu “Pedoman penyidikan tindak pidana (Skep Kabareskrim No.Pol : SKEP/82/XII/2006/BARESKRIM)” dan “Pedoman penyelenggaraan administrasi penyidikan (Skep Kabareskrim No.Pol : SKEP/82/XII/2006/BARESKRIM)”. Sedangkan untuk pengawasan dalam rangka proses penyidikan perkara belum dilaksanakan sebagaimana mekanisme yang diatur Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini terlihat dengan belum adanya pejabat yang ditunjuk sebagai pengawasan penyidik.

KUHAP tidak mengenal istilah Polri sebagai penyidik tunggal, karenanya ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Istilah yang digunakan Menteri Kehakiman dalam Keputusan Menterti No. M-01.PW.07.03 tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP, Bab I bidang penyidikan adalah Penyidik utama. PPNS berada dibawah koordinasi

dan pengawasan serta petunjuk dan bantuan penyidik Polri (pasal 7 ayat (2) dan pasal 107). PPNS bila telah selesai melakukan penyidikan segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat (31)). Dalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi dan pengawasan (Korwas) PPNS yang sudah dilaksanakan oleh Sat Reserse Polres Metro Tangerang Kota adalah sebagai berikut :

No	Instansi	Jumlah PPNS	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	3 orang	Instansi Otonomi
2	Dinas Industri, perdagangan dan koperasi	2 orang	Instansi Otonomi
3	Dinas Lingkungan Hidup	4 orang	Instansi Otonomi
4	Kantor Imigrasi	1 orang	Instansi Otonomi
5	Disnaker	3 orang	Instansi Otonomi
6	Dinas Trantib	5 orang	Instansi Otonomi
7	Dinas Perhubungan	19 orang	Instansi Otonomi
	Jumlah	37 orang	

Tabel. 19 Sumber : Sat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Kegiatan koordinasi dengan PPNS tidak rutin, baru sebatas penanganan kasus-kasus yang terjadi sesuai dengan lingkup tugas instansi masing-masing, kegiatan dalam rangka pembinaan (pelatihan maupun rapat koordinasi) belum pernah dilakukan mengingat kesibukan masing-masing instansi.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka mendukung tugas-tugas kepolisian hanya sebatas melakukan penyidikan kejahatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup instansi/departemennya, dengan adanya Undang-undang otonomi daerah (Undang-undang nomor 32 tahun 2004) maka kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah yang ada di kota Tangerang bersifat otonom, oleh karena itu kewenangan penyidikan yang dilakukan PPNS di tingkat

daerah/kota perlu di tinjau kembali legalitasnya. Karena kewenangan penyidikan tidak termasuk dalam kewenangan yang di otonomikan maka sudah sepatutnya kewenangan PPNS untuk menyidik hanya ada di tingkat pusat atau departemen. Di kota Tangerang keberadaan PPNS hanya ada di 7 (tujuh) instansi pemerintah dengan jumlah sebanyak 37 orang. Sejauh ini pembinaan oleh Polri terhadap PPNS masih kurang dilakukan dan hanya sebatas koordinasi dalam penanganan kasus yang terjadi di lingkup instansinya.

Reserse kriminal atau *criminal investigation* atau sekarang lebih di kenal dengan *scientific criminal investigation* karena baik taktik maupun tehnologi yang digunakan oleh para pelaku kejahatan telah berkembang pesat sehingga pengungkapannya sangat memerlukan dukungan laboratorium forensik dan identifikasi forensik. Mengingat keberadaan laboratorium forensik dan identifikasi forensik untuk Polda Metro Jaya masih mengandalkan dari Mabes Polri sehingga birokrasi untuk permintaan bantuan dari Polres cukup panjang dan lama, akibatnya Polres Metro Tangerang Kota lambat dalam pengungkapan kasus-kasus yang memerlukan bantuan pengungkapan secara ilmiah.

Dalam rangka penyidikan kasus-kasus Narkoba Polres Metro Tangerang Kota memiliki satuan fungsi Reserse Narkoba dengan jumlah anggota sebagai berikut :

Data kualifikasi anggota Sat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota

Jumlah anggota		Dikjur		Keterangan
Polri : 30	PNS : 1	Sudah	Belum	
		18 Pers	12 Pers	

Tabel. 20 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Jumlah kasus yang ditangani oleh Sat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota tahun 2010 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Crime Total	188
2	Crime Clearance	163
3	Jenis Tindak Pidana	
	a. Narkotika	152
	b. Sabu	34
	c. Baya	0
	d. Lain – lain	0

Tabel. 21 Sumber : Sat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Dalam pengungkapan kasus-kasus Narkoba perlu adanya sinergitas dan *sharing* informasi antara Polres, Polda dan Mabes Polri agar pengungkapan kasus-kasus Narkoba dapat lebih maksimal. Perlunya peningkatan komitmen kepada seluruh penyidik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat mengingat banyaknya komplek dari masyarakat kepada Polri di bidang penyidikan disamping pemberdayaan Pengawas Penyidik. Dalam rangka pencegahan peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang di masyarakat kota Tangerang, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota bersinergi dengan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Tangerang

Masih besarnya tunggakan perkara dari tahun ke tahun selain karena belum didukungnya kegiatan penyidikan oleh teknologi yang baik di samping terbatasnya dukungan anggaran juga kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang, oleh karena itu diperlukan peningkatan anggaran maupun pelatihan bagi penyidik sesuai dengan kendala yang dihadapi dan pengadaan peralatan yang dapat mengungkap kasus dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Cara-cara pemeriksaan yang bersifat penyiksaan atau mengabaikan hak-hak tersangka harus dihindarkan, maka pemahaman tentang KUHAP bagi anggota Reserse harus terus di tingkatkan. Teknik pemeriksaan dan interogasi harus dilakuakn dengan "*within sight dan within hearing*" karenanya perlu peralatan sendiri seperti kaca tembus pandang, CCTV dan lain-lain. Tersangka wajib didampingi pengacara dan keluarga berhak mengetahui perkembangan penyidikan melalui surat pemberitahuan

perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), demikian hak –hak tersangka dan keluarganya wajib diperhatikan bila merasa proses penyidikan tidak adil.

4.2.4.3. Fungsi Intelkam

Intel sebagai mata dan telinga pimpinan melaksanakan kegiatan deteksi dini dalam rangka mencegah timbulnya suatu kejadian sejak awal. Pada Polres Metro Tangerang Kota kegiatan Intelijen dilaksanakan oleh anggota sebanyak 58 personil dengan data sebagai berikut :

NO	KESATUAN	JML PER S	DIKJUR INTEL					DIKJU R LAIN- LAIN	%
			BA DAS	BA LAN	PA DAS	PA LAN	PA SEN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Sat Intelkam Polres Metro Tangerang Kota								
	a. PAMEN	1	-	-	-	1	-	-	100%
	b. PAMA	8	-	-	2	-	-	6	25%
	c. BA	48	41	2	-	-	-	5	89.58%
	d. PNS	1	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	58	41	2	2	-	-	11	

Tabel. 22 Sumber : Sat Intelkam Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Untuk mendukung kegiatan deteksi dini di tingkat Polsek belum ada unit Intel yang beroperasi penuh, saat ini kegiatan deteksi dini di tingkat Polsek hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Bintara pengumpul data (Bapuldata).

Kewajiban bagi setiap anggota Polri membuat laporan informasi (LI) sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 01 tahun 1997, telah dilaksanakan dengan jumlah laporan informasi selama tahun 2010 datanya hanya sebanyak 2444 laporan informasi.

Data produk yang dibuat Sat Intelkam Polres Metro Tangerang Kota tahun
2010

No	Jenis Produk	Target	Riil
1	LHI (Laporan Harian Informasi)	365	365
2	KIRHAR (Perkiraan Harian)	365	365
3	LI (Laporan Informasi)	2400	2444
4	INFOSUS (Informasi Khusus)	120	96
5	LHK (Laporan Harian Khusus)	1800	1537
6	LA (Laporan Atensi)	6	3
7	LAPSUS (Laporan Khusus)	6	1
8	TELIN (Telaahan Intelijen)	6	0
9	KIR TAHUNAN (Perkiraan Tahunan)	1	1
10	TELMING (Telaahan Mingguan)	48	48
11	TELBUL (Telaahan Bulanan)	12	12
12	KIRSUS (Perkiraan Khusus)	6	13
13	KIRKAT (Perkiraan Singkat)	6	55
14	KIRPAT (Perkiraan Cepat)	6	9
15	LAPGAS (Laporan Penugasan)	240	194
16	INDAS (Intelijen Dasar)	1	1
	Jumlah	5388	5144

Tabel. 23 Sumber : Sat Intelkam Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Pelayanan Intelijen yang dilaksanakan di Polres Metro Tangerang Kota antara lain penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) namun kendala yang ada belum adanya pusat data yang terintegrasi antara Baintelkam Polri dengan Bareskrim Polri secara nasional yang bisa di akses oleh satuan kewilayahan untuk mengetahui masyarakat yang sudah mempunyai catatan kepolisian (pernah terlibat perkara pidana). Pemberian ijin keramaian/kegiatan masyarakat dilaksanakan dengan melakukan kordinasi dengan penyelenggara dan peninjauan lapangan sebagai bahan pemberian perijinan. Dalam kaitan penanganan unjuk rasa Sat Intelkam Polres Metro Tangerang Kota bertugas menerima surat pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa dan melakukan penggalangan agar kerawanan dapat ditekan seminimal mungkin.

Sejak dulu Polres wajib membuat Analisa Daerah Operasi (ADO) dengan mengumpulkan data yang *up to date* tentang keadaan dan perkembangan wilayah tugasnya, menganalisi data agar dapat memperkirakan kerawanan kejahatan apa yang mungkin terjadi pada tingkat Polres (*criminal intelligence*). Di sinilah pentingnya peran intelijen

kepolisian dan intelijen kriminal dikaitkan dengan fungsi utama Polri, yaitu represif, preventif, dan binmas (pre-emptif).

Intelijen kepolisian (istilah intelijen keamanan atau intelkam sebetulnya kurang sesuai) tentu dapat dikaitkan dan dikerjasamakan dengan BIN, Intel TNI, dan Intel Kejaksaan agar dapat mendeteksi secara dini ancaman keamanan dan pertahanan negara secara keseluruhan. Kerja sama sangat diperlukan dalam menghadapi ancaman terorisme.

Dalam kondisi masyarakat kota Tangerang saat ini peran satuan intelkam Polres Metro Tangerang sangat penting, khususnya bila penekanan tugas-tugas Polri mengedepankan pencegahan (preventif). Informasi yang cepat dan akurat sangat diperlukan pimpinan untuk segera mengambil langkah-langkah antisipatif. Kalau dari data yang ada saat ini di Polres Metro Tangerang Kota produk Laporan informasi masih sangat kecil, maka kedepan perlu di sosialisasikan lagi dan digiatkan kewajiban pembuatan laporan informasi bagi anggota Polri.

4.2.4.4. Fungsi Lantas

Dalam rangka menjaga keamanan ketertiban keselamatan dan kelancaran lalu lintas di kota Tangerang, dilaksanakan oleh satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota dengan kekuatan anggota seperti dalam data sebagai berikut :

Jumlah anggota		Dikjur/Lat		Keterangan
Polri : 170	PNS : 9	Sudah	Belum	45 % yang sudah mengikuti Dikjur
		93 Pers	77 Pers	

Tabel. 24 Sumber : Sat Lantas Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Bidang Dikmas Lantas (*Traffic Education and Information*) hampir tidak dilaksanakan karena dukungan anggaran dalam DIPA untuk kegiatan bimbingan masyarakat terpusat pada fungsi Binmas pada tahun 2010 kegiatan Dikmas Lantas hanya dilaksanakan 1 (satu) kali pada acara penyuluhan terpadu antara Sat Binmas, Sat Narkoba dan Sat Lantas.

Bidang *Traffic Engineering* Sat Lintas dilaksanakan bersama-sama pemerintah kota Tangerang (Dishub) mengingat peran Polri hanya sebatas memberikan masukan dan saran tentang pemeliharaan maupun pengadaan rambu-rambu, marka – marka jalan di dalam kota Tangerang. Untuk memantau situasi lalu lintas pada lokasi – lokasi tertentu yang rawan kemacetan dan kecelakaan Polres Metro Tangerang Kota telah membangun sarana pusat informasi lalu lintas (Quick Respon Center) melalui pemasangan kamera CCTV sebanyak 7 unit (Statis) dan 1 kamera CCTV (Mobile) dan untuk kecepatan informasi kepada masyarakat telah melakukan kerjasama dengan stasiun – stasiun radio yang ada di kota Tangerang untuk menyiarkan situasi lalu lintas yang aktual, informasi lalu lintas disampaikan juga melalui situs jejaring sosial Facebook dan Twitter. (Facebook : Quick Respon Center dan Twitter : QRCRESTROTNG)

Bidang *Traffic Law Enforcement* penegakan hukum dilaksanakan dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas (Laka Lintas) dan penindakan terhadap pelaku pelanggar lalu lintas (Tilang), untuk penyelesaian kasus kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia dilakukan proses penyidikan sampai tuntas di serahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) apabila posisi tersangka / sopir bersalah, sedangkan terhadap kasus – kasus kecelakaan yang hanya menimbulkan kerugian materi atau luka ringan pada umumnya masyarakat lebih senang diselesaikan secara diskresi kepolisian (musyawarah atau melalui ganti rugi / Perdata).

Data penyelesaian kasus Laka Lintas tahun 2009 s/d 2011 sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Laka	Selesai	
			Proses hukum	Diskresi kepolisian
1	2009	470	395	75
2	2010	524	419	105
3	2011 (Jan s/d Mei)	162	157	5

Tabel. 25 Sumber : Sat Lintas Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Penegakan hukum pada pelaku pelanggar lalu lintas dilakukan dengan mempedomani Skep Kapolri No. Pol : SKEP / 443 / IV / 1998 Tanggal 17 April 1998 “Tentang Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Blangko Tilang” dalam implementasinya belum adanya petunjuk khusus menyangkut pelaksanaan ketentuan penunjukan petugas khusus yang dapat menerima uang titipan denda pelanggaran, sehingga dilapangan sering menimbulkan kesalahpahaman masyarakat, seolah-olah petugas polisi lalu lintas melakukan pemerasan kepada pelanggar lalu lintas.

Bidang *Traffic Registration and Identification* pada Polres Metro Tangerang Kota dilaksanakan khususnya pada pelayanan permohonan pembuatan dan perpanjangan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dengan mempedomani Keputusan Menterti Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63 / KEP / M.PAN / 7 / 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Petunjuk Teknis Kapolri No.Pol : JUKNIS / 02 / I / 1994 tentang tata cara pelaksanaan ujian teori dan ujian praktek terhadap pemohon surat ijin mengemudi (SIM) kendaraan bermotor, dan Petunjuk Lapangan No.Pol : Juklap/210/VII/1993 tentang tata cara penyelenggaraan laporan dan informasi komputerisasi administrasi surat ijin mengemudi.

Polisi lalu lintas (Polantas) juga merupakan cermin bagi kepolisian, karena sehari-hari bersentuhan dengan masyarakat. Saat ini Polantas mempunyai semboyan Kamseltibcar (keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran) Lalu lintas, arti kata ”keselamatan” karena memang di seluruh dunia *Traffic safety* merupakan tugas yang penting dari Polantas. Mengingat pentingnya tugas fungsi lalu lintas dalam membangun kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk mematuhi peraturan tertib lalu lintas di wilayah kota Tangerang perlu peningkatan hal-hal sebagai berikut:

- Kegiatan *traffic education and information* perlu di tingkatkan anggaran sehingga kegiatan bimbingan masyarakat lebih optimal dilaksanakan, selama ini anggaran yang ada di pusatkan pada Satuan

Binmas sehingga dalam pelaksanaannya kurang fokus untuk kegiatan binmas lintas.

- Kegiatan *traffic engineering* perlunya meningkatkan kerjasama dan sinergitas antara Sat Lintas Polres Metro Tangerang Kota dengan Dinas Perhubungan (Dishub) kota Tangerang, mengingat dukungan anggaran untuk kegiatan tersebut pemerintah kota telah mengalokasinya dari APBD.
- Kegiatan *traffic law enforcement* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas telah dilaksanakan proses penyidikan sebagaimana proses dalam *criminal justice system* namun dalam beberapa kasus perlu adanya pengaturan yang lebih jelas terhadap proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan di luar pengadilan (*alternatif dispute resolution*) / ADR, mengingat mekanisme ini dalam prakteknya lebih dapat diterima dan memberikan rasa keadilan masyarakat. Terhadap pelanggar lalu lintas dilakukan penegakan hukum dengan mempedomani Skep Kapolri No. Pol : SKEP / 443 / IV / 1998 Tanggal 17 April 1998 “Tentang Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Blangko Tilang” dalam implementasinya belum adanya petunjuk khusus menyangkut pelaksanaan ketentuan penunjukan petugas khusus yang dapat menerima uang titipan denda pelanggaran, sehingga dilapangan sering menimbulkan kesalahpahaman masyarakat, seolah-olah petugas polisi lalu lintas melakukan pemerasan kepada pelanggar lalu lintas. Hal ini lebih disebabkan belum adanya petunjuk tentang siapa yang berwenang membuat surat keputusan penunjukan petugas khusus yang menerima titipan denda.
- Kegiatan *Traffic Registration and Identification* pada Polres Metro Tangerang Kota dilaksanakan khususnya pada pelayanan permohonan pembuatan dan perpanjangan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dengan mempedomani Keputusan Menterti Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63 / KEP / M.PAN / 7 / 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Petunjuk Teknis Kapolri No.Pol :

JUKNIS / 02 / I / 1994 tentang tata cara pelaksanaan ujian teori dan ujian praktek terhadap pemohon surat ijin mengemudi (SIM) kendaraan bermotor, dan Petunjuk Lapangan No.Pol : Juklap/210/VII/1993 tentang tata cara penyelenggaraan laporan dan informasi komputerisasi administrasi surat ijin mengemudi. Permasalahan yang terjadi masih terjadinya praktek-praktek korupsi atau pungutan diluar ketentuan yang berlaku menimbulkan penilaian masyarakat bahwa Polri belum mau mereformasi menuju pelayanan yang prima. Hal ini disebabkan belum adanya komitmen tentang pelayanan prima oleh anggota lalu lintas dan kurang berperannya fungsi pengawasan yang ada di Polres, disamping masih adanya mekanisme pengurusan yang antara pemohon dan petugas bertemu langsung, kedepan mekanisme itu harus dirubah dengan pemanfaatan teknologi, yang dapat mencegah bertemunya pemohon dengan petugas polisi.

4.2.4.5. Tugas dan wewenang operasional Polri yang tidak termasuk tugas unsur-unsur operasional.

Dalam pasal 14 (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 istilah “membina masyarakat” dari kata pembinaan masyarakat yang dulu dianggap fungsi utama Polri dan disingkat Binmas sempat dihapus. Istilah bimbingan masyarakat saat ini telah dikembalikan menjadi pembinaan masyarakat (BINMAS) dengan Perpres No. 52 Tahun 2010 yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa. Karena tugas dibidang penyidikan berada pada fungsi Reserse maka koordinasi, pengawasan dan pembinaan terknis terhadap PPNS diserahkan kepada fungsi Reserse sedangkan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Polsus dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa terutama satuan pengamanan (SATPAM) diserahkan kepada Direktorat Binmas.

Pada Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang struktur organisasi Polri tingkat Polres, keberadaan satuan bimbingan masyarakat (Binmas) telah diadakan kembali (dulu bernama Binamitra) dan dipimpin oleh Kasat Binmas dan di tingkat Polsek dipimpin oleh Kanit Binmas.

Data bentuk pengamanan swakarsa yang ada di Tangerang kota dan mendapat pembinaan teknis dari Polres Metro Tangerang Kota adalah sebagai berikut :

a. Satuan Pengamanan (SATPAM)

Satuan pengamanan (Satpam) adalah satuan atau kelompok petugas yang di bentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa dilingkungan kerjanya.

Data Satuan pengamanan (SATPAM) di kota Tangerang

No	Polsek	Kualifikasi Pendidikan			Belum dik	penempatan tugas					Jml
		Dasar	Diklan i	Diklan ii		Obvitnas	kwsn industri	pusat niaga	tempat wisata	Pemukiman	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cipondoh	95	-	-	198	1	11	-	1	4	293
2.	Batuceper	190	-	-	957	-	137	4	-	3	1.147
3.	Benda	54	-	-	193	-	15	-	1	4	247
4.	Ciledug	108	-	-	263	10	2	6	-	14	371
5.	Tangerang	173	-	-	145	15	7	-	-	2	318
6.	Karawaci	143	-	-	498	13	63	4	-	-	641
7.	Neglasari	29	-	-	39	-	4	1	-	-	68
8.	Jatiuwung	517	1	-	1.091	-	171	10	2	13	1.609
Jumlah		1.309	1	-	3.384	39	410	25	4	40	4.703

Tabel. 26 Sumber : Sat Binmas Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Dari sejumlah satuan pengamanan tersebut diatas masih banyak ditemukan ketidak seragaman khususnya dalam penggunaan seragam Satpam sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 27 tahun 2007. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap para badan usaha jasa pengamanan yang menyuplai tenaga

satuan pengamanan pada objek-objek di wilayah kota Tangerang. Sejauh ini peran Polres dalam ikut mengawasi kegiatan badan usaha jasa pengamanan khususnya bidang perijinan belum Nampak, mengingat belum ada aturan yang jelas mengenai kewenangan Polres dalam melakukan pengawasan terhadap badan usaha jasa pengamanan. Oleh karena itu penting penataan bidang pengawasan pemberian ijin operasional bidang usaha jasa pengamanan, seperti usaha konsultan, usaha dagang alat pengamanan, usaha angkutan uang, usaha pelatihan Satpam, usaha menyewakan tenaga Satpam dan sebagainya. Hal ini penting agar kesatuan seperti di Polres Metro Tangerang Kota dapat ikut berperan melakukan pengawasan.

Persoalan terkait keberadaan satuan pengamanan di perusahaan-perusahaan pengguna jasa Satpam biasanya menyangkut status Satpam dalam perusahaan. Dilihat dari status dalam pekerjaannya maka data keberadaan Satpam di perusahaan-perusahaan sebagai berikut :

No.	Polsek	Jumlah Satpam	Inhouse	Outsorching	Pendidikan Dasar		KTA		Jumlah BUJP	Keterangan
					Sudah	Belum	Sudah	Belum		
1.	Sekta Batuceper	479	20	9	323	156	428	51	26	Neglasari, Cipondoh Jatiuwung (Data nihil)
2.	Sekta Karawaci	644	56	6	300	344	523	121	62	
3.	Sekta Benda	204	13	2	62	142	164	40	15	
4.	Sekta Ciledug	611	41	5	279	332	407	204	46	
5.	Sekta Tangerang	758	29	6	548	210	556	202	33	
	Jumlah	2696	159	28	1.512	1.184	2.078	618	182	

Tabel. 27 Sumber : Sat Binmas Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin atau etika dalam pelaksanaan tugasnya sebaiknya para tenaga satuan pengamanan itu di tetapkan sebagai karyawan perusahaan, dengan demikian rasa ikut memiliki dan tanggung jawab dalam bekerja akan lebih baik dibanding bila berstatus sebagai tenaga outsorching.

Data badan usaha jasa pengamanan yang mempekerjakan satuan pengaman (Satpam) di kota Tangerang kebanyakan berada di Jakarta, sehingga menjadi kendala dalam berkoordinasi khususnya dalam pembinaan Satpam di wilayah Tangerang. Data badan usaha jasa pengamanan yang beroperasi di wilayah Tangerang sebagai berikut:

No	Nama BUJP	Alamat	Ijin Operasional	Jumlah satpam	Penugasan	Ket
1	TAG (Tunas Arta Ganda)	Jl. Putra Kalimantan Kav. 13 Jaksel	-	1000	BCA dan CWD Niaga	
2	PT. Garda Pratama	Jl Irian Jaya Condet Jaktim	-	130	PDAN	
3	PT. GBN	Jl Raya Daan Mogot Km. 196	-	348	-	
4	PT. Wira Sandi	Jl Kesehatan 16 Cijantung Jaktim	-	400	Giant dan Pom Bensin	
5	3 Matrix Mitra Sentosa	Perum kota mas Bandung	-	50	PT LKS	
6	Heri Arta Sedana	Jl Halim Perdana Kusuma no. 12 Jurumudi Tangerang	-	-	BPR	
7	PKSS	Jl Buncit Raya no. 75 Jaksel	-	60	BRI Syariah	
8	PT. PPU	Jl Sudirman Jakpus	-	50	BNI 46	
9	PT Garda Nasional Utama	Jl Fatmawati Jaksel	-	18	Bank Mandiri	
10	PT Bahata NSP	Jl Kuningan Barat Jaksel	-	40	BNI Daan Mogot	
11	PT Bhawata NSP	Jl Kuningan Barat Jaksel	-	15	BNI Tangerang	
12	PT. Bravo Humanika Perkasa	Rs. Fatmawati 71 Jaksel	-	500	PT Eagle Indo Pratama	
13	PT. Garda Cipta Pratama	Ruko Modern Kelapa 2 Tangerang	-	532	Pt Inter Warl Steel Mills Indonesia	
14	Tri Tunggal Bakti Arta	Jl Terusan Bahrudin 9 Kebon Jahe Tangerang	-	3000	PT. Indah Jaya	
15	Multi Perkasa	Kalibata Jaksel	-	20	PT Panca Prima Eka Brothers	
16	PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul	Jl Daan Mogot Km 12Jakbar	-	35	PT Trapindo Prima Perkasa	
17	Kesatria Wicaksana	Perum Griya Ciledug Sudimara Bintaro, Tangerang	-	-	Perumahan	
18	Jayamahe Semesta Security	Sentra Menteng Blok MN 885 Bintaro Jaya Tangerang	-	-	Perumahan	
19	JASPAMINDO	Jl Benda Barat no. 8 Pamulang Tangerang	-	-	Perumahan	
20	Bazcorp Citra Indonesia	Jl Rawa Buntu BSD City Tangerang	-	-	Perumahan	

21	Garda Benteng Satria Jaya	Jl Imam Bonjol No 35E Karawaci Tangerang	SI No.1440 /Opsnal/IV/2008 SI No. 1441/Diklat/IV/2008	-	Perumahan	
22	Lumbi Sejahtera	Jl HOS Cokroaminoto Kreo Larangan Tangerang	-	-	Perumahan	
23	Rajawali Arta Mandiri	Jl Raya Serpong Km.8 blok Sutra Niaga Tangerang	-	-	Perumahan	
24	Garda Bakti Nusantara	Jl. Daan Mogot Km 19.6 Blok f BA Tangerang	R/871/III/2008/Datro Maret 2008	-	Perumahan	
25	Garmapala	Jl Betet Raya Blok IIA Cibodas Sari Tangerang	-	-	Perumahan	
26	PDAM Tirta Kerta Raharja	Jl Kisamaun kota Tangerang	No.SI/3033/VII/2002 No.SI/3033/VII/2002	-	Perumahan	
27	PT Kurnia Adi Sentosa	Jl Daan Mogot Raya Km 19.8 Tanjung Duren Jakarta Barat	-	-	Perumahan	
28	PT Putratama Bhakti Satria	Jl Mampang Prapatan No. 96 Jakarta Selatan	-	-	Perumahan	
29	PT Nawakara Perkasa	Golden Plasa Blok C No 15 Fatmawati Jaksel	SI/1182/IV/2008 Mabes Polri	-	Perumahan	
30	PT Krisna Jaya Mandiri	Perum Taman Poris Gaga Batuceper Tangerang	Skep/1138/X/1999 Mabes Polri	-	Perumahan	
31	Ring Aman Sejati	Komplek Graha Sunter Agung Pratama Blok F No 12 A Jakut	-	-	Perumahan	
32	PT Rajawali Pamulang	Jl Pondok Benda I Tangerang	-	-	Perumahan	
33	Metro 911	Jl Penjernihan I Tanah Abang Jakpus	-	-	Perumahan	
34	PT Satria Buana Karya	Jl Petojo Jakpus	-	-	Perumahan	
35	PT Bravo Satria Perkasa	Jl Dewi Sartika No. 4 C Jaktim	-	-	Perumahan	
36	PT Cakra Yudah	Jl Daan Mogot Km 19.6 Poris Gaga Batuceper Tangerang	-	-	Perumahan	
37	PT Multi Bintang Indonesia	Jl Daan Mogot Km 19 Poris gaga Batuceper Tangerang	-	-	Perumahan	
38	PT Polari Limunusa Inti	Jl Daan Mogot Km 19 Poris Gaga Batuceper Tangerang	-	-	Perumahan	
39	PT Satsena Bravo Security	Komp Perkantoran Buncit Mas	SI/1440/III/2008	-	Perumahan	
40	PT Tegap Mitra Nusantara	Jl Raya Pasar Minggu No. 25 Jakarta	-	-	Perumahan	
41	Yayasan Anugerah Mitra Sejahtera Abadi	Jl Sirsak Blok C 5 Cikarang Utara Bekasi	-	-	Perumahan	
42	PT Securindo Garda Patria	Atrium Senen	No.Pol : 51/2B/I/2008	-	Perumahan	

Tabel. 28 Sumber : Sat Binmas Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Mengingat kendala dan hambatan yang terjadi lapangan maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007, khususnya perlu dipisahkan peraturan tentang Satpam sendiri dan peraturan tentang badan usaha di bidang jasa pengamanan sendiri. Sebab sasaran kebijakan publiknya tidak sama. Peraturan Kapolri tentang Satpam ini juga dengan pasal 15 (2)g yakni “memberi petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.

Mengenai istilah Kepolisian Khusus (POLSUS) di wilayah Tangerang di jumpai pada beberapa instansi antara lain :

Data Polsus yang ada di instansi pemerintah di wilayah kota Tangerang

NO.	LOKASI	JUMLAH	STATUS			DIKLAT		JUMLAH SENPI/GAS	KET.
			PNS	HONOR	KONTRAK	SDH	BLM		
1.	LP Anak Pria Tangerang	19	19	-	-	-	-	-	
2.	LP Anak Wanita Tangerang	52	52	-	-	-	-	14	
3.	LP Pemuda Klas IIA Tangerang.	101	101	-	-	-	-	52	
4.	LP Wanita Tangerang								
5.	LP Klas I / Pria Dewasa Tangerang	183	183	-	-	-	-	16	Diklat Samapta
6.	Dishub Kota Tangerang	21	21	-	-	21	-	-	
JUMLAH		376	376			21		82	

Tabel. 29 Sumber : Sat Binmas Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Sesuai dengan pasal 14 (1) f Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tugas Polri adalah melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Khusus mengenai status dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ada samapai sekarang belum jelas, padahal dalam sehari-harinya tugas mereka tidak terlepas dengan tugas-tugas Polri, oleh karena itu akan lebih baik jika Satpol PP masuk dalam Polsus sehingga Polri dapat melakukan pembinaan agar pelaksanaan tugas terkait dengan penegakan hokum peraturan daerah akan lebih terarah. Sebaiknya Polri memprakarsai pembuatan surat keputusan bersama anantara Kapolri dan Menteri Dalam Negeri untuk merancang pedoman

bagi satpol PP , termasuk hubungan kerjasama Satpol PP dengan Polri di tingkat Polres.

Data Sat Pol PP wilayah Polres Metro Tangerang Kota yang ada di kota Tangerang sebagai berikut :

No	Lokasi	Kewenangan PPNS	satpol pp				kemampuan		jmlh	Senpi Pistol
			Pns	Honorer	lain lain		Diklat	Blm		
					Banpol	Linmas				
1.	Satpol PP Kota Tng	-	137	77	-	-	-	-	214	-
2.	Sekta Jtu	-	50	67	-	-	-	-	117	-
3.	Polsek Karawaci	-	8	9	-	-	-	-	17	-
4.	Sekta Neglasari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Sekta Cipondoh	-	57	5	-	-	13	5	18	-
6.	Sekta Benda	-	5	2	-	-	-	-	7	-
7.	Sekta Bt.ceper	-	3	6	2	49	-	-	60	-
8.	Sekta Ciledug	5	6	7	-	986	5	12	17	-
JUMLAH		5	327	173	2	1.035	18	17	450	-

Tabel. 30 Sumber : Sat Binmas Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang ada dalam masyarakat Tangerang sangat membantu tugas-tugas Polri dalam rangka pencegahan kejahatan, namun perlu terus menerus mendapatkan pembinaan dari Polri. Keberadaan perpolisian masyarakat dengan Babinkamtibmas yang berada di tiap kelurahan telah mengaburkan fungsi “patroli” dari Sabhara tingkat Polsek yang dulu membina Siskamling di wilayah pemukiman. Kalau di desa pelaksanaan kegiatan Siskamling dilakukan secara gotong royong diantara warga secara bergantian, namun masyarakat Tangerang nilai-nilai kegotong royongan antar warga dalam satu kampung sudah luntur karena faktor kesibukan kerja masing-masing perorangan, sehingga untuk kegiatan Siskamling saat ini lebih banyak menggunakan tenaga Satpam pemukiman, yang di gaji melalui iuran warganya.

Pada wilayah tertentu kegiatan Siskamling dilaksanakan oleh sekelompok warga yang menamakan dirinya kelompok sadar Kamtibmas (Pokdar Kamtibmas). Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai profesi namun mereka memiliki keinginan yang sama untuk membangun kesadaran dan kepeduliannya membantu tugas-tugas polisi

melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan membantu tugas polisi. Data Pokdar Kamtibmas wilayah Polres Metro Tangerang Kota sebagai berikut :

NO	POLSEK	JML DESA / KEL.	JML POKDAR KTM	JML ANGGOTA POKDAR KTM	KEGIATAN		KET
					AKTIF	TIDAK	
1.	TANGERANG	8	-	-	-	-	
2.	CIPONDOH	21	27	-	-	-	
3.	CILEDUG	23	10	110	10	-	
4.	JATIUWUNG	17	-	-	-	-	
5.	BATUCEPER	7	7	50	-	-	
6.	BENDA	5	9	133	9	-	-
7.	NEGLASARI	7	1	20	1	-	-
8.	KARAWACI	16	32	32	32	-	-
JUMLAH		104	86	345	52	-	-

Tabel. 31 Sumber : Sat Binmas Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Kelompok lainnya yang dapat dikatakan sebagai pengamanan swakarsa adalah forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM). Seperti halnya kelompok sadar Kamtibmas diatas, maka kelompok ini di bentuk juga berorientasi pada kepedulian menciptakan rasa aman pada masyarakat dengan bermitra dengan polisi. Data FKPM wilayah Polres Metro Tangerang Kota sebagai berikut :

NO	POLSEK	JUMLAH		JML ANGGOTA POLMAS	JUMLAH FKPM	JML ANGG. FKPM	BKPM	BALAI POLMAS	KET.
		DESA / KEL	KEC.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SAT BINMAS	-	-	-	1	44	-	-	
2.	TANGERANG	8	1	8	10		1	8	
3.	CIPONDOH	21	2	21	27	144	4	21	
4.	CILEDUG	23	3	23	27	73	1	23	
5.	JATIUWUNG	17	3	17	22	159	-	17	
6.	BATUCEPER	7	1	7	10	110	2	7	
7.	BENDA	5	1	5	8	30	2	5	
8.	NEGLASARI	7	1	7	8	56	-	7	
9.	KARAWACI	16	1	16	18	80	1	16	
JUMLAH		104	13	104	131	696	13	104	

Tabel. 32 Sumber : Sat Binmas Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Dalam rangka mengajak, mendorong dan membina partisipasi masyarakat untuk pembinaan Kamtibmas maka di setiap kelurahan ditempatkan seorang anggota polisi bintara Pembina keamanan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) yang bertugas melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan di kelurahan / RW dan RT tentang masalah-masalah warga dan menyelesaikannya dengan masyarakat sendiri, disamping itu tugasnya adalah menginformasikan kepada kesatuan bila memperoleh informasi atau bila mengetahui kejadian yang perlu segera mendapatkan pelayanan polisi.

Sebagaimana disinggung di atas bahwa keberadaan Babinkamtibmas ini mengaburkan fungsi patroli dari Sabhara Polsek. Sejauh ini belum ada peraturan yang jelas yang mengatur berapa jam tugasnya, siapa yang mengendalikan tugasnya, dimana mereka harus bekerja (kantor), akibatnya pelaksanaan tugas para Babinkamtibmas ini tidak bisa terkontrol dan sejauh ini belum ada yang mengevaluasi efektifitas tugas-tugas Babinkamtibmas. Bila belum ada kejelasan tentang pengendaliannya sebaiknya para Babinkamtibmas ditarik menjadi anggota Sabhara dan bertugas melakukan patroli sambang di pemukiman warga (*one man patrol*), atau keberadaannya langsung dikendalikan oleh Kasat Binmas untuk tugas-tugas binmas yang lebih luas. Data Babinkamtibmas yang ada di kota Tangerang saat ini sebagai berikut :

No	Polsek	Jumlah Kelurahan	Jumlah Babinkamtibmas	Keterangan
1	BATUCEPER	7 Kelurahan	7 Personel	
2	NEGLASARI	7 Kelurahan	7 Personel	
3	JATI UWUNG	17 Kelurahan	17 Personel	
4	CILEDUG	23 Kelurahan	23 Personel	
5	TANGERANG	8 Kelurahan	8 Personel	
6	KARAWACI	16 Kelurahan	16 Personel	
7	CIPONDOH	21 Kelurahan	21 Personel	
8	BENDA	5 Kelurahan	5 Personel	

Tabel. 33 Sumber : Sat Binmas Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Sebagai perwujudan ikut berpartisipasi dalam bidang keamanan khususnya dalam rangka mengamankan diri dan lingkungannya maka masyarakat telah membangun secara swadaya pos-pos siskamling di pemukiman warga masyarakat. Partisipasi masyarakat ini menjadi kewajiban bagi para petugas Babinkamtibmas untuk membinanya. Data pos kamling yang ada di kota Tangerang

No	Wilayah Polsek	Jumlah		Type			Jumlah Pos kamling	Jumlah petugas	ket
		Kelurahan	RW	A	B	C			
1	Tangerang	8	106	-	-	21	21	42	
2	Batucapeer	7	-	-	3	21	24	117	
3	Jatiuwung	17	-	-	1	27	28	221	
4	Cipondoh	21	-	2	6	4	12	101	
5	Benda	5	42	-	-	11	11	57	
6	Neglasari	7	50	1	4	9	14	35	
7	Karawaci	16	51	-	-	17	17	65	
8	Ciledug	23	256	2	26	58	86	277	
Jumlah		104	505	5	40	168	213	915	

Tabel. 34 Sumber : Sat Binmas Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Polri sejak semenjak semula menganut sistem keamanan rakyat semesta, dan pada tahun 1980 dikenal dengan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa (siskamtibmas swakarsa). Pada tahun 1988, sistem ini ditegaskan dalam GBHN. Pelaksanaan siskamtibmas Swakarsa ini dilaksanakan dengan sistem keamanan lingkungan dengan cara ronda di daerah pemukiman, terutama daerah perdesaan dan satuan pengamanan (Satpam) di sektor modern, seperti pabrik, perusahaan, instansi pemerintah ataupun swasta, perbankan dan sebagainya yang di pimpin oleh *security managers* dengan berbagai sebutan menurut organisasi yang bersangkutan.

Melalui siskamtibmas swakarsa ini, pelaksanaan tugas Polri dapat dibantu karena kurangnya personil Polri dibandingkan dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu Polri berkewajiban turut membina

pelatihan Satpam serta pembinaan dan koordinasi dari *security managers* organisasi yang bersangkutan. Pembinaan Satpam dan koordinasi *security managers* ini harus terus ditingkatkan agar pengamanan pembangunan kota Tangerang secara keseluruhan dapat terjamin.

Termasuk dalam rangka pengamanan objek vital, Polri dituntut untuk mampu memberikan pengamanan berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002, Kepres RI nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional, dan Skep Kapolri no.pol; Skep/738/X/2005 tentang pedoman sistem pengamanan objek vital nasional. Namun sejauh ini belum ada petunjuk yang jelas tentang penunjukan objek vital di tingkat Polres, sebaiknya dalam hal ini Polres diberikan kewenangan untuk menentukan objek vital yang ada di wilayahnya, dan yang lebih penting dalam rangka pengamanan objek vital Polri perlu mengedepankan pam swakarsa dengan membentuk satuan pengamanan yang akan bertugas mengamankan objek vital tersebut.

Pengamanan swakarsa adalah terkait dengan *community policing*. *Community policing* merubah pemolisian tradisional yang mendikte masyarakat menjadi pemberdayaan (empowering) masyarakat dengan keyakinan bahwa hanya dengan kerjasama polisi dan masyarakat dapat tercapai "quality of life" dari warga masyarakat. Tumpuan keberhasilan program *community policing* di Polres Metro Tangerang terletak pada peran para Babinkamtibmas yang ada di kelurahan-kelurahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu bila program *community policing* ingin berhasil maka perlu dibenahi dulu mekanisme penugasan para Babinkamtibmas.

4.2.5. Fungsi pembinaan

4.2.5.1. Bidang Sumber Daya Manusia

a. Rekrutmen

Untuk rekrutmen di tingkat kewilayahan (Polres) selama ini mengacu kepada kebijakan dari tingkat pusat (Mabes Polri) di dalam pelaksanaannya proses seleksi dan penentuan calon anggota Polri sepenuhnya oleh Kapolda berdasarkan mekanisme dan standar kelulusan yang telah ditetapkan (untuk calon anggota Bintara Polri). Untuk Akpol (Akademi Kepolisian) dan PPSS (Perwira Polri Sumber Sarjana) sepenuhnya menjadi kewenangan Mabes Polri. Peran Polres dalam penerimaan calon anggota Polri (Bintara) hanya sebagai panitia daerah penerimaan sebatas berwenang untuk:

1. Sosialisasi
2. Menerima pendaftaran
3. Pemeriksaan administrasi calon anggota Polri bekerja sama dengan Dinas P & K
4. Pemeriksaan tinggi dan berat badan

Data animo pendaftar calon anggota Polri (Bintara) panitia daerah Polres Metro Tangerang Kota tahun 2009 s/d 2010 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	JumlahPendaftar		Seleksi tingkat Polda			
				Lulus		Tidak lulus	
		P	W	P	W	P	W
1	2009	601	39	77	2	524	37
2	2010	199	6	5	2	194	4

Tabel. 35 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Anggaran untuk kegiatan rekrutmen calon Bintara Polri di tingkat daerah (Polres) dalam setiap kali kegiatan sebagai berikut :

No	Tahun penerimaan	Indeks / orang	Alokasi	Jml pendaftar	Keterangan
1	2009	Rp. 1.650.000,-	79	640	Nihil
2	2010	Rp. 1.650.000,-	7	205	Nihil

Tabel. 36 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Untuk penerimaan Akpol dan PPSS Polres Metro Tangerang Kota hanya bertugas membantu panitia daerah (Polda) melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan pembuatan pamflet (selebaran), spanduk sosialisasi yang di pasang pada tempat – tempat yang mudah dilihat dan di baca oleh masyarakat, disamping itu kegiatan sosialisasi dilakukan melalui stasiun radio yang ada di kota Tangerang. Untuk mendukung kegiatan sosialisasi ini tidak didukung dengan anggaran.

Data perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan sosialisasi Akpol dan PPSS tahun 2010 dan 2011 di Polres Metro Tangerang Kota

No	Tahun	Frekuensi	Kebutuhan anggaran	Sumber anggaran		Keterangan
				Dinas	Swadaya	
	2009	2 kali	Rp. 9.000.000,-	X	√	Akpol dan PPSS
	2010	2 kali	Rp. 9.000.000,-	X	√	Akpol dan PPSS

Tabel. 37 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangerang Kota, 2011

b. penempatan

Untuk mengisi struktur organisasi Polres Metro Tangerang Kota sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol : KEP/23/IX/2010 tanggal 30 September 2010 tentang organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi Polri pada tingkat kewilayahan, maka kewenangan penempatan personil sebagai berikut :

1. Untuk penempatan unsur pimpinan (Kapolres dan Wakapolres) kewenangan Mabes Polri.
2. Untuk penempatan unsur pengawas dan pembantu pimpinan (Pamen) menjadi kewenangan Polda, sedangkan untuk Pama dan Bintara menjadi kewenangan Kapolres.
3. Untuk penempatan unsur pelaksana tugas pokok untuk Pamen menjadi kewenangan Polda, sedangkan Pama dan Bintara menjadi kewenangan Kapolres.
4. Untuk penempatan unsur pendukung untuk Pamen menjadi kewenangan Polda, sedangkan Pama dan Bintara menjadi kewenangan Kapolres.
5. Untuk unsur pelaksanaan tugas kewilayahan (Polsek) Pamen menjadi kewenangan Polda, sedangkan Pama dan Bintara menjadi kewenangan Kapolres.

b. Pelatihan

Untuk memelihara dan meningkatkan profesionalisme anggota Polri maka di perlukan pelatihan secara rutin kepada anggota sesuai dengan fungsi yang diembannya, data jumlah personil yang mengikuti pelatihan di Polres Metro Tangerang Kota sebagai berikut :

No	Jenis Pelatihan	Tahun		Dukungan Anggaran	Keterangan
		2009	2010		
1	Dikjur / latihan	45	338	Dinas	Lemdikpol
2	Rutin			Nihil	Polres
	- Menembak	642	1271		
	- Dalmas	431	706		
	- Fungsi teknis /VCD	1168	283		
	- UU HAM	1272	1272		
	- Armor water canon	-	10		
	- Ketrampilan mengendarai R2 Trail	-	20		

Tabel. 38 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangerang Kota, 2011

d. Perawatan

Perawatan personil di Polres Metro Tangerang Kota dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Pemenuhan hak-hak personil seperti gaji, tunjangan-tunjangan dengan tepat waktu dan sesuai dengan indeks yang telah di atur.
2. Hak cuti dan ijin diberikan dengan tingkat kewenangan, untuk pengajuan cuti / ijin ke luar negeri dari Mabes Polri kemudian untuk dalam negeri dari Polda (untuk Kapolres), dan Kewenangan Kapolres untuk memebrikan cuti / ijin kepada personil di lingkungan Polres.

No	Tahun	Cuti		Ijin
		DN	LN	
1	2009	128	7	115
2	2010	317	18	187

Tabel. 39 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangerang Kota, 2011

3. Perawatan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan olahraga secara rutin setiap hari Jumat dan memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota yang sakit dan keluarganya oleh fungsi Urdokkes Polres Metro Tangerang Kota.

Data perawatan kesehatan anggota oleh Urdokkes Polres Metro Tangerang Kota sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Personil yang berobat			Jumlah Paramedis	
		Perwira	Bintara	PNS	Dokter	Perawat
1	2009	126	411	96	2	3
2	2010	117	502	103	2	3

Tabel. 40 Sumber : Urdokkes Polres Metro Tangerang Kota, 2011

4. Pembinaan moral dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan untuk muslim setiap hari Kamis dilaksanakan pengajian dan ceramah agama di masjid, sedangkan bagi anggota yang beragama nasrani diadakan kebaktian bersama setiap hari Jumat dengan mendatangkan Pendeta / Pastur yang ada di kota Tangerang.
5. Penghargaan dan hukuman (*Reward and Punishment*), pemberian penghargaan diberikan kepada anggota-anggota yang berprestasi dan menunjukkan kinerja yang baik, sedangkan kepada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik kepolisian akan dikenakan sanksi melalui mekanisme dan penjatuhan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Data Reward and Punishment tahun 2009 s/d 2010 sebagai berikut :

No	Tahun	Reward	Punishment			
			Disiplin	Kode etik	Pidana	PTDH
1	2009	141	7	2	-	2
2	2010	51	47	-	7	1

Tabel. 41 Sumber : Sie Propam Polres Metro Tangerang Kota, 2011

e. Pengakhiran

Pengakhiran tugas personil terjadi karena berakhirnya masa pengabdian sebagai anggota Polri sesuai batas umur yang ditentukan, dan terjadi karena berhentinya masa pengabdian personik karena hal lain (meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat). Untuk pengakhiran tugas menjadi kewenangan Mabes Polri, dalam hal ini Polres

Metro Tangerang Kota hanya membantu menyiapkan kelengkapan administrasi untuk proses pengakhiran tugas.

Data pengakhiran tugas anggota Polri di Polres Metro Tangerang Kota sebagai berikut :

No	Tahun	Pensiun	Meninggal dunia	PTDH	Keterangan
1	2009	9	7	2	-
2	2010	7	3	1	-

Tabel. 42 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangerang Kota, 2011

4.2.5.2. Bidang sarana dan prasarana

1. Pengadaan

Untuk pengadaan peralatan utama maupun peralatan khusus kepolisian masih terpusat di Mabes Polri, sedangkan untuk peralatan yang bersifat bantuan dari instansi vertikal diluar Polri maupun dari masyarakat dilakukan melalui mekanisme hibah untuk dimasukkan didalam daftar inventaris barang kekayaan milik negara (BKMN).

Data pengadaan Alut dan Alsus di Polres Metro Tangerang Kota sebagai berikut:

No	Tahun	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	
				Hibah	Dinas
1	2009	1. Kendaraan roda 4 2. Kendaraan roda 2 3. Kendaraan water canon 4. Meja computer 5. Tape recorder 6. Wireless 7. Camera digital 8. Pesawat telephone 9. Printer 10. Connection cable 23 11. Stabilizer / UPS 12. Kaset suara 13. Battery charge 14. Kursi besi / metal	41 unit 15 unit 1 unit 1 buah 1 unit 2 buah 1 unit 1 buah 1 unit 1 buah 1 buah 3 buah 2 buah 1 buah	-	73

		15. Adaptor	1 buah		
2	2010	1. Bangunan Mess 2. Kendaraan roda 4 3. Kendaraan roda 2 4. Kendaraan Derek 5. UPS 6. Printer 7. Komputer 8. Tempat ibadah permanen 9. Gedung pertemuan permanen 10. Rumah negara Gol II tipe B 11. Asrama semi permanen 12. Rusun permanen 13. Laptop	66.881 M/2 2 unit 1 unit 1 unit 1 buah 1 unit 8 unit 1 buah 1 buah 8 buah 2 buah 2 buah 3 unit	15 unit	22 unit

Tabel. 43 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangerang Kota, 2011

2. Pemeliharaan dan perawatan

Pemeliharaan dan perawatan di Polres Metro Tangerang Kota meliputi gedung, kendaraan dinas, alat komunikasi dan alat tulis kantor (Komputer) untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan ini didukung dengan anggaran dinas (DIPA) dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku.

Data biaya harwat tahun 2010 di Polres Metro Tangerang Kota sebagai berikut :

No	Jenis Perawatan	Tahun 2010		
		Alokasi Anggaran	Kebutuhan riil	Keterangan
1	Gedung	Rp. 148.250.000,-	Rp. 189.000.000,-	Kurang
2	Ranmor	Rp. 397.800.000,-	Rp. 831.600.000,-	Kurang
3	Alkom	Rp. 56.500.000,-	Rp. 60.000.000,-	Kurang
4	Komputer	nihil	Rp. 24.480.000,-	Swadaya

Tabel. 44 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangerang Kota, 2011

3. Penghapusan

Proses penghapusan barang inventaris milik negara dilakukan melalui mekanisme yang cukup panjang mulai dari pengusulan oleh Kasatwil (Kapolres) berjenjang sampai dengan

Mabes Polri mengingat keputusan penghapusan barang inventaris negara harus dengan persetujuan menteri keuangan.

Data barang inventaris milik negara yang ada di Polres Metro Tangerang Kota dalam keadaan rusak berat dan masih dalam proses pengusulan penghapusan sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Kendaraan roda 6	2 unit	Rusak berat	Dalam proses usul
2	Kendaraan roda 4	13 unit	Rusak berat	Dalam proses usul
3	Kendaraan roda 2	81 unit	Rusak berat	Dalam proses usul

Tabel. 45 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Manajemen material dan logistik, dalam mengelola alat-alat khusus kepolisian seperti borgol, senjata api, kendaraan alat-alat pengendalian huru-hara dan sebagainya termasuk alat-alat kantor yang pada umumnya ada di kantor kepolisian tetap berpedoman kepada tahap-tahap pengadaan, pemeliharaan/perawatan, dan penghapusan. Kedepan perlunya kepolisian Polres Metro Tangerang Kota melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya terutama dukungan untuk biaya perawatan dan penambahan peralatan khusus kepolisian seperti kendaraan patroli maupun alat tulis kantor melalui proses hibah mengingat anggaran yang diberikan oleh pemerintah terbatas.

4.2.5.3. Bidang anggaran

Untuk dukungan anggaran yang di terima dari pemerintah telah di atur sesuai dengan DIPA dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan penggunaan mata anggaran yang telah ditetapkan.

Data dukungan anggaran untuk kegiatan kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah anggaran	Yang terserap	Kembali ke negara	Ket
1	2009	Rp. 66.193.759.000,-	Rp. 70.383.916.001,-	Rp. 601.579.806,-	Di kembalikan anggaran kegiatan PAM pemilu Presiden dan Wapres tahun 2009
2	2010	Rp. 69.723.133.000,-	Rp. 72.413.529.788,-	Rp. 646.220.764,-	Di kembalikan anggaran Gaji PNS, Transito, Honor SIM, daya dan Jasa dan Har Kendaraan Khusus

Tabel. 46 Sumber : Kasi Keu Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Manajemen keuangan, sebagai pelaksana dari anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah perlu dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap dijunjung tinggi dan mampu mempertahankan status wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah dicapai Polri.

4.2.5.4. Bidang pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian Polres Metro Tangerang Kota dilakukan sebagai berikut:

1. Pengawasan internal terhadap fungsi-fungsi operasional dan pembinaan dilaksanakan berjenjang oleh Kapolres dan para Kabag, Kasat, Kapolsek kepada anggota pelaksana dilapangan. Dalam kegiatan sehari-hari fungsi pengawasan internal di emban oleh Kasi Was untuk bidang manajemen dan Kasie Propam untuk bidang disiplin dan kode etik.
2. Pengawasan internal dari kesatuan atas melalui kegiatan Wasrik, Supervisi, *Coaching Clinic* baik dari Polda Metro Jaya maupun dari Mabes Polri dengan tujuan menghilangkan / memperbaiki kesalahan-kesalahan prosedur maupun

administrasi dalam kegiatan operasional maupun pembinaan di Polres Metro Tangerang Kota.

Data pengawasan internal dari kesatuan atas di Polres Metro Tangerang Kota tahun 2010 sebagai berikut:

No	Jenis Pengawasan	Mabes Polri	Jumlah Temuan	Polda Metro Jaya	Jumlah Temuan	Keterangan
1	Wasrik	Itwasum	8	Itwasda	24	Rutin
2	Supervisi	-	-	Ro Rembang	8	Rutin
3	Coaching Clinic	Bareskrim	1	-	-	Tidak rutin

Tabel. 47 Sumber : Bag Ren Polres Metro Tangerang Kota, 2011

- Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dinas maupun sumber-sumber penghasilan yang bukan pajak seperti penggunaan aset Polri untuk masyarakat, biaya pengurusan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), biaya pengurusan SIM (Surat Ijin Mengemudi). Di samping itu pengawasan eksternal juga dilakukan oleh Kopolnas melalui pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri.

Data pengawasan BPK di Polres Metro Tangerang Kota sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah	Temuan	Tindak lanjut	Keterangan
1	2009	1 kali	Nihil	Nihil	
2	2010	1 kali	Nihil	Nihil	

Tabel. 48 Sumber : Bag Ren Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Data pengawasan Kompolnas melalui Itwasum Polri / Irwasda di Polres Metro Tangerang Kota sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah	Temuan	Tindak lanjut	Keterangan
1	2009	1	7	Perbaikan pelayanan	Terjawab
2	2010	1	6	Perbaikan pelayanan	Terjawab

Tabel. 49 Sumber : Bag Ren Polres Metro Tangerang Kota, 2011

Manajemen pengawasan, pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang yang diatur dan telah didelegasikan kepada kesatuan bawah dari Polda sampai Polsek perlu dilaksanakan dengan baik terutama dibidang penyidikan dan pemberian perijinan ataupun pelayanan yang sering timbul penyalahgunaan wewenang. Pengawasan internal maupun eksternal yang telah berjalan selama ini akan lebih efektif dengan didukung pengawasan langsung/pengawasan melekat melalui pengecekan langsung dilapangan.

4.3. Tehnologi kepolisian.

Sebagaimana diketahui yang dimaksud dengan tehnologi kepolisian adalah semua peralatan (hardware) khusus yang membantu kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya terutama dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakkan hukum. Alat-alat itu dipergunakan oleh perorangan dan kesatuan, seperti kendaraan kepolisian, laboratorium forensik dan identifikasi foresik. Untuk jajaran Polda Metro Jaya masih memerlukan dukungan/ bantuan dari laboratorium forensik dan identifikasi forensik Mabes Polri, sehingga masih terasa panjang dan memakan waktu lama untuk meminta bantuan dukungan penyidikan secara ilmiah (*scientific investigation*). Kedepan perlunya Polda Metro Jaya memiliki peralatan khusus atau alat utama yang mampu mempercepat dalam proses criminal investigasi, khususnya peralatan yang berbasiskan tehnologi informasi dan komunikasi mengingat saat ini kejahatan banyak menggunakan

tehnologi informasi dan komunikasi maka pengungkapannyapun harus didukung dengan peralatan yang sesuai.

Peralatan bagi perorangan antara lain pentungan, tameng, borgol, senjata api laras pendek maupun laras panjang sangat mendukung tugas-tugas kepolisian Polres Metro Tangerang Kota, mengingat situasi saat ini semakin maraknya aksi anarkhisme massa yang secara terang-terangan berani menyerang kepada petugas polisi, untuk itu perlu di tinjau lagi kelayakan peralatan perorangan itu dan dukungan penambahan amunisi senjata api dari kesatuan atas (Polda)

Penggunaan CCTV sebagai tehnologi informasi security telah dimanfaatkan oleh Polres Metro Tangerang Kota untuk memantau keamanan internal, maupun situasi lalu lintas di beberapa sudut kota Tangerang. Untuk mendukung kecepatan informasi dari dan kepada masyarakat Polres Metro Tangerang Kota telah membuat MoU dengan beberapa radio swasta yang ada di kota Tangerang untuk secara rutin menyiarkan secara langsung situasi lalu lintas maupun situasi keamanan di masyarakat. Penggunaan sarana twitter maupun program "Info Polres" dengan Fleksi 021-33618181 sebagai inovasi yang dikembangkan secara swadaya pemanfaatan tehnologi untuk menunjang operasional Polres Metro Tangerang Kota. Kedepan penggunaan sarana tehnologi informasi dan komunikasi perlu terus dikembangkan disamping untuk mempercepat respon Polri terhadap laporan masyarakat , sekaligus sebagai sarana yang dapat lebih mendekatkan Polri dengan masyarakat yang dilayaninya.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan.

Kesimpulan dalam hasil penelitian tentang pelaksanaan administrasi kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota, ini menyajikan sintesa analisa hasil dan temuan penelitian sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih esensial di dalam menjawab permasalahan penelitian. Adapun hasil analisa temuan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Perkembangan Kota Tangerang

Kota Tangerang adalah sebuah kota yang akan terus berkembang menuju kota modern (*metropolitan*), dan sarat dengan permasalahan sosial seperti kurangnya lapangan pekerjaan, konflik kepentingan antar komunitas, dan kriminalitas. Kuatnya nilai-nilai religious (Islam) yang berkembang di tengah kehidupan masyarakatnya tidak sepenuhnya mampu menahan pengaruh perubahan lingkungan baik global, nasional maupun lokal termasuk akibat-akibat pembangunan kota itu sendiri. Permasalah sosial bila tidak dikelola dengan baik akan berubah menjadi kejahatan yang dapat menghambat produktifitas masyarakat dan pada akhirnya program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah kota Tangerang meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai.

b. Polres Metro Tangerang Kota sebagai kesatuan operasional dasar (KOD) Polri kota besar (*metropolitan*) adalah bagian dari organisasi Kepolisian Nasional Negara Republik Indonesia, yang mempunyai tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002, termasuk peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang terorisme, undang-undang anti korupsi, undang-undang kepegawaian dan lain sebagainya. Sebagai kesatuan kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat Polres Metro menyelenggarakan administrasi kepolisian yang melingkupi

manajemen operasional dan manajemen pembinaan dengan didukung teknologi kepolisian untuk mencapai tujuan tugas kepolisian yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum di kota Tangerang, meskipun dengan sumber daya yang masih terbatas baik personil, peralatan maupun anggaran.

- c. Manajemen operasional di Polres Metro Tangerang Kota dilaksanakan oleh fungsi-fungsi operasional kepolisian seperti Sabhara, Reserse, Intel, Lalu Lintas, termasuk fungsi pembinaan masyarakat (Binmas) yang bertugas melakukan pembinaan kepada pengamanan swakarsa, melalui kegiatan-kegiatan pre-emptif, preventif dan represif. Titik berat kegiatan operasional diutamakan pada pre-emptif dan preventif sesuai dengan pepatah "*its better to prevent than to cure*" serta lebih mendekatkan hubungan polisi dan masyarakat (*community policing*). Kegiatan operasional dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat masih sarat dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) karena belum memanfaatkan teknologi yang dapat membatasi bertemunya masyarakat yang memerlukan pelayanan dan petugas polisi yang memberikan pelayanan. Terhadap pelaksanaan tugas unsur-unsur operasional dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Sabahara, tugas penjagaan masih berjalan sistem 2 shift sehari, atau 2x12 jam sehari. Idealnya tugas penjagaan adalah 3 shift atau 3x8 jam sehari sesuai standar normal jam kerja yang umum yaitu 8 jam. Patroli jalan kaki dan bersepeda sudah tidak aktif lagi dilaksanakan padahal kondisi masyarakat kota Tangerang masih cocok untuk dilakukan patroli Sabhara dengan jalan kaki dan bersepeda khususnya di pemukiman warga yang sempit atau pasar-pasar tradisional.
- 2) Intelkam, pembuatan analisa daerah operasi masih bersifat tahunan, seharusnya selalu di mutakhirkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.
- 3) Polantas, pelaksanaan tugas dengan menekankan pentingnya aspek keselamatan berlalu-lintas masih sangat kurang, perlu terus di

sosialisasikan dan dicarikan terobosa-terobosan kegiatan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas.

- 4) Reserse, dalam rangka pembinaan terhadap PPNS dalam hal koordinasi dan pengawasan perlu di tingkatkan lagi, termasuk dalam hal kewenangan penyidikan oleh PPNS yang ada di Tangerang Kota perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang kewenangan penyidikannya mengingat kewenangan penyidikan tidak termasuk kewenangan yang di otonomisasikan.
 - 5) Binmas, pelaksanaan tugas para Babinkamtibmas di Polres Metro Tangerang Kota masih banyak hal yang belum jelas aturannya anantara lain: dibawah pengendalian/koordinator siapa, berapa lama jam kerjanya, kantornya dimana, apakah cukup satu orang per kelurahan, dan lain-lain yang masih perlu pengaturan lebih lanjut.
 - 6) Keberadaan pengamanan swakarsa antara lain satuan pengamanan (Satpam), BUJP, AMSI belum terkoordinir dan terawasi dengan baik, demikian halnya keberadaan Polsus, dan Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dekat dengan Polri.
 - 7) Pengamanan objek vital, sampai saat ini belum ada petunjuk yang menentukan objek vital yang berada di wialayah Tangerang kota.
- d. Pelaksanaan manajemen pembinaan di Polres Metro Tangerang Kota sebagai berikut :
- 1). Bidang sumber daya manusia, masih perlu dikembangkan lagi baik segi jumlah (kuantitas) agar sesuai dengan daftar susunan personil dalam struktur organisasi yang baru. Disamping itu secara kualitas perlu ditingkatkan lagi untuk mengikuti program-program pendidikan kejuruan bagi anggota dan pelatihan dalam lingkup kesatuan mengingat kewajiban pimpinan salah satunya adalah melatih anggotanya.
 - 2). Bidang material atau peralatan, belum memiliki peralatan khusus yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi padahal kejahatan saat ini banyak menggunakan teknologi, akibatnya Polri sangat

kesulitan dalam memenuhi harapan masyarakat sebagai institusi yang membantu persoalan warganya.

- 3). Anggaran, kebutuhan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional dan pembinaan sudah dialokasikan dari pusat, sehingga satker Polres Metro Tangerang Kota tinggal menggunakan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 4). Pengawasan, meskipun upaya-upaya pengawasan telah dilaksanakan baik dari internal Polri maupun eksternal Polri, namun masih terjadi pelanggaran disiplin / etika anggota Polri, hal ini terjadi karena masih lemahnya pengawasan melekat dari para atasan anggota tersebut.
- 5) Hubungan dan tata cara kerja , Polres Metro Tangerang Kota secara internal sudah berjalan baik, namun secara eksternal dengan Pemerintah kota Tangerang maupun instansi terkait masih ada jarak mengingat posisi kesatuan Polres Metro Tangerang Kota tidak melekat pada wilayah administrasi Banten (Polda Banten).

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa rekomendasi yang bisa peneliti berikan untuk perbaikan pelaksanaan administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota di masa akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya segera dilakukan pembenahan sistem tugas-tugas ke Sabharaan, penjagaan hendaknya dilaksanakan 3 shift (3 x 8 jam)/ hari dengan pembagian waktu kerja dari pukul 06.00 sampai dengan 14.00, kemudian dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 22.00, dan pukul 22.00 sampai dengan 06.00. Pelaksanaan patroli jalan kaki dan bersepeda perlu dihidupkan kembali karena bukan masalah ketinggalan jamannya namun lebih dititik beratkan bahwa tugas Polri adalah melindungi dan melayani warganya.
- b. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan untuk efektifitas tugas-tugas Babinkamtibmas dalam rangka kegiatan *community policing*, atau

patroli, dan perlu di atur lebih lanjut siapa yang mengkoordinir tugas-tugas Babinkamtibmas.

- c. Perlunya Kapolres Metro Tangerang membuat kerjasama (MoU) dengan Walikota Tangerang tentang pembinaan Satpol PP sebagaimana Polsus yang telah berjalan tentang selama ini. Sambil mengusulkan agar Kapolri segera membuat MoU dengan Menteri Dalam Negeri agar satpol PP dimasukkan menjadi Polsus sehingga pembinaannya dibawah Polri mengingat di kewilayahan hubungan antara Polri dengan Satpol PP sudah sangat dekat dan saling terkait dalam penanganan ketertiban masyarakat.
- d. Perlunya Polres Metro Tangerang KOTA melakukan perubahan alih teknologi dari pelayanan Polri yang manual diganti dengan teknologi yang lebih modern agar pelayanan prima Polri yang telah dicanangkan dalam reformasi birokrasi Polri dapat terwujud yang ditandai dengan tidak adanya lagi kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Terutama pada bidang-bidang penyidikan (*criminal investigation*), pelayanan SKCK, Pelayanan SIM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Ilmiah

- Albrow, Martin, 1970, *Bureaucracy*, Pall Mall Press Ltd, London.
- Albrow, Martin, 1996, *Birokrasi*, Terjemahan M. Rusli & tatok Daryanto, PT. Tiara Wacana
Yogya, Yogyakarta.
- Bachtiar, Harsya W, 1994, *Ilmu Kepolisian*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Bailey, William G, 1995, *The Encyclopedia of Police Science*, Second Edition, Garland
Publishing, Inc, New York and London.
- Baker, Thomas and Carter, David L, 1985 *Police Deviance*, Terjemahan Kunarto, Cipta
Manunggal, Jakarta.
- Bayley, David H, 1998, *Police for the Future*, Saduran oleh Kunarto dan NKM Arief
Dimiyati *Polisi Masa Depan*, Citpa Manunggal, Jakarta
- Blau, Peter M, and Meyer, Marshall W, 2000, *Bureaucracy in Modern Society*,
Diterjemahkan oleh Slamet Rijanto, Penerbit Prestasi Pustaka Karya,
Jakarta
- Bogdan, Robert C and Sari Kropp Biklen, 1982, *Qualitative Research for Education: An
Introduction to Theory and Methods*, Allyn and Bacon, Inc, Boston.
- Brotodiredjo, Soebroto, 1997, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*,
Percetakan Yuseha, Bandung.
- Choo, Chun Wei, 1998, *The Knowing Organization: How Organization Information to
Construct Meaning, Create Knowledge Make Decisions*, Oxford
University Press, New York.
- Cohen, Abner, 1974, *Urban Ethnicity*, Tavistock Publications Limited, London

- Cornell, Stephen & Douglas Hartmann, 2007, *Ethnicity and Race, Second Edition*, Pine Forge Press, California.
- Dharma, Surya, 2005, Manaiemen Kineria: *Falsafah Teori dan Penerapannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Djamin, Awaloedin, 1995, *Administrasi Kepolisian RI: Kenyataan dan Harapan*, Penerbit Sanyata Sumanasa Wira, Bandung.
- Djamin, Awaloedin, 2000, *Menuju Polri Mandiri Yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Cetakan kedua, Jakarta.
- Djamin, Awaloedin, 2007, *Tantangan dan Kendala Menuiu Polri Yang Profesional dan Mandiri*, PTIK Press, Jakarta.
- Djamin, Awaloedin, 2007, *Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini dan Esok*, PTIK Press, Jakarta.
- Djamin, Awaloedin, 2007, *Masalah dan Issue Manaiemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta.
- Djamin, Awaloedin, 2011, *Sistem Administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Dunsire, Andrew, 1973, *Administration: The World and The Science*, Martin Robertson & Company Ltd., London.
- Dwilaksana, Chrysnanda, 2004, *Pemolisian Komuniti (Community Policing) Dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban*, Makalah dicetak oleh YPKIK dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian 2004, Jakarta.
- Finlay, Mark and Zvekic Ugljesa, 1993, *Alternative Policing Styles, Cross-Cultural Perspective*, Terjemahan dan saduran Kunarto, PT.Cipta Manunggal, Jakarta.

- Frederickson, H. George, 1980, **New Public Administration**, The University of Alabama Press, diterjemahkan oleh Al-Ghozi Usman dengan Penerbit PT.Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Frederickson, H. George, 1997, *The Spirit of Public Administration*, Jossey-Bass Publishers, San Fransisco.
- Friedman, Robert, 1992, *Community Policing*, Terjemahan Kunarto, PT.Cipta Manunggal, Jakarta.
- Garston, Neil, 1993, *Bureaucracy: Three Paradigms*, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht.
- Gilley, Jerry w and Ann Maycunich ,2000, *Beyond The Learning organization: Creating a Culture of Continous Growth and Development through State-of-the-Art Human Resources proctices*, Perseus Books,Massachusets
- Goodnow, Frank J., 1900, *Polilics and Administration: A stady in Government*, Russel & Russel, New York, dalam *Classic of public Administration*, 1992, Belmont, CA.
- Gronroose, christian, 1990, *Service Management And Marketing*, D.c Heat & Company/Lexington Books, Masschusett.
- Herlambang, Soerjono, 2006, **Politik kota dan hak atas kota**, Kompas, 2006, Jakarta
- Hatch, Mary Jo, 1997, *organization Theory, Modern, symbolic, and postmodern Perspectives*, Oxford University Press, New york.
- Hellriegel, Don, 1996, *Management*, South Westem College publishing, Cincinnati, Ohio.
- Hoessein, Bheyamin, 1999, *Konsep dan Teori Ilmu Adminstrasi*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Administrasi Kerjasama UI-LAN, Jakarta.

Hoy, Wayne H, dan Miskel, G.Cecil, 1978, *Educational Administration, Teory Research and Practice*, Random House, Inc.

Irawan, Prasetya, 2006, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu - ilmu Sosial*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI, Jakarta.

Irsan, Koesparmono, 1999, *Hukum Pidana*, Ubhara Press, Cetakan pertama, Jakarta.

Ivancevich, John M, 1995, *Human Resources Managemetf*, Richard D.Irwin, Incl, Chicago.

Janowitz, Morris, 1971, *The Military in the Political Development of New Nations*, The University of Chicago Press, Chicago and London.

Kartono, 2003, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal itu?*, PT. Raja Grafindo Persada, -Ed.l., Cet. 11., Jakarta.

Kasim, Azhar,1993, *Pengukuran Efektivilas Dalam Organisasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Kasim, Azhar,1994, *Teori Pembuatan Keputusan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Kelana, Momo, 19 9 4, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Kelana, Momo,2002, *Memahami Undang-undang Kepolisian*, PTIK Press, Jakarta.

Kenney, John P, 1975, *Police Administration*, Charles C Thomas Publisher, Revised Third Printing, Springfield-Illinois.

Kirk,Jarome and Mar L. Miller, 1986, *Reliability and Validaty in Quantitative Research*, Vol.I, Sage Publication, Baverly Hills.

Klockars, Carl B, 1985, *The Idea of Police*, SAGE Publications, Volume 3, Newbury Park-London-New Delhi.

Kumorotomo, Wahyudi, 1994, *Etika Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan kedua, Jakarta.

Mejia, Gomez, David B. Balkin & Robert L. Cardy, 1995, *Managing Human Resource*,
Second Edition, Prentice Hall International, Inc, New Jersey.

Lubis, SB. Hari dan Huseini, Martani, 1987, *Teori Organisasi (Suatu pendekatan Makro)*,
Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1999, *Sejarah Kepolisian di
Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta.

C. Wright and Gerth, HH, 1958, *From Max Webber :Essay in Sociology*, Oxford University
Press.

Henry, 1983, *Structure In Five : Designing Effective Organizations*, Prentice-Hall, Inc,
New Jersey.

More, Hany W.Jr, 1979, *Effective Police Administration, A Behavioral Approach*, West
Publishing, Second Edition, St.Paul-New York-Los Angeles-San Fransisco.

Nanus, Burt, 2001, *Kepemimpinan Visioner: Menciptakan Kesadaran Akan Arah dan
Tujuan Organisasi*, PT. Prenhalindo, Jakarta.

Nelken, David, 1994, *The Futures of Technology*, SAGE Publications Ltd, London-
California-New Delhi.

Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Penerbit Buku
Kompas PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Osborne, David & Ted Gaebler, 1992, *Reinventing Government: How The Entrepreneurial
Spirit Is Transforming The public Sector*, (terj), PT. Teruna Grafica,
Jakarta.

Osborne, David & Peter Plastrik, 1998, *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for
Reinventing Governmen*, Plum Book, penguin Group, New York.

- Pettinger, fuchard, 2002, *Learning organization*, capstone published, oxford.
- Pinchot, Elizabetsh & Gifford, 1993, *The End of Bureaucray & The Rise of Intelligent Organization*, Berret-Koehler publisher, San Fransisco.
- Purwanto, Iwan, 2007, *Manajemen Strategi*, yrama Widya, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2001, Tentang *Community Policing di Indonesia*, Makalah dalam Seminar Polisi antara Harapan dan Kenyataan di sespati Polri, Makalah dicetak kembali oleh YPKIK dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian 2004, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Rasyid, Ryass, Syaukani, HR, dan Gaffar Affan, 2002, Otonomi *Daerah: Dalam Negeri Kesatuan*, Pustaka Pelajar dan Puskap, Yogyakarta.
- Reiner, Robert, 2000, *Politics of The Police*, oxford University Press, New York.
- Reksodiputro, Mardjono, 1999, *catatan Untuk Kurikulum Pendidikan Polri (sebuah makalah pembeding)*, Makalah pada Sarasehan Sistem Pendidikan Polri di Mabes Polri 1999, dicetak kembali oleh YPKIK dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian 2004, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 2004, *Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi Sebagai Alat Penegak Hukum*, Makalah dicetak kembali oleh YPKIK dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian 2004, Jakarta.
- Richardson, James F., 1974, *Urban Police in the United States*, Port Washington, N.Y: National University, New York.
- Robbins, Stephen P, 1990, *Oganization Theory: Structure Designs and Applications.*, Third Edition, Prentice-Hall, Inc, New Jersey Sarundajang, S.H 2003, Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Administrasi kepolisian..., Tavip Yulianto, Pascasarjana UI, 2011.

- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2005, *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*, Balai Pustaka, Jakarta .
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2006, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Saduran dari Theories of Social Psychotgt oleh Marvin E. Shaw & Philips R. Costanzo, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Senge, Peter M., 1990, *The Fifth Discipline: The Art and Practice of The Learning Organization*, Random House Bussiness Book, London.
- Senge, Peter M, Charlotte Roberts, Richard B. Ross, Bryan J. Smith & Art Kleindr, 1994, *The Fifth Desclipline Field'Book: Strategies and Tools for Building and Learning organization* Nicholas Breaty Publishing, London.
- Senge, Peter M, 1999, *The Dance of Change: The Challenges to Sustaining, Momentum in Learning organizations, A Fifth Discipline Resource*, Currency Doubleday, New York.
- Setiono, Budi, 2002, *Jaring Birokrasi: Dari Aspek Potitik dan Administrasi*, PT Gugus Press, Bekasi.
- Siagian, Sondang P, 1989, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 1990, *Filsafat Administrasi*, Penerbit CV Haji Masagung, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 1996, *Fungsi – Fungsi Manajerial*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2001, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2006, *Sistem Informasi Manajemen*, PT Bumi Aksara, Ed. 2, Cet. 6. Jakarta.

- Siagian, Sondang P, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara, Cetakan ke – 14 Jakarta.
- Shafritz, Jay M & Albert C Hyde, 1992, *Classif of public Administration*, Wadsworth Publishing Company, Third Edition, Belmont, CA.
- Spradley, James P, 1997, *Metode Etnografi*, Terjemahan, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Stillman II, Richard J 1992, *Public Administration: Concept and Cases*, Houghton Mifflin Company Fifth Edition, Boston, MA.
- Stoner, James AF, 1982, *Management*, Prentice Hall, Inc, Engelwoods cliffs New Jersey.
- Sugiyono, 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, C.V Alfabeta Bandung.
- Sugiyono, 1994, *Metodologi Penelitian Administrasi: Dilengkapi Dengan Metode R&D*, C.V. Alfabeta, Bandung.
- Suparlan, Parsudi, 1972, *The Javanese in Bandung: Ethnicity in a Medium Sized Indonesian City*, M. A Thesis, University of Illinois.
- Suparlan, Parsudi, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Program Kajian wilayah Amerika Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suparlan, Parsudi, 1997, *Polisi dan Fungsinya Dalam Masyarakat*, Makalah Diskusi dengan Angkatan I KIK Program S-2 Jakarta.
- Suparlan, Parsudi, 1999a, *Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Seminar Hukum Nasional VII. BPHN. Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Diterbitkan oleh Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), Jakarta.

Suparlan, Parsudi, 1999b, Etika ***Pubtik Polisi Indonesia: Agenda dan Tantangannya***, Makalah Sarasehan Etika Publik Polisi Indonesia: Menuju Integrasi Polri dan Masyarakat", Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha, Jakarta.

Suparlan, Parsudi, 1999c, ***Polri Masa Depan***, Makalah Sarasehan Pemantapan Sistem Pendidikan Polri dalam kerangka Profesionalisme Polri, Diterbitkan oleh Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), Jakarta.

Suparlan, Parsudi, 2004, ***Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia***, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.

Suparlan, Parsudi, 2004, ***Hubungan Antar Suku bangsa***, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.

Terry, George R, 2006, ***Prinsip-prinsip Manaiemen***, Tetlemahan J. Smith D.F.M, PT. Bumi Aksara, Cet.8., Jakarta.

Thoha, Miftah, 1983, ***Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya***, PT. Rajagrafindo Perkasa, Jakarta.

Suparlan, Parsudi, 2003, ***Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa & Intervensi***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Utomo, Warsito Hadi, 2005, ***Hukum Kepolisian di Indonesia***, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Wasserman, Stanley and Katherine Faust, 1994, ***Social Network Analysis: Methods and Applications***, Cambridge University Press, Cambridge.

Wilson, Woodrow, 1887, ***The Study of Administration: Politicat Science Quarterly 2 No11***, dalam ***Classic of Public Administration***, 1992, Belmont, CA. dan ***Public Administration: Concept and Cases***, 1992, Boston, MA.

Yulianto, Arif, 2002, *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba: Ditengah Pusaran Demokrasi* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal dan hasil Penelitian

Bruner, Edward M, 1974, *The Expression of Ethnicity in Indonesia*. Abner Cohen (penyunting) urban Ethnicity, Tavistock publications Limited, London.

Dharma, Surya, 2002, *Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi*, Jurnal Usahawan No.01 TH XXXI Januari 2002, Jakarta.

Dharma, Surya, 2002, *Transformasi organisasi Mengg unakan pendekatan 4 R*, Jurnal Usahawan No.01 TH XXXI April 2002, Jakarta.

Djamin, Awaloedin, 2002, *Penyempurnaan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jurnal polisi Indonesia Tahun IV/September 2002, KIK Press, Jakarta.

Dwilaksana, Chrysnanda, 2005, *Pola-pola pemolisian di Polres Batang*, Hasil penelitian Disertasi Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Jakarta.

Dwiyanto, Agus 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.

Muhamad, Farouk, 2005, *Implementasi Ilmu Organisasi Sebagai Cabang dari Ilmu Kepolisian Dalam Menganalisa orgonisasi polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun VII/Juli 2005, Jakarta.

Prasojo, Eko, 2006, *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis*, Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administiasi dan organisasi Volume XIV Nomor 1 Januari 2006, Jakarta.

- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Kajian Ilmu Kepolisian dan perkembangannya: mengharapkan Keterpanggilan Angkatan Muda Polri Dalam Tranformasi organisasi Polri*, Jurnal polisi Indonesia, Edisi IX February 2007, Jakarta.
- Rosyidi, Unifah, 2007, *Reformasi Administrasi Sub Nasional: Suatu Analisis Reformasi Administrasi Kecamatan di Kota Bogor*, Hasil Penelitian Disertasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suarjaya, I Wayan, 2007, *Analisis Pelayanan Publik Desa Dinas dan Desa Pakraman Wongaya Gede Kabupaten Tabanan*, Hasil Penelitian Disertasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sulistyanto, Arief, 2005, *Membangun Kepercayaan Masyarakat*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun VII/Juli 2005, Jakarta.
- Suparlan, Parsudi, 1972, *The Javanese in Bandung: Ethnicity in a Medium Sized Indonesian City*, M.A Thesis, University of Illinois.
- Suparlan, Parsudi, 2005, *Polisi Dalam Masyarakat Majemuk Indonesia* Jurnal Polisi Indonesia, Tahun VII/Juli 005, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, *Reformasi Birokrasi Ke Arah Good Governance*, Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Volume I/Nomor 1/ Juli/2000, Jakarta.
- Perundang-undangan Republik Indonesia, kebijakan, buku petunjuk Polri dan Instansi terkait lainnya.**
- Indonesia, 2002, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta.
- Indonesia, 2004, *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengamanan Obyek Vital Nasional*, Jakarta.

Polri, 2006, *Peraturan Kapolri Nomor Polisi 16 Tahun 2006 tentang pedoman Pengendalian Massa*, 5 Desember 2006, Jakarta.

Polri, 2002, *Keputusan Kapolri Nomor Polisi 22/IX/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah (polda)*, 28 September 2010, Jakarta.

Polri, 2005, *Keputusan Kapolri Nomor Polisi 7/I/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah (Polda)*, 31 Januari 2005, Jakarta.

Polri, 2006, *Keputusan Kapolri Nomor Polisi 244/IV/2004 Tentang Himpunan Buku Petunjuk Kegiatan Fungsi Samapta Kepolisian*, 2 April 2004, Jakarta.

Polri, 2005, *Keputusan Kapolri Nomor Polisi 738/X/2005 Tentang Pedoman Pengamanan Objek Vital Nasional*, 13 Oktober 2005, Jakarta.

Polri, 2010, *Keputusan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan organisasi dan tatacara kerja Polres dan Polsek* 30 September 2010, Jakarta.

Polda Metro Jaya 2010, *Rencana Kerja Polda Metro Jaya*. TA. 2010, Jakarta.

Polres Metro Tangerang Kota, 2010, *Rencana Kerja Polres Metro Tangerang Kota* tahun 2010, Tangerang.

Polres Metro Tangerang Kota, 2010, *Hubungan Tata Cara Kerja Polres Metro Tangerang Kota* tahun 2010, Tangerang.

Sejarah kota Tangerang, www.tangerangkota.go.id, 2010

PEDOMAN WAWANCARA

KEPADA MUSPIDA : WALIKOTA / KET.DPRD/ DANDIM/ KAJARI/
KET.PN
(Penelitian administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota)

1. Sudah berapa lama Bpk/Ibu memegang jabatan yang saat ini ?
2. Apakah lingkup tugas-tugas yang Bpk/Ibu kerjakan ada terkait dengan tugas polisi ?
3. Dalam hal apa saja lingkup tugas Bpk/Ibu sangat terkait dengan tugas-tugas polisi ?
4. Bagaimana melaksanakannya tugas-tugas tersebut agar menjadi mudah dilapangan ?
5. Apakah sejauh ini sudah melakukan kerjasama dengan kesatuan polisi (Polres) setempat, dalam bentuk apa saja dan bagaimana hasilnya ?
6. Apakah sejauh ini Bpk/ibu sebagai pejabat pemerintahan dapat merasakan dampak dari tugas-tugas kepolisian baik dari Polres maupun dari Polsek khususnya yang terkait dengan rasa aman ?
7. Bagaimana hubungan koordinasi institusi yang Bpk/Ibu pimpin sekarang ini dengan kesatuan kepolisian yang ada di sini (Polres maupun Polsek) ?
8. Ceritakan pengalaman Bpk/Ibu yang pernah terjadi terkait penanganan masalah-masalah keamanan di kota Tangerang ?
9. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang dinamika operasional polisi (Polres maupun Polsek) saat ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?
10. Apa saja hal-hal yang Bpk/Ibu rasakan tentang kelebihan dan kekurangan dari pelayanan polisi yang ada di kota Tangerang saat ini ?
11. Seandainya Bpk/Ibu akan membuat suatu kebijakan terkait bidang keamanan atau yang terkait dengan organisasi polisi di kota ini, apa yang perlu prioritas Bpk/Ibu lakukan ?
12. Menurut Bpk/Ibu bagaimana sebaiknya polisi dapat memberikan pelayanan dibidang keamanan , di waktu yang akan datang sesuai dengan perkembangan kota Tangerang saat ini ?

PEDOMAN WAWANCARA

KEPADA : TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA/ KETUA ORMAS
(Penelitian administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota)

1. Sudah berapa lama saudara bertempat tinggal di kota Tangerang ?
2. Bagaimana menurut pendapat saudara situasi keamanan secara umum di kota Tangerang saat ini ?
3. Adakah saat ini permasalahan-permasalahan di masyarakat yang perlu segera ditangani polisi ?
4. Bagaimana pendapat saudara tentang tugas-tugas polisi yang ada di kota Tangerang apakah sudah memenuhi harapan masyarakat ?
5. Bila pelayanan polisi masih dirasakan kurang , menurut yang saudara rasakan bidang apa saja ?
6. Apakah kehadiran polisi dalam menyelesaikan persoalan warga sudah baik saat ini ?
7. Bagaimana hubungan komunikasi saudara dengan pejabat polisi atau dengan anggota polisi di Tangerang ?
8. Menurut saudara apakah polisi saat ini cukup mendengar aspirasi dari masyarakat ?
9. Dari posisi ketokohan saudara di masyarakat, apakah saudara dengan senang hati bila sewaktu-waktu diminta bantuan oleh polisi ?
10. Menurut saudara hal-hal apa yang harus segera di perbaiki atau ditingkatkan terkait dengan tugas-tugas polisi di Tangerang kedepan ?

PEDOMAN WAWANCARA

KEPADA : KABAG/ KASAT/ KAPOLSEK
(Penelitian administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota)

1. Sudah berapa lama saudara menjabat dalam fungsi ini ?
2. Latar pendidikan saudara di kepolisian apa ?
3. Apakah jabatan yang saudara emban saat ini sesuai dengan keinginan saudara?
4. Apakah saudara memahami tugas-tugas yang harus saudara kerjakan ?
5. Apakah semua tugas yang menjadi kewajiban saudara sudah dilaksanakan sesuai aturan atau petunjuk yang berlaku ?
6. Adakah tugas-tugas yang tidak berjalan atau berjalan namun tidak maksimal pada fungsi yang saudara pimpin saat ini ?
7. Mengapa tidak bisa di kerjakan tugas tersebut ?
8. Apakah saudara pernah melaporkan dan memberikan saran kepada pimpinan tentang kendalanya ?
9. Apakah pimpinan saudara telah memberikan solusi dan apakah sudah dikerjakan ?
10. Bagaimana upaya saudara untuk menghilangkan kendala-kendala yang saudara alami dalam melaksanakan tugas pada fungsi saudara ?
11. Apakah saudara mempunyai cukup buku-buku petunjuk sebagai pedoman dalam bertugas, dari mana saja ?
12. Bila tidak ada buku petunjuknya, apakah ada inisiatif pimpinan saudara membuat buku petunjuk ?
13. Bagaimana tugas pelayanan Polri kedepan agar lebih baik pada fungsi yang saudara pimpin saat ini ?

DAFTAR PERTANYAAN

1. Daftar pertanyaan wawancara kepada Muspida Kota Tangerang.
2. Daftar pertanyaan wawancara kepada Tomas/ Toga/ Ketua Ormas.
3. Daftar pertanyaan wawancara kepada Kabag/ Kasat/ Kapolsek



DAFTAR FOTO-FOTO KEGIATAN

1. Foto Satpam di Polres Metro Tangerang Kota.
2. Foto rangkaian pembinaan pelatihan Satpam (pemberian penghargaan).
3. Foto pembinaan Polsus di Lembaga Masyarakat (LP) Tangerang
4. Foto pembinaan Sat Pol PP kota Tangerang
5. Foto kegiatan community policing tatap muka dengan Tomas, Toga, dan Ormas



